

11

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2008

BBM Naik, Kegiatan Nelayan Kembali Terancam

JAKARTA (SINDO)—Skenario pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) ditanggapi negatif nelayan di pesisir laut Kalibaru dan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sebab, saat ini saja kegiatan melaut mereka sedang terganggu karena kelangkaan bahan bakar solar.

Kasudin Penataan dan Pengawasan Bangunan Jakarta Utara Ardin Hutapea mengakui saat ini perlu ada subsidi untuk nelayan dari pemerintah. Menurutnya, biaya operasional yang mereka tanggung cukup tinggi. Apabila kenaikan BBM terjadi bisa dipastikan akan memberi dampak luar biasa terhadap kegiatan melaut para nelayan. "Harga solar Rp4.300 saja sudah terasa memberatkan mereka, apalagi bila sampai naik lagi," kata Ardin, kemarin.

Kondisi ini diperparah dengan sulitnya para nelayan mendapatkan bahan bakar. "Sekarang ini mau mendapatkan bahan bakar saja susah, minyak tanah tidak ada, mau beli solar harus pakai surat keterangan RT/RW dan kelurahan. Kalau tidak pakai surat keterangan dikira penyelundup," keluh Kliwon, 42, warga RW 07 Kelurahan Kalibaru. (isfari)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: R.2

TAHUN 2008

IKM Ngingas ingin garap tabung gas

BISNIS INDONESIA

SURABAYA: Industri kecil di Ngingas, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terkendala ketiadaan mesin pengujian guna memproduksi tabung elpiji, di tengah besarnya kebutuhan tabung gas ukuran 3 kg.

Ketua Asosiasi Pengusaha Logam (Aspelo) Ngingas Miftakhul Ulum mengatakan peluang bisnis tabung elpiji 3 kg cukup besar, menyusul program konversi bahan bakar minyak ke gas, yang membutuhkan jutaan tabung.

"Kami mampu memproduksi tabung gas 3 kg melalui pola subkontraktor, tetapi terkendala ketiadaan alat pengujian, untuk mengukur tekanan yang cukup mahal harganya," ujarnya, kemarin.

Perajin di Ngingas menghasilkan beragam produk logam, seperti komponen listrik, komponen otomotif nonmesin, dan aneka peralatan rumah tangga.

Produsen logam setempat rata-rata menjalin pola subkontrak dengan industri skala besar.

Industri skala kecil logam Ngingas, Kab. Sidoarjo meru-

pakan salah satu sentra yang memperoleh kucuran dana modal awal padanan (MAP) Rp150 juta dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Pembinaan sentra tersebut melibatkan *business development services* (BDS) yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Jawa Timur. Namun, pola pembinaan tersebut telah terhenti tahun lalu.

Adapun Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Astra Waru di bawah Yayasan Dharma Bhakti Astra masih membuka kantor di Ngingas. Lembaga ini masih melanjutkan aktivitas membina para perajin.

Miftakhul menambahkan para produsen logam yang tergabung Aspelo mengembangkan kemampuan teknis secara terus-menerus, sebagai upaya memenuhi kebutuhan calon mitra.

"Sebagian anggota kami sejak 10 tahun terakhir menjalin pola subkontraktor guna memasok komponen listrik maupun otomotif. Hanya saja, pola subkontraktor tabung gas belum terwujud." (K22)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Kapan dan Berapa Naiknya?

Itulah pertanyaan masyarakat kemudian, menyusul pernyataan Presiden tentang kepastian kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Tidak sekadar mempertanyakan, berbagai unsur di sejumlah daerah malah langsung bereaksi. Mereka menentang rencana kebijakan itu. Dibumbui pula antrean masyarakat mendapatkan BBM, dan memicu aksi spekulasi menyembunyikan komoditas penting tersebut.

Waktu berlaku dan besarnya kenaikan harga baru sangat penting bagi masyarakat. Tanpa kepastian dan ketepatan waktu, dalam bahasa ekonomi berarti menciptakan ekspektasi inflasi yang liar. Dalam bahasa rakyat, makin lama diulur, kian panjang penderitaan mereka. Harga kebutuhan pokok pasti terus menanjak.

Ketika harga minyak mentah mendekati 120 dollar AS per barrel beberapa waktu lalu dan belum ada keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, kondisi itu sudah memicu inflasi melaju kencang. Lonjakan harga kebutuhan pokok tak tertahankan. Daya beli golongan bawah, seperti buruh, anjlok, tergerogoti lonjakan harga.

Kalangan ekonom dan pengusaha menilai kenaikan harga yang bisa "diterima" semua pihak bervariasi antara 10 dan 30 persen. Pertanyaannya, setelah kebijakan kenaikan harga berlaku, seberapa lama dampaknya menekan ekonomi masyarakat?

Sebagai referensi, ketika pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 29 persen pada Maret, dampak inflasinya berlangsung sekitar tiga bulan sesudahnya. Catatan lainnya, saat harga dinaikkan lagi pada Oktober 2005 sampai 115 persen, dampak inflasinya berlangsung delapan bulan. Mereka yang tadinya "hampir miskin" seketika jatuh miskin. Dampak seperti itulah yang harus diredam pemerintah.

Andai saja pekerjaan rumah meningkatkan daya beli masyarakat paling bawah benar-benar dikerjakan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah dan politisi, dari pusat sampai tingkat paling bawah, sebagaimana sering kita suarakan, maka setiap kali ada kebijakan kenaikan harga pasti tidak ditentang keras.

Kompleksitas masalah BBM dengan aneka ragam implikasinya pada masyarakat menuntut pengelolaan dengan kebijakan yang dampaknya negatif paling minimal. Bukan saja untuk saat ini, juga masa yang panjang.

Terkait kebijakan menaikkan harga kali ini, kita ingin mengingatkan, memperpendek masa ketidakpastian tentu lebih baik. Apalagi jika kompensasi dari kebijakan itu, terutama bagi masyarakat yang paling miskin, benar-benar dijamin tepat sasaran.

Jangan sampai pemerintah keasyikan mengutak-atik angka-angka skenario, lalu "lupa" mengeksekusi keputusannya dan akhirnya harga kebutuhan terus "membakar" daya beli masyarakat.

Kalkulasi di atas kertas yang didasari pada angka dan asumsi saja sering kali meleset karena potret riil dan menyeluruh kondisi masyarakat jauh lebih rumit.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Voting Imajiner Kenaikan Harga BBM

Oleh BAMBANG HERU

Keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak mungkin sebaiknya melalui "voting imajiner" dari seluruh penduduk Indonesia dengan sistem *one man one vote*. Apakah ini akan merupakan "bunuh diri massal"?

Masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, yang tidak takut inflasi dan kedua yang takut inflasi. Kelompok pertama adalah mereka yang menikmati pertumbuhan ekonomi dan agak cuek inflasi. Kelompok kedua, mereka yang berpenghasilan tidak tetap, bahkan tak menentu, sedikit tersentuh pertumbuhan ekonomi, dan rentan kenaikan harga bahan pokok. Jika dilakukan voting, kelompok kedua pasti menang, harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan.

Penikmat pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi dibutuhkan bangsa. Pertumbuhan ekonomi (GDP=*gross domestic products*) merupakan persentase pertambahan besaran riil total nilai tambah perekonomian (*value added*) yang merupakan balas jasa faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, dan *entrepreneur*).

Dari empat faktor itu, kelompok pertama mendapat bagian terbesar. Adapun kelompok kedua—meski jumlah orangnya ba-

nyak (sekali)—malah mendapat bagian kecil kue *value added*.

Kelompok pertama, penikmat pertumbuhan, takut jika harga BBM tidak dinaikkan karena akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, opini dibuat. Intinya, harga BBM "harus" naik. Alasannya, subsidi akan membengkak, APBN tekor, dan ekonomi akan kolaps. Sungguh bijak jika mereka mau "berjuang" mengurangi (bukan menyapkan) kenikmatan pertumbuhan.

Kelompok pertama lebih terfasilitasi. Mereka lebih mempunyai akses media pemberitaan publik. Dalam diskusi yang disiarkan, media kurang menampilkan opini kelompok kedua.

Alasan subsidi salah sasaran mungkin hanya dilihat dari sudut sempit, misalnya siapa pemakai mobil pribadi. Tanpa kampanye kenaikan harga BBM, mereka takut kurang bisa menikmati pertumbuhan (termasuk mobilnya) lagi karena minimal ada pembatasan distribusi BBM. Ketidaktakutan kelompok ini terhadap inflasi karena mereka mungkin dapat mengalihkannya ke pihak lain meski tidak sepenuhnya. Bahkan, meski inflasi tinggi, tidak akan menghancurkan daya belinya.

Kelompok kedua

Secara jumlah, kelompok kedua merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Karena itu, selayaknya mereka mempunyai

bobot terbesar dalam pertimbangan setiap pembuatan kebijakan memenangkan seluruh bangsa. Kelompok ini amat rentan inflasi (kenaikan harga barang/jasa kebutuhan pokok). Sebaliknya, mereka cuek pertumbuhan ekonomi. Masa bodoh harga mobil dan barang mewah, yang terpenting sandang-pangan-papan harganya terjangkau. Pertumbuhan ekonomi 3 persen atau 10 persen tidak menjadi perhatiannya.

Tumbuh di Indonesia belum berarti langsung dapat dinikmati seluruh bangsa. Apa pun yang terjadi, mereka tidak ingin ada gejolak harga. Kenaikan harga-harga akan menghancurkan daya beli. Sekarang pun, tanpa kenaikan harga BBM, mereka sudah sengsara karena harga kebutuhan pokok melejit.

Pengorbanan bersama

Teoretis, menaikkan harga BBM berarti mengurangi subsidi yang merupakan beban APBN. Selanjutnya, dana itu di-realokasi untuk keperluan lain, misalnya ke sektor pertanian. Berjalankah mekanisme ini?

Pengalaman menunjukkan, membantu sektor pertanian (dengan subsidi?) belum tentu berarti membantu petani. Mengapa? Petani, dalam pengertian umum, kurang menguasai *intermediate input* dan distribusinya, faktor produksi, *output*, dan pemasarannya. Akibatnya, nilai tambah-

nya menjadi kecil, bagian nilai tambah yang diterima juga amat kecil, harga yang diterima juga rendah. Subsidi untuk sektor pertanian lebih diterima oleh pemilik empat komponen di luar penguasaan petani. HPP gabah dinaikkan, tetapi kebijakan itu terlambat sebab mereka tidak lagi mempunyai gabah.

Sebut empat komponen itu sebagai *engine of growth*. Dengan segala kelebihanannya, kelompok pertama menguasai mesin pertumbuhan. Tanpa harga BBM dinaikkan, "mesin" tidak akan berfungsi maksimal.

Jika subsidi dicabut, rantai yang paling mudah dilihat adalah harga barang dan jasa meningkat tajam. Kelompok kedua menjadi tidak berdaya memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, APBN menurut harga konstan (*constant prices*) juga mengecil karena gerusan inflasi. Korban menjadi sangat masif, kelompok pertama maupun kedua.

Salah satu alternatif, harga BBM tidak perlu dinaikkan, tetapi volume konsumsinya ditekan sampai kemampuan APBN tidak berkurang. Korban pasti ada. Namun, tidak seperti ungkapan *tiji tibe* (mati satu, mati semua). Kebijakan harga BBM harus memenangkan seluruh bangsa Indonesia.

BAMBANG HERU
Direktur Statistik Peternakan,
Perikanan, dan Kehutanan BPS;
Pendapat Pribadi

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Indonesia Keluar dari OPEC

Jakarta – Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk keluar dari anggota organisasi pengeksport minyak (OPEC). Demikian pernyataan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden juga sekali lagi mengingatkan untuk menghadapi tingginya harga minyak di tingkat dunia agar semua pihak melakukan penghematan energi secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2008 di Gedung Bidakara, Jakarta Selasa (6/5).

Musrenbangnas ini akan berlangsung selama empat hari mulai tanggal 6-9 Mei. Turut hadir dalam acara ini adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah menteri seperti Meneg PP/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Mensesneg Hatta Radjasa, Kapolri Jenderal Sutanto, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan kebijakan untuk mengurangi subsidi termasuk kemungkinan menaikkan harga BBM pada persentase tertentu. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan akan memberikan perlindungan pada kaum yang lemah.

“Bila pada saatnya nanti menaikkan harga BBM, maka *on top* dari apa yang kita lakukan untuk membantu golongan ekonomi lemah kita tetap akan mengeluarkan bantuan langsung tunai, sehingga bila dirumuskan menjadi bantuan langsung tunai plus, plusnya banyak,” katanya.

Terkait dengan krisis energi yang sekarang tengah kita hadapi, Presiden mengingatkan bahwa saat ini Indonesia tidak lagi menjadi *oil exporting country* (negara pengeksport minyak) namun Indonesia sudah menjadi *oil importing country* (negara pengimpor minyak) karena Indonesia mengonsumsi sejumlah BBM dalam jumlah yang tidak sedikit.

“Jadi kemarin saat rapat kita pikirkan apakah kita tetap akan berada di OPEC atau mengundurkan diri sambil meningkatkan produksi kita sehingga kita tetap pantas berada di dalam OPEC,” kata Presiden seraya mengatakan produksi minyak Indonesia saat ini kurang dari satu juta barel per hari karena sumur-sumur minyak kita yang sudah tua. Pemerintah memang terus berupaya meningkatkan produksi minyak tapi memerlukan waktu satu sampai dua tahun.

(dina sasti damayanti)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2008

Harga Minyak Tembus US\$ 120 Per Barel

New York - Harga berjangka minyak naik di atas US\$ 120 per barel di New York, untuk pertama kalinya Senin (5/5), setelah sebuah laporan menyebutkan terjadi penyerangan terhadap stasiun pompa minyak di Nigeria setelah akhir pekan.

Kontrak berjangka minyak mentah jenis light sweet melesat ke rekor US\$ 120,25 per barel di New York Mercantile Exchange di tengah kekhawatiran pasokan di Nigeria setelah serangan para pemberontak, menurut kantor berita keuangan Bloomberg.

Juru bicara Gedung Putih Scott Stanzel mengatakan Presiden George W Bush akan mengangkat isu ini ketika ia melakukan kunjungan ke negara produsen minyak Arab Saudi, pekan depan.

Gedung Putih juga menyatakan kembali seruanya untuk meningkatkan eksplorasi minyak domestik di kawasan-kawasan, seperti Alaska, yang sejauh ini

telah menjadi sumber kontroversi dengan oposisi, Partai Demokrat, dan kelompok-kelompok lingkungan hidup.

Stanzel mengatakan rekor harga minyak adalah "contoh lain" dari perlunya AS mengurangi ketergantungannya terhadap minyak asing. "Kami punya, di sini, di negeri ini, sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan," kata dia.

Meningkatnya harga bensin di Amerika Serikat, sebuah konsekuensi dari tingginya harga minyak, telah menjadi sebuah topik panas dalam beberapa pekan terakhir dalam kampanye pemilihan kecil presiden.

Calon dari Demokrat Hillary Clinton dan dari Republik John McCain telah menyerukan penghentian sementara pajak federal untuk bensin setelah musim panas, yang oleh rivalnya Clinton, Barack Obama, disebut sebagai salah satu langkah "tipu muslihat" politik.

(ant)

25

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Sikapi Kenaikan Harga BBM Pemda dan Polisi Awasi SPBU

Tangerang - DPRD Kota dan Kabupaten Tangerang mendesak aparat terkait, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Perindagkopar) sebagai *leading sector* hingga kepolisian sebagai eksekutor, agar meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Tangerang.

Langkah itu dianggap perlu guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindak penyelewengan yang dapat memicu kelangkaan, menyusul rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

"Pemda dan polisi harus segera bersiap memperketat pengawasan. Karena merujuk kebiasaan, selalu saja ada oknum-oknum yang meman-

faatkan momen seperti ini guna mencari keuntungan pribadi. Salah satunya adalah tindak penimbunan BBM, yang dapat memicu terjadinya kelangkaan," kata Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatin, Selasa (6/5).

Desakan senada dilon-tarkan Arief Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Menurutnya, pengawasan harus dimulai dari level pemerintahan paling bawah, seperti kelurahan dan kecamatan dan juga masyarakat mulai dari tingkat RT/RW.

"Jika ditemukan adanya kecurangan maka aparat pemerintahan bisa langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian sebagai pelaksana undang-undang untuk mengambil tindakan," katanya.

Wakil Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang

AKBP Iwan Ibrahim menyatakan kesiapan pihaknya dalam pengawasan pendistribusian BBM, terkait rencana pemerintah menaikkan harga. Salah satu yang menjadi target pengawasan polisi saat ini adalah lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Hal senada diungkapkan Kasat Reskrim Polres Metro Kabupaten Tangerang AKP Ade Ari. Menurutnya, pihaknya tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas bila menemukan tindak kecurangan dalam pendistribusian BBM.

"Semua titik yang kami anggap rawan penyimpangan akan diawasi. Mulai dari SPBU sebagai penyalur serta masyarakat perorangan atau industri sebagai konsumen," tambahnya.

(parluhutan gultom)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

■ BISNIS OLI

Menghadapi Rencana Kenaikan BBM, Produsen Oli Bersiap Naikkan Harga

JAKARTA. Menghadapi rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), para produsen pelumas sudah memasang anjang-anjang untuk ikut-ikutan menaikkan harga jual produksinya. Kenaikan ini tak terelakkan lantaran ada tambahan beban kenaikan biaya produksi dan distribusi oli.

Direktur Utama PT Wiraswasta Gemilang Indonesia Ari Batubara mengaku, jika pemerintah jadi menaikkan BBM, biaya produksi pembuatan dan pemasaran pelumas juga akan mengalami kenaikan. "Kira-kira akan naik sebesar 10%," jelasnya. Ari memastikan, kenaikan BBM itu pasti membuat harga oli merek Pennzoil dan Evalube buatan pabriknya naik. Namun, kenaikan harga itu tidak terlalu besar. Berada di kisaran 5% saja.

Yang membingungkan Ari, kenaikan harga BBM akan memicu daya beli masyarakat menjadi rendah. Dengan sendirinya, masyarakat akan lebih banyak melakukan penghematan dengan cara memperpanjang waktu penggantian pelumas. "Ini yang nantinya akan berpengaruh terhadap industri oli karena pembelian oli bakal menurun," jelasnya.

Ketua Umum Perhimpunan Distributor, Importir dan Perdagangan Pelumas Indonesia (Perdippi) Paul Toar setuju dengan Ari. Menurutnya, jika BBM naik, maka industri apa pun akan menaikkan harga jual produksinya, termasuk produsen pelumas.

Paul memperkirakan harga pelumas akan naik sebesar 15% hingga 20%. Pasalnya, biaya produksi akan naik sebesar 5%

Paul memperkirakan harga pelumas akan naik sebesar 15% hingga 20%. Pasalnya, biaya produksi akan naik sebesar 5%. Sementara biaya distribusi akan meroket sebesar 15% hingga 20%. Kenaikan itu sebenarnya hanya untuk menutup tambahan biaya tersebut. "Kemungkinan kenaikannya akan terjadi pada awal Juni atau Juli mendatang," tuturnya.

Fathia Syarif, Manager Komunikasi

Perusahaan PT Shell Indonesia mengaku, perusahaannya telah menaikkan produk pelumasnya sejak Maret lalu. Kenaikannya sebesar 10% hingga 15%. Pemicu kenaikan, salah satunya adalah kenaikan harga bahan baku. Namun, ia belum mau mengungkapkan apakah akan menaikkan harga pelumasnya jika harga BBM naik. "Saya belum bisa komentar karena kenaikan BBM hanya satu penyebab," jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM. Meski belum ada angka pasti, ada perkiraan harga premium bersubsidi akan naik dari Rp 4.500 per liter saat ini menjadi Rp 6.000 per liter. Adapun harga solar naik sebesar 27,9% menjadi Rp 5.500, dan harga minyak tanah akan naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500 atau sebesar 25%.

Kenaikan harga BBM terpicu oleh harga minyak dunia yang tidak pernah bersahabat. Soalnya, setiap kenaikan harga minyak dunia menjadi beban APBNP 2008, terutama pada pos subsidi. Beratnya beban subsidi tentu menyulitkan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Abdul Wahid Fauzie

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

■ HARGA MINYAK

Harga Minyak Mulai Mengarah ke US\$ 200

JAKARTA. Harga minyak dunia kembali jadi sorotan. Maklum, dalam dua hari terakhir, harga minyak mentah terus mencetak rekor di pasar internasional. Selasa kemarin (6/5) waktu Indonesia, kontrak harga minyak West Texas Intermediate (WTI) di New York Mercantile Exchange (NYMEX) untuk pengiriman Juni menyentuh rekor tertinggi baru di US\$ 122,49 per barel. Padahal, pada Jumat akhir pekan lalu (2/5), harganya masih US\$ 111,78 per barel.

Salah satu pemicu lonjakan harga minyak itu adalah serangan gerilyawan pemberontak di Nigeria (MEND) terhadap pipa milik Royal Dutch Shell, Plc. Peristiwa itu membuat Shell harus menghentikan ekspor minyak 170.000 barel per hari.

Pelaku pasar sontak ketakutan. Sebab, berkurangnya pasokan minyak dari Shell berpotensi membuat harga minyak naik lagi. Analis Goldman Sachs Group Inc. Arjun N Murti, misalnya, pernah menghitung bahwa harga minyak mentah bisa mencapai kisaran US\$ 150 - US\$ 200 per barel dalam dua tahun. Tapi, kini, ia mengubah prediksinya. "Kisaran harga itu bisa tercapai dalam waktu enam bulan saja," kata Murti, seperti dikutip *Bloomberg*, kemarin.

Apelles RT Kawengian, Kepala Divisi Pengembangan Monex Investindo menilai, pemicu kenaikan minyak saat ini tak seke-

dar spekulasi. "Pada kenyataannya, permintaan minyak berlebih sementara pasokan terus surut," katanya. Alhasil, dia memramal, dalam satu hingga dua bulan lagi, harga minyak bisa mencapai US\$ 125 per barel.

Masalahnya, kenaikan harga minyak bisa menimbulkan efek domino pada pergerakan nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dan harga komoditi seperti emas. Biasanya, bila harga minyak naik, dolar AS akan melemah. Sementara, harga komoditi ikut melesat.

Efeknya sudah mulai terlihat. Menurut data *Bloomberg*, hingga pukul 17:00 WIB kemarin, kurs euro telah berada di US\$ 1,5522 per euro, naik dari US\$ 1,5497 sehari sebelumnya. Kemarin, harga kontrak emas di Chicago Board of Trade (CBOT) juga sudah berada di angka US\$ 879,80 per troy ounce, naik tipis dari US\$ 874,10 per troy ounce.

Lonjakan drastis itu di luar dugaan analis komoditi. Nico Omer Jonckheere, Wakil Presiden Riset dan Analis Valbury Asia Futures, misalnya, sempat yakin harga minyak tak akan melesat lebih tinggi karena stok minyak dunia masih berlimpah. "Saya rasa, dalam jangka pendek, harga tak akan lebih dari US\$ 121 - US\$ 122 per barel," katanya, kemarin (6/5). Apa boleh buat, fakta bicara lain.

Avanty Nurdiana

28

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

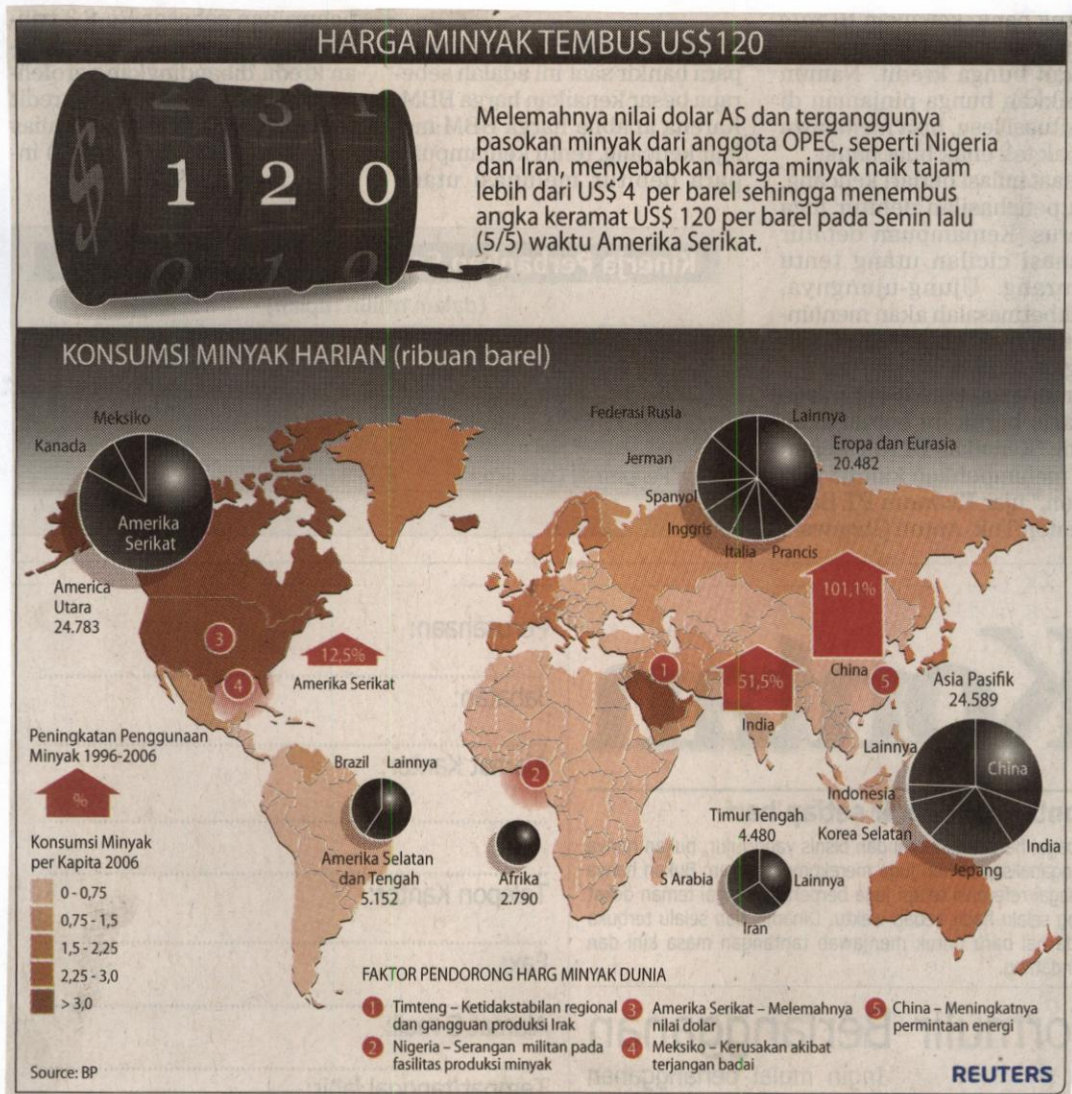
GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES

1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008



**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
--	--

KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
--	---	---

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 16												TAHUN 2008																		

DPRD Batam Minta PGN Stop Gas ke Singapura

SERETNYA pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tak hanya membuat pengusaha geram. Anggota DPRD pun ikut gundah dengan kondisi tersebut. Dus, anggota DPRD Batam mengancam akan mengajak masyarakat untuk memblokir aliran pipa gas Conoco Phillips ke Singapura bila PGN tidak menormalkan pasokan gas di Batam.

Ketua Komisi I DPRD Batam Ruslan Kasbulatov menyampaikan hal ini saat melakukan rapat dengar pendapat dengan PT PGN di Batam, Senin (5/5). DPRD geram setelah mengetahui berkurangnya pasokan ke Batam, karena permintaan gas dari Singapura mengalami lonjakan. "Kami akan ajak masyarakat dan pemerintah memblokir gas ke Singapura kalau pasokan tidak segera normal," kata Ruslan.

Selain Ruslan, Anggota Komisi III DPRD Batam Danir Tan juga meminta Pemerintah Kota Batam bersikap tegas kepada PGN yang mengutamakan pembeli asing ketimbang di dalam negeri. "Pemda bisa memblokir karena pipa PGN melintasi Batam," katanya.

Meski harga jual gas ke Singapura lebih menguntungkan, DPRD minta PGN mengutamakan pasokan dalam negeri. Anggota DPRD Sahat Sianturi menilai langkah PGN menjual gas ke Singapura di saat Batam kekurangan gas, tidak etis. Ketua Otorita Batam Mustofa Wijaya bilang, citra Batam sebagai kawasan industri memburuk akibat berkurangnya pasokan gas.

Syamsul Ashar, Antara

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A-2

TAHUN 2008

Tarif Angkutan Bisa Naik 20 Persen

JAKARTA — Pengusaha angkutan di Ibu Kota berencana menaikkan tarif hingga 20 persen begitu pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. "Tarif angkutan tak mungkin bertahan," kata T.R. Panjaitan, Sekretaris Organisasi Pengusaha Angkutan Darat DKI Jakarta, kemarin.

Menurut Panjaitan, pengusaha angkutan juga terbebani oleh kenaikan harga suku cadang. Belakangan ini, akibat banyaknya jalan rusak, penggantian suku cadang pun lebih sering dari biasanya. "Itu menambah

biaya operasional," ujarnya.

Kenaikan tarif angkutan sebesar 20 persen, kata Panjaitan, tentu bakal membebankan pengguna kendaraan umum. Namun, dia melanjutkan, "Pengusaha angkutan bisa saja tak menaikkan tarif setinggi itu jika pemerintah memberi subsidi."

Di Yogyakarta, pengelola bus Trans-Jogja juga berencana menaikkan biaya operasional kendaraan sekitar 15 persen. Kenaikan itu akan membuat harga karcis lebih mahal dari tarif yang ditetapkan 18 Februari lalu, Rp 3.000. "Kami segera mengusulkan kena-

ikan ke Dinas Perhubungan dan DPRD," kata Direktur Jogja Tugu Trans Purwanto Johan Riyadi.

Dua hari lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan menaikkan harga BBM. Presiden belum menyebutkan angka kenaikan. Tapi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyebut harga BBM akan naik sekitar 28,7 persen.

Secara perorangan, sopir angkutan umum pun siap-siap mengerek tarif. Jamil, sopir angkutan rute Merdeka-Warung Jambu, Bogor, misalnya, berniat menaikkan ong-

kos dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 jika harga bensin naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000. "Syukur kalau bisa naik Rp 3.500," kata dia.

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, kabar kenaikan harga BBM memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Antrean kendaraan umum dan pribadi, misalnya, terjadi di SPBU Sepinggian, Gunung Malang, dan Karang Jati. Sebagian SPBU bahkan tutup lebih awal karena kehabisan bahan bakar. ● ISMI WAHID | M SYAIFULLAH |

DEFFAN P | SG WIBISONO

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A 2

TAHUN 2008

EDITORIAL

Jangan Menunda Rasa Sakit

Akhirnya pemerintah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Inilah kepastian yang sudah lama ditunggu-tunggu. Tapi ketegasan ini akan percuma bila keputusan itu tak segera diwujudkan. Berlama-lama menunda eksekusi penentuan harga baru bahan bakar hanya akan memperburuk situasi. Penundaan akan menyuburkan lahan spekulasi. Para pedagang akan mencuri start dengan berlomba menaikkan harga lebih dulu. Aksi penimbunan bahan bakar pun akan marak. Ujung-ujungnya adalah kenaikan harga bahan-bahan pokok yang tak terkendali. Jika ini yang terjadi, langkah hati-hati pemerintah justru akan menjadi bumerang.

Bumerang itu akan memukul dari berbagai arah. Pertama, dari sisi anggaran pendapatan dan belanja negara. Saat ini anggaran negara dipatok dengan asumsi harga minyak US\$ 95 per barel. Dengan asumsi itu, pos subsidi ditetapkan sebesar Rp 126 triliun. Faktanya, harga minyak dunia sudah menyentuh US\$ 120 per barel, sedangkan harga minyak Indonesia (ICP) ada di kisaran US\$ 105 per barel. Dengan harga itu saja, beban subsidi sudah bertambah Rp 9,9 triliun.

Sekarang bayangkan bila kenaikan itu ditunda, lalu harga minyak ICP terus merangkak ke US\$ 115 per barel. Ini berarti subsidi bahan bakar dalam anggaran negara harus ditambah lagi sebesar Rp 29 triliun. Situasi lebih buruk bila penundaan berlangsung lebih lama, lalu harga minyak Indonesia naik menjadi US\$

125 per barel. Bila ini terjadi, subsidi harus ditambah lagi sebesar Rp 49 triliun. Dari mana kita mendapat uang untuk itu? Hitung-hitungan Danareksa bahkan menyebut, bila kenaikan harga bahan bakar ditunda sampai Juni (seperti diisyaratkan pemerintah), besar kenaikan harga bahan bakar yang aman bagi anggaran negara adalah 73 persen—bukan 30 persen seperti besar kenaikan yang diperkirakan akan diberlakukan.

Pukulan berikutnya akibat eksekusi kenaikan harga bahan bakar yang terlalu lama akan dirasakan oleh para pengusaha. Pengusaha memerlukan kepastian untuk bisa menghitung ongkos produksi dan harga jual. Tanpa kepastian, mereka akan berspekulasi dengan menjual barangnya pada perkiraan harga maksimum. Hasilnya, akan terjadi efek kenaikan berantai yang pada akhirnya memukul seluruh sektor ekonomi.

Masih ada dampak lain, yaitu kredibilitas pemerintah. Penundaan akan memperkuat spekulasi pelaku pasar bahwa pemerintah tak akan mampu menjaga keberlangsungan anggaran akibat subsidi bahan bakar yang terlalu besar. Spekulasi ini berpotensi melemahkan nilai rupiah terhadap dolar.

Semua dampak itulah yang harus dicegah pemerintah. Menunda-nunda pelaksanaan kenaikan harga ibarat menunda rasa sakit. Bahwa harga bahan bakar harus naik, itu sudah pasti. Jika sudah pasti, mengapa harus diulur-ulur, sedangkan efeknya justru menimbulkan masalah yang lebih berat?

Kita paham bahwa pemerintah harus berhati-hati. Misalnya dalam menetapkan ketentuan teknis mengenai kompensasi bagi rakyat miskin melalui berbagai program jaringan pengaman sosial. Tapi kita berharap penghitungan aspek teknis ini tidak memakan waktu terlalu lama. ●

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 24

Survei Litbang Media Group

TAHUN 2008

BBM Murah, Hal Positif Orde Baru

TIDAK SEDIKIT HAL POSITIF YANG ADA DI MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU. TAK BERARTI MERINDUKAN KEMBALI KE MASA ITU, NAMUN ADA HAL-HAL YANG BISA DIJADIKAN CERMIN BAGI KITA SEKARANG, SUDAHKAH KITA BERSUNGGUH-SUNGGUH MENJADI LEBIH BAIK DI ERA REFORMASI SEKARANG INI?

MASA Orde Baru sudah berlalu sepuluh tahun lalu. Meski demikian, masih banyak hal positif yang masih dikenang publik dari era kepemimpinan Soeharto tersebut. Survei Litbang Media Group baru-baru ini menunjukkan hal positif dari era Orde Baru yang paling banyak dikenang publik berturut-turut adalah harga BBM dan sembako yang murah, keamanan yang terjamin, dan ekonomi yang lebih stabil.

Temuan tersebut dihasilkan dari jajak pendapat masyarakat yang dilakukan Litbang Media Group 3 April 2008 lalu. Wawancara responden dilakukan secara

terstruktur dengan kuesioner melalui telepon kepada masyarakat yang tersebar di enam kota yaitu Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Survei ini mencakup 480 responden dewasa yang dipilih secara acak dari buku petunjuk telepon residensial di enam kota tersebut. Hasil survei tersebut tidak dimaksudkan mewakili pendapat seluruh masyarakat Indonesia, namun hanya masyarakat pengguna telepon residensial di enam kota tersebut. *Margin of error* survei ini plus minus 4,6% pada tingkat kepercayaan 95%.

Survei menanyakan kepada publik, apa saja hal yang positif atau baik dari era Orde Baru? Para responden survei ini diminta menjawab secara spontan sebanyak-banyaknya tiga jawaban sesuai dengan persepsi mereka sendiri. Dari seluruh jawaban,

diperoleh sepuluh hal positif dari masa Orde Baru yang paling banyak disebut publik.

Hal terbanyak disebut publik yaitu harga BBM dan sembako di masa itu yang dipandang masih mudah dijangkau berbagai lapisan masyarakat. Jawaban ini adalah refleksi dari kondisi kini yang makin kentara. Belakangan ini kerap terlihat ribuan warga yang antre minyak tanah dan beras murah yang sudah disubsidi pemerintah. Pemandangan seperti itu hanya pernah terjadi saat ekonomi sedang sakit, seperti menjelang kejatuhan rezim Orde Lama dan Orde Baru.

Dalam beberapa bulan terakhir,

HAL POSITIF DARI ORDE BARU

NO	HAL	PERSENTASE
1	HARGA BBM & SEMBAKO MURAH	40.21%
2	KEAMANAN TERJAMIN	36.46%
3	EKONOMI STABIL	26.67%
4	PEMBANGUNAN TERENCANA	21.88%
5	STABILITAS POLITIK TERKENDALI	14.79%
6	PENDIDIKAN MURAH	8.13%
7	MUDAH CARI KERJA	4.79%
8	SWASEMBADA BERAS	4.79%
9	PERTANIAN BERKEMBANG	2.92%
10	TINGKAT KEMISKINAN RENDAH	1.67%

Keterangan:

1. Survei dilakukan oleh Litbang Media Group pada 3 April 2008
2. Responden adalah Pengguna telpon residensial di Jakarta, Medan, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar
3. Rumah tangga dipilih secara acak melalui buku petunjuk telpon residensial yang diterbitkan PT.Telkom
4. Jumlah responden 480 orang dewasa (17+, Laki:Perempuan = 50:50) dan dapat menjawab lebih dari satu jawaban.

pemerintah makin menghadapi dilema besar di saat harga minyak mentah dunia sudah melampaui batas psikologis US\$100 per barel, bahkan kini hampir menembus US\$120 per barel. Jika pemerintah masih terus mensubsidi BBM yang dikonsumsi publik, pemerintah akan menghadapi krisis anggaran luar biasa alias bangkrut. Sebaliknya, jika tidak disubsidi, popularitas para pejabat publik akan anjlok dan hingga tingkat tertentu berpotensi terjadi gejolak sosial di masyarakat yang kemudian bisa merembet menjadi gejolak politik nasional.

Sayangnya, opsi yang disebutkan oleh pemerintah selama ini untuk menyelamatkan ekonomi nasional hanya dua yaitu terus memberikan subsidi atau mencabut subsidi. Bisa dikatakan, pemerintah kurang memerhatikan opsi ketiga yang sebenarnya ada

yaitu melakukan efisiensi penggunaan seluruh anggaran rutin negara.

Hal kedua yang paling banyak disebut publik sebagai hal positif dari Orde Baru adalah tingkat keamanan yang terjamin. Publik meyakini, di masa Orde Baru, keamanan lebih terjamin. Beragam hal mungkin melatari munculnya pengertian publik ini.

Banyak pengamat politik, misalnya, memandang kondisi keamanan yang dirasakan saat itu banyak ditunjang oleh praktik represi aparat pemerintah terhadap berbagai bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Pada masa Orde Baru, misalnya, demonstrasi dan berbagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah ditekan sedemikian rupa sehingga pada tingkat paling buruk adalah terjadinya sejumlah pelanggaran HAM di berbagai daerah oleh aparat negara kepada rakyat.

Hal yang juga banyak disebut publik sebagai hal positif dari masa Orde Baru adalah ekonomi yang stabil. Saat ini dirasakan publik sebagai masa kesulitan ekonomi. Tidak hanya satu atau dua tahun lamanya, 11 tahun sejak krisis moneter nasional terjadi sejak 1997, ekonomi Indonesia sekarang masih dalam kondisi sakit. Padahal, salah satu alasan yang diyakini sebagai penyebab kejatuhan rezim Orde Baru sepuluh tahun lalu adalah krisis ekonomi nasional yang demikian hebat.

Dengan demikian, era reformasi yang menggantikannya sebenarnya amat diharapkan mampu membuat kondisi ekonomi kembali pulih. Namun keadaan

yang diidamkan tersebut tak kunjung datang. Sejak survei Litbang Media Group 2006 hingga survei Maret 2008, publik yang menilai kondisi ekonomi rumah tangganya tidak beranjak lebih baik selalu lebih dari 50%. Mayoritas publik merasakan kondisi ekonomi rumah tangganya sekarang tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula, mayoritas publik (lebih dari 50%) menilai kondisi ekonomi nasional lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya.

Hal positif lainnya yang banyak disebut publik dalam survei ini adalah pembangunan yang terencana. Selama masa Orde Baru, pembangunan dilakukan masing-masing dengan tekanan atau fokus yang berbeda untuk setiap tahapan yang dikenal sebagai pelita (pembangunan lima tahun). Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang dirasakan, misalnya pembangunan ekonomi yang tidak merata dan praktik korupsi di tubuh pemerintahan, tampaknya publik memberi apresiasi pada pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan secara bertahap sebagai hal yang positif.

Di masa reformasi sekarang,



■ ANTARA/UDIN

RENCANA KENAIKAN BBM: Seorang pekerja melakukan pengecekan mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, kemarin. Pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM sebesar 20%-30%.

pembangunan berkelanjutan belum menjadi kenyataan. Dinamika politik di level nasional yang demikian tinggi, termasuk pengertian hubungan legislatif dan eksekutif, sangat mungkin menyebabkan rezim pemerintahan yang berkuasa tidak sepenuhnya mampu mengontrol arah pembangunan secara berkelanjutan.

Hal positif lainnya yang juga banyak disebutkan publik adalah pendidikan yang murah. Maksudnya adalah biaya pendidikan yang masih terjangkau oleh kebanyakan rakyat. Saat ini biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapat pendidikan, terutama perguruan tinggi, dirasakan melonjak selangit. Untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) favorit, tidak cukup hanya memenangi persaingan di ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru, namun harus mampu membayar iuran pendidikan yang tidak murah. Akibatnya, peluang keluarga dengan ekonomi pas-pasan semakin kecil untuk menyekolahkan putra-putrinya di PTN.

Publik juga menyebut kemudahan mendapat pekerjaan merupakan salah satu hal yang positif dari masa pemerintahan Orde Baru. Publik meyakini pekerjaan mudah diperoleh di masa Orde Baru. Terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, geliat ekonomi yang tumbuh pesat di masa Orde Baru membuka banyak lapangan kerja baru terutama di perkotaan.

Sementara itu, di saat kondisi ekonomi seperti sekarang ini, dengan perekonomian berjalan lebih lambat, lapangan kerja baru yang jumlahnya terbatas diperebutkan banyak orang. Pengangguran di mana-mana, tidak sedikit di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Geliat bisnis termasuk usaha kecil dan menengah kurang bisa berkembang

» 'Meski sebagian orang bisa meragukan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Orde Baru melalui Biro Pusat Statistik pada tingkat persepsi publik saat ini, tingkat kemiskinan pada masa-masa Orde Baru dahulu dirasakan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sekarang.'

karena daya beli masyarakat yang juga cenderung menurun akibat perekonomian yang melemah. Mereka juga kerap kesulitan mengakses modal dari perbankan.

Publik juga menyebut swasembada beras dan pertanian yang maju menjadi salah satu kenangan positif publik terhadap era Orde Baru. Tertanam di benak sebagian publik, bagaimana Presiden Soeharto mendapat penghargaan dan berpidato di depan

sidang PBB karena prestasi Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Sebagian publik juga merekam perhatian yang diberikan Presiden Soeharto para petani melalui prosesi panen raya dan dialog kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa) dengan para petani yang disiarkan *TVRI*.

Hal positif lainnya dari masa Orde Baru yang disebut sebagian publik adalah rendahnya tingkat kemiskinan. Jika dibandingkan dengan masa sekarang, tingkat kemiskinan di masa Orde Baru diyakini publik masih tergolong sedikit. Meski sebagian orang bisa meragukan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Orde Baru melalui Biro Pusat Statistik (BPS) pada tingkat persepsi publik saat ini, tingkat kemiskinan pada masa-masa Orde Baru dahulu dirasakan lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sekarang. Setidaknya, itulah persepsi yang dirasakan publik saat ini berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari.

Persepsi yang tecermin dari hasil survei tersebut mungkin kontroversial bagi sebagian orang, namun mestinya diperlakukan sebagai cermin bahwa tidak sedikit hal positif di masa Orde Baru yang mungkin kini dirasakan sebagian orang lainnya semakin langka ditemukan. Apakah itu berarti era reformasi sudah gagal merealisasikan janji-janji perubahan yang diidam-idamkan publik?

(Litbang Media Group)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Harga BBM Bergerak Mahasiswa Juga Bergerak

Awas Jangan Ada Yang Membakar Dan Terbakar

Sehari setelah Pemerintah mengumumkan rencana kenaikan BBM, reaksi panas mulai bermunculan. Harga BBM bergerak, mahasiswa juga bergerak. Apakah ini reaksi dipanasi atau spontan? Awas, jangan ada yang membakar dan terbakar. Hati boleh menjerit, tapi sikap tetap arif.

DI Makassar, dilaporkan sembilan orang mahasiswa ditangkap aparat keamanan saat berdemo menolak opsi kenaikan BBM, kemarin. Di kampung Wapres Jusuf Kalla itu, demo digelar ratusan mahasiswa UIN

Alauddin Makassar. Dalam aksi, mahasiswa sempat menutup jalan, membakar ban hingga menyandak mobil pengangkut BBM.



Harga BBM Naik, Mahasiswa Turun

DEMO mahasiswa menolak kenaikan BBM di depan kampus UIN Alauddin Makassar di Jalan Sultan Alauddin kemarin diwarnai bentrokan antara mahasiswa dan polisi.

Dua polisi dan empat mahasiswa mengalami luka-luka dalam insiden bentrokan tersebut. Empat sepeda motor di depan kampus dirusak dan sembilan mahasiswa dicituk polisi untuk dimintai keterangan.

Di Jakarta, lembaga-lembaga mahasiswa mulai berkonsolidasi dan siap menggoyang Istana mulai hari ini. Presiden BEM Universitas Indonesia (UI) Edwin Nofsan Naufal mengatakan, hari ini pihaknya akan turun dengan kekuatan seribu orang mahasiswa untuk menegusung tujuh tuntutan.

Ketujuh tuntutan tersebut. *Pertama*, nasionalisasi aset strategis bangsa. *Kedua*, meminta pendidikan kesehatan yang bermutu. *Ketiga*, tuntaskan kasus BLBI dan kasus Soeharto serta kronikroninya.

Keempat, kembalikan kedaulatan bangsa pada sektor, pangan, ekonomi dan energi. "Isu BBM kita masukkan di tuntutan keempat ini," ujar Edwin.

Kelima, meminta pemerintah menjami ketersediaan dan keterjangkauan

harga sembako.

Keenam, reformasi birokrasi dan mafia peradilan. *Ketujuh*, selamatkan lingkungan Indonesia.

Sementara, Ketua Umum Pengurus Besar Himpuan Mahasiswa Islam (PB HMI) Fajar R Zulkarnaen menginstruksikan kader HMI di seluruh Tanah Air berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Kata Fajar, demo akan dimulai hari ini hingga 20 Mei, bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. "Kita terus berkonsolidasi termasuk dengan Kelompok Cipayung dan organ-organ lainnya," katanya, tadi malam.

Aksi yang digelar HMI, menurut Fajar, murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. "Kalau BBM tetap naik lebih baik para menteri ekonomi itu mengundurkan diri saja," katanya.

Sekjen Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi (ProDem) Andrianto memast-

ikan, mulai 12 Mei nanti, massa ProDem bersama elemen mahasiswa lainnya akan turun ke jalan.

"Targetnya adalah pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Harusnya, SBY sadar dan jangan mau diprovokasi pembisiknya yang bermazhab neoliberal," tegas Andrianto.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit yakin tidak ada yang menunggangi aksi mahasiswa terkait rencana kenaikan BBM. "Dari dulu mahasiswa memang kritis, apalagi menyangkut BBM. Yang memanas-manasi ya pemerintah sendiri," ujar Arbi kepada *Rakyat Merdeka*, tadi malam.

Aksi mahasiswa, kata Arbi, tidak ada yang menunggangi. Tapi, justru Pemerintah SBY-JK itulah yang ditunggangi kepentingan pengusaha dan elite politik yang ingin APBN tidak jebol. "Kalau APBN aman yang diuntungkan adalah pengusaha karena proyek-proyeknya jalan," katanya.

Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pusat Studi Advokasi Mahasiswa Indonesia, Banu Wayah mengatakan, turunnya para aktivis dan mahasiswa ke jalan menolak kenaikan harga BBM adalah sikap spontanitas.

"Kami spontan turun ke jalan. Kita lihat kenyataannya pemerintah tidak berpihak pada rakyat jika menaikkan harga BBM. Ketika rakyat menjerit, kami beraksi," tegasnya.

Menurut Banu, "Kalau menghadapi kekuatan besar tidak bisa hanya dengan satu atau dua aksi saja. Harus dengan aksi besar, biar para pemimpin mendengar jeritan kita," tukasnya.

Edwin Nofsan Naufal juga menggaransi tak ada yang menunggangi aksi yang akan digelarnya. "Sampai detik ini, tidak ada satu pun pihak yang bisa menunggangi gerakan mahasiswa. Entah kalau gerakan itu dilakukan partai politik," ujarnya. (ZK/SRF/WHY)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Dampak Rencana Kenaikan Harga BBM

Waspadai Gejolak Harga

Jakarta - Pemerintah diminta segera menerbitkan keputusan mengenai kenaikan harga BBM untuk memberi kepastian bagi masyarakat dan kalangan pelaku usaha.

Oleh
**NAOMI SIAGIAN/
SIGIT WIBOWO**

Namun, pemerintah diminta menaikkan harga BBM secara bertahap, tidak sekaligus mencapai 30 persen.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MS Hidayat dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Thomas Darmawan yang dihubungi terpisah, Selasa (6/5).

Hidayat mengatakan kelompok yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan produsen skala menengah dan kecil serta sektor transportasi. Karena itu, dia menegaskan pemerintah harus hati-hati menen-

tukan besaran kenaikan karena akan terjadi penurunan daya beli yang sangat besar.

"Yang juga harus diwaspadai jangan terjadi gejolak harga yang berlebihan dengan kenaikan harga BBM," kata Hidayat.

"Pemerintah harus segera memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Kalau makin lama dibiarkan hanya sebagai wacana akan memberi runag bagi spekulan," kata Hidayat yang juga yakin DPR akan memahami kenaikan harga BBM.

Lebih lanjut, Hidayat menyerukan kepada semua pelaku usaha agar tidak menaikkan harga barang seiring dengan kenaikan harga BBM. Pelaku usaha agar berkorban menurunkan margin keuntungan agar roda ekonomi bergerak baik.

35

Thomas Darmawan juga mengatakan sektor distribusi dan transportasi merupakan yang paling terpuak dengan akibat kenaikan harga BBM. Namun, faktanya banyak daerah-daerah yang menerapkan retribusi antardaerah untuk pengiriman barang dan hasil-hasil pertanian. "Kami minta pungli dan retribusi di sektor transportasi dihapuskan, karena itu menjadi beban biaya bagi pelaku usaha," katanya.

Dia juga meminta agar UKM disubsidi pemerintah, terutama dengan pengalihan minyak tanah ke gas. Pertamina diminta tidak menaikkan harga gas karena akan menyulitkan UKM dan mendistribusikan kompor gas untuk konversi kepada semua usaha mikro.

Makin Terpuruk

Sementara itu, ekonom Tim Indonesia Bangkit Hamonangan Ritonga menyatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM sebesar 25-30 persen bagi penduduk miskin. Pasalnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya membantu penduduk miskin selama BLT

tersebut diberikan, setelah itu penduduk miskin tersebut menjadi semakin terpuruk.

"Kenaikan BBM sebesar 30 persen memang dampaknya tidak terlalu besar bagi penduduk miskin penerima BLT," kata Hamonangan. Jika melihat skema BLT yang akan disiapkan pemerintah yang memberikan setiap rumah tangga miskin Rp 100.000 setiap bulan, penduduk miskin yang memiliki 4 anggota keluarga justru diuntungkan karena bantuan yang diberikan lebih besar dari kenaikan harga barang akibat inflasi.

"Yang paling penting pemerintah memastikan data penerima BLT bisa akurat sehingga tidak salah sasaran," katanya. Data penduduk miskin pada 2005 sudah tidak relevan sehingga harus ada data ulang penduduk miskin.

Menurutnya, pemerintah harus serius melaksanakan program nasional pemberdayaan masyarakat dengan dana Rp 52 triliun. "Jangan sampai program itu dilakukan setengah-setengah karena ini sangat penting untuk menggerakkan perekonomian pedesaan," katanya.

Pastikan Naik

Sebelumnya, Menteri Per-

ekonomian Boediono mengatakan pemerintah memastikan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri secara terbatas. Namun berapa besar dan kapan harga BBM akan dinaikkan belum dipastikan.

"Kebijakan yang akan dilakukan pemerintah ini dalam rangka untuk memberikan kompensasi kepada mereka yang membutuhkan, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin," kata Boediono usai mengikuti sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5).

Kenaikan BBM bersubsidi secara terbatas ini merupakan bagian dari 1 paket yang terdiri dari 3 elemen, yaitu penghematan secara total, kenaikan beberapa harga BBM bersubsidi secara terbatas, dan kompensasi kepada mereka yang mengalami kehidupan yang berat dibandingkan dengan *income* mereka yang berpenghasilan rendah dan miskin. Tujuannya adalah untuk mengamankan APBN 2008 maupun 2009.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambahkan, dengan rencana kenaikan BBM bersubsidi ini,

pemerintah tetap akan menjaga defisit dibawah 2 persen. "Defisit harus tetap dijaga. Kalau bisa defisitnya ditekan lebih rendah. Defisit diupayakan dibawah 2 persen," katanya.

Mulyani mengatakan rencana kenaikan BBM bersubsidi ini merupakan sinyal pemerintah kepada seluruh pelaku ekonomi bahwa kenaikan ini masih dalam batas yang bisa ditanggung masyarakat dan pelaku ekonomi. Kedua, dari sisi waktu supaya tidak menimbulkan erosi terhadap kepercayaan atau menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan.

Sekretaris Utama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program kompensasi untuk masyarakat miskin, setelah kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi diambil. Salah satu program yang akan diambil adalah BLT. Namun, pengamat menyatakan program tersebut memiliki banyak kelemahan.

"Mungkin pemerintah mempertimbangkan bagaimana daya mereka (penduduk miskin) yang sudah sedemikian rendah tersebut dibantu BLT. Tapi, itu baru

skenario, belum final diputuskan," ujar di Jakarta, Senin (5/5).

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengatakan jika pemerintah menggunakan skenario kenaikan harga BBM 28,7 persen pada 1 Juni, akan dihemat anggaran hingga Rp 25 triliun. "Sebagian dialokasikan untuk BLT Rp 11,5 triliun dan Rp 8,4 triliun untuk mengurangi defisit dari 2,1 persen PDB (produk domestik bruto) menjadi 1,9 persen," kata Harry.

Namun, Harry menyarankan agar defisit tetap berada di posisi 2,1 persen PDB. Dengan demikian, dana Rp 8,4 triliun bisa digunakan untuk program-program padat karya. "Dana tersebut, kalau untuk membayar tenaga kerja, akan membuka lapangan kerja baru hingga 700.000 orang," katanya.

Salah satu simulasi kenaikan harga BBM yang sudah diterima DPR adalah harga premium dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter. Lalu, harga solar dari Rp 4.300 menjadi Rp 5.500 dan minyak tanah dari Rp 2.000 menjadi Rp 2.500.

(dina sasti
damayanti/inno
jemabut/esther fin harini)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2008

Membuat Rakyat Kecil Makin Sengsara

PAN Tolak Kenaikan Harga BBM

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang dirancang pemerintah hanya akan membuat rakyat kecil makin sengsara. Oleh karenanya, Partai Amanat Nasional (PAN) menolak kebijakan tersebut.

MENURUT vokalis Fraksi PAN di DPR Dradjad H Wibowo, jika harga BBM dinaikkan maka Presiden SBY dinilai telah melanggar janjinya kepada rakyat.

"Ajining Diri Mangon Ning Lati, kehormatan seseorang itu ada di mulutnya. Presiden berjanji tidak akan menaikkan harga BBM, janji itu harus ditepati. Kalau janji seorang presiden tidak bisa dipegang bagaimana nasib negeri ini," sentil Dradjad.

Nah, untuk bisa menutup defisit APBN lantaran melonjaknya harga minyak dunia saat ini, pemerintah tidak mesti serta-merta menaikkan harga BBM. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah ketimbang hanya memotong subsidi BBM untuk rakyat.

Misalnya dengan cara menaik-

kan tarif pajak secara progresif terhadap komoditi yang saat ini tengah booming semisal minyak, gas, batubara, tembaga dan komoditi perkebunan.

Dradjad mencontohkan, jika pajak minyak bumi dinaikkan 50 persen maka negara akan mendapatkan kenaikan pendapatan pajak sebesar Rp 9 triliun. Dan jika tarif pajak dinaikkannya 60 persen maka, pendapat pajak pemerintah meningkat hingga Rp 15 triliun.

"Ini baru dari minyak saja, belum dari komoditi lainnya, pemerintah akan mendapatkan peningkatan yang signifikan. Pokoknya, dalam pajak progresif ini *tax rate* naik sejalan dengan naiknya harga."

Langkah selanjutnya yang bisa

dilakukan pemerintah sambung Dradjad adalah melakukan penghematan belanja negara sebesar 20 persen. Penghematan itu harus dimulai dari Istana, misalnya dengan mengurangi anggaran kunjungan keluar negeri.

"Penghematan belanja negara hingga 20 persen mulai dari Istana, DPR, kementerian dan lembaga. Minimal Rp 20 triliun bisa dihemat apalagi kalau penghematan DAU sebagai hasil ikutannya juga dihitung."

Langkah lain yang perlu dilakukan SBY masih ujar Dradjad adalah melakukan renegosiasi pembayaran bunga dan atau pokok hutang luar dan dalam negeri terlebih bunga obligasi rekap.

Menurut Dradjad, jika berhasil melobi negara dan lembaga donor, pemerintah mampu berhemat mencapai Rp 80 triliun. Angka itu sangat bermanfaat untuk menutup kebocoran APBN akibat meningkatnya harga minyak dunia.

"Untuk membayar bunga utang luar negeri saja sekitar Rp 94 triliun (10 miliar dollar AS) jika berhasil renegosiasai cukup 3 miliar dollar AS saja. Ini baru sebagian dari bunga belum pokoknya, belum juga obligasi rekap," ujar Dradjad.

Dan yang tak kalah penting, Dradjad meminta SBY menyikat para calo ekspor dan impor minyak yang berbasis di Singapura. Sebutnya, mafia tersebut mengambil selisih keuntungan sebesar 5 sampai 10 dollar per barel.

"Mereka ini cuma perantara alias calo, SBY harus berani menindak mereka. Mereka lah yang menari-nari di atas penderitaan rakyat kita," seru Dradjad.

Sementara itu Ketua Komisi V DPR Totok Daryanto meminta SBY segera mengeluarkan kebijakan pemotongan gaji pejabat negara guna menghemat APBN. Hal itu dilakukan agar para pejabat ikut berkontribusi mencegah terjadinya kenaikan

harga BBM.

"Para pejabat negara ini kalau harga BBM dinaikkan mereka tidak terpengaruh, makanya gaji mereka harus dipotong kalau perlu 30 persen. Selain menghemat APBN, mereka juga harus merasakan penderitaan rakyat," ucap Totok.

Politisi asal Yogyakarta ini mengaku tidak keberatan jika gaji para anggota DPR juga dipotong mencapai 20 persen. Sebutnya, sebagai wakil rakyat, para legislator di parlemen harus menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.

"Apa yang terbaik untuk rakyat kami rela, kalau gaji anggota DPR harus dipotong ya tidak apa. Para menteri, dirjen, dirut BUMN, direksi dan komisaris BUMN juga harus dipotong, uangnya diserahkan ke APBN untuk mencegah kenaikan harga BBM," tegas Totok. ■ LUK

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TAHUN 2008

HALAMAN : ₱.10

Harga minyak mendekati US\$121 per barel

Oleh BERLIANA ELISABETH S.
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Harga minyak mentah memecah rekor tertinggi baru yang hampir menyentuh US\$121 per barel setelah terjadi gangguan pasokan dari Nigeria akibat aksi kerusuhan di salah satu ladang minyak milik Royal Dutch Shell.

Selain itu, spekulasi meningkatnya permintaan turut memicu harga komoditas tersebut.

Aksi penyerangan para militan pada instalasi minyak milik Shell di Nigeria menyebabkan perusahaan kehilangan produksi sebesar 164.000 barel per hari. Nigeria merupakan pengeksport minyak terbesar ketujuh dari 13 negara anggota OPEC, organisasi negara-negara pengeksport minyak. Nigeria juga pengeksport terbesar se-Afrika.

Sepanjang Maret 2008, produksi minyak Nigeria turun 80.000 barel per hari (bph) menjadi 1,96 juta bph dari 2,04 juta bph pada Februari. Pada periode tersebut, produksi OPEC turun 85.000 bph. Selain Nigeria, dua negara anggota lainnya juga mengalami penurunan yakni Venezuela 90.000 bph dan Irak 55.000 bph.

Spekulasi meningkatnya permintaan minyak dari AS ketika musim panas sudah mencapai puncaknya dan kebutuhan untuk olimpiade Beijing juga menjadi pemicu naiknya harga.

Industri jasa di AS menunjukkan pertumbuhan sepanjang April sehingga konsumsi minyak untuk energi juga bertambah. Institute for Supply

Management melaporkan indeks bisnis manufaktur AS, yang mengambil porsi 90% dari perekonomian, bertumbuh untuk pertama kalinya sejak Desember.

Di sisi lain, China menaikkan kapasitas penyulingan dan memacu kenaikan impor minyak untuk memenuhi cadangan saat pelaksanaan olimpiade pada Agustus.

"AS akan memasuki puncak musim panas pada tiga hingga empat pekan ke depan, di sisi lain Olimpiade Beijing dan instalasi penyulingan baru mulai berlaku secara *online* di China. Negeri itu butuh persediaan minyak untuk pesta olahraga dunia," kata Jonathan Kornafel, Director



Sumber: Bloomberg

BISNIS/DENNY IRAWAN

for Asia pada Hudson Capital Energy di Singapura seperti dikutip *Bloomberg* kemarin.

Harga minyak untuk kontrak pengiriman Juni melonjak hingga mencapai rekor tertinggi barunya US\$120,93 per barel kemarin dari US\$119,97 sehari lalu di New York Mercantile Exchange.

Prediksi Goldman

Analisis Goldman Sachs Group Inc Arjun N. Murti memprediksi harga minyak mencapai US\$150 dan US\$200 per barel dalam dua tahun ke depan dipicu melambatnya pertumbuhan produksi.

Murti sebelumnya pernah memprediksi harga minyak pada Maret 2005, ketika itu dia menyatakan harga berada pada kisaran US\$50 dan US\$105 per barel hingga 2009. Harga di New York rata-rata US\$56,71 pada 2005, US\$66,23 pada 2006, dan US\$72,36 pada 2007. Sepanjang 2008, yakni sejak awal tahun hingga kemarin, rata-rata harga minyak mencapai US\$101,47 per barel.

Nico Omer Jonckheere, Vice President Research & Analysis PT. Valbury Asia mengatakan kenaikan harga minyak mentah dipicu kondisi pasokan yang semakin berkurang di tengah permintaan yang bertambah. Negara produsen sulit meningkatkan produksi karena ladang minyak tidak dapat diperbarui.

Indonesia, salah satu negara anggota OPEC, produksi minyak terus mengalami penurunan dari 1,6 juta barel per hari pada pertengahan 1990-an.

Pada April 2008 Indonesia hanya mampu menghasilkan 860.000 bph, sehingga terjadi defisit neraca perdagangan minyak sebesar US\$794 juta. (berliana.elisabeth@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : II

TAHUN 2008

Harga Minyak Naik Terus

Angka 150-200 Dollar AS Per Barrel Bisa Terjadi 6 Hingga 24 Bulan Lagi

LONDON, SELASA — Harga minyak mentah di pasar internasional terus mencapai rekor baru. Pada perdagangan Selasa (6/5), di London, harga minyak sempat menyentuh 122 dollar AS per barrel. Itu berarti harga minyak telah menjadi dua kali lipat hanya dalam tempo 12 bulan bulan terakhir.

Berbagai faktor membuat harga minyak naik, yakni terganggunya pasokan dari Nigeria karena pemogokan dan penyerangan kelompok militan. Selain itu, tensi yang meninggi di Iran karena negara itu menolak inspeksi program nuklir. Nigeria merupakan produsen minyak terbesar Afrika. Iran merupakan produsen minyak keempat terbesar di dunia.

Minyak mentah jenis *light sweet* untuk pengiriman Juni naik menjadi 120,93 dollar AS per barrel walau kemudian turun menjadi 119,88 dollar AS per barrel. Minyak jenis Brent London naik 33 sen menjadi 118,32 dollar AS per barrel setelah sebelumnya mencapai rekor pada posisi 119,07 dollar AS per barrel.

Komoditas lainnya, emas, juga menguat. Meningkatnya harga minyak membuat harga emas kembali naik setelah empat bulan melemah. Namun, harga emas masih berada di bawah rekor terdingginya pada posisi 1.030,8 dollar AS per ounce atau setara dengan 31,1 gram.

"Penurunan harga minyak pekan lalu tampaknya hanya koreksi sesaat," ujar Christopher Bellew, Wakil Presiden Senior Bache Commodities. Pekan lalu harga minyak sempat turun 10 dollar AS per barrel karena berkurangnya spekulasi serta pemogokan berakhir.

Goldman Sachs, lembaga investasi, memprediksi harga minyak akan melonjak hingga 150-200 dollar AS per barrel karena

kurangnya pasokan. "Kemungkinan harga minyak bisa mencapai 150-200 dollar AS per barrel. Ini tampaknya akan nyata dalam enam hingga 24 bulan ke depan," demikian pernyataan Goldman Sachs.

Lembaga investasi AS itu telah memperkirakan pada tahun 2005 bahwa harga minyak memasuki periode "harga yang sangat tinggi".

Rekor harga minyak ini membuat keprihatinan semakin meluas di berbagai kalangan di dunia. Menteri Minyak Kuwait Mohammad al-Olaim mengatakan, pekan lalu Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) kemungkinan menyelenggarakan pertemuan khusus mengenai harga minyak pada September.

Pejabat sementara Menteri Perminyakan Libya Chukri Ghanem belum lama ini mengindikasikan OPEC tak dapat menaikkan produksi lebih banyak.

Kondisi pangan

Selain minyak, krisis pangan juga terus melanda seluruh penjuru dunia. Bencana alam topan

tropis Nargis yang terjadi di Myanmar memporandakan kawasan delta Irrawaddy yang merupakan daerah penghasil beras utama Myanmar.

Kerusuhan di Mogadishu, Somalia, sudah berlangsung selama dua hari. Selain karena kenaikan harga pangan, penduduk marah karena toko-toko menolak pembayaran dengan uang lama yang sebenarnya masih berlaku sebagai pembayaran sah. Tindakan ini memperburuk keadaan karena penduduk sudah kelaparan.

"Saya lapar dan tak dapat membeli makanan. Saya takut kami akan mulai saling makan satu sama lain," ujar Abdifatah Hussein, warga Mogadishu, seraya memegang segepok uang shilling Somalia.

Para penjual lebih menyukai dollar AS atau uang baru. Satu dollar AS setara dengan 34.000 shilling. Dalam satu tahun terakhir shilling sudah melemah 150 persen.

Sekjen PBB Ban Ki-moon menyatakan, satuan tugas bentukan PBB akan bekerja dengan kekuatan penuh dalam mengatasi

krisis pangan. Senin pekan depan, Ban akan bertemu dengan satgas dan segera mengirimkan undangan kepada para pemimpin dunia untuk bertemu pada pertemuan FAO di Roma 3-5 Juni membahas cara mengatasi krisis pangan.

Sementara itu, Thailand membatalkan rencana membentuk kartel beras di kawasan Asia Tenggara yang sedianya akan menentukan harga beras.

Usulan pembentukan kartel beras, seperti Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC), diajukan Perdana Menteri Thailand Samak Sundaravej agar produsen beras dapat mengontrol harga lebih leluasa. Harga beras sudah berlipat tiga sejak Desember. Namun, ide ini menuai kritik dari Filipina yang merupakan importir beras terbesar juga dari para eksportir beras Thailand.

"Jika Thailand membentuk kartel dan menentukan harga, itu akan memperburuk keadaan," ujar Menteri Luar Negeri Noppadon Pattama setelah bertemu dengan para duta besar negara pengekspor beras di Bangkok, Selasa. (AP/AFP/REUTERS/JOE)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 24

TAHUN 2008

Polisi Sita 270 Ton BBM Oplosan

SATUAN Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur menggerebek sebuah gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kawasan Genting Baru, Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil menyita 270 ton BBM oplosan.



■ ANTARA

Dari penggerebekan itu, Polda mengamankan seorang tersangka, yaitu Muhammad Rudi, warga Jl Tombo, Surabaya. "Tersangka kini menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur," kata Kasat Pidana Tertentu Direskrim Polda Jatim AKBP Muhammad Hendra di Surabaya, kemarin.

Selain meringkus satu tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa 270 ton BBM oplosan yang siap dikirim ke sejumlah industri di Jawa Timur. Polisi juga menyita 10 buah tandon plastik, dua unit truk tangki, satu buah alcon mesin pengoplos serta ratusan drum ukuran 20 liter dan enam buah tangki duduk. Tersangka dan beberapa pegawainya mengoplos BBM menjadi bahan bakar alternatif. Di Sukabumi, Jawa Barat polisi juga berhasil menyita sejumlah BBM yang ditimbun. (FL/FZ/N-1)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Indonesia considers quitting OPEC

Desy Nurhayati
The Jakarta Post/ Jakarta

Indonesia is considering temporarily quitting the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) amid a steady decline in the country's oil production, the President said Tuesday.

Indonesia is the only OPEC member that is a net oil importer, as aging wells and lack of investment in new exploration has hurt production.

"During a Cabinet meeting yesterday (Monday), we discussed whether we would stay in OPEC or leave as we struggle to boost our oil production to reach a level where we deserve to be a member of the organization," President Susilo Bambang Yudhoyono said in opening remarks at a national meeting for development planning.

"Our oil production is currently below 1 million barrels per day because of aging wells. We need about two or three years to increase production."

Indonesia joined OPEC in 1962 as the group's only Southeast Asian member. Its daily oil production currently stands at around 927,000 barrels, down from 950,000 barrels per

day last year.

Calls for the government to withdraw from OPEC have been on the rise the past few years, not only because of the slide in oil output but also because of the financial costs of membership.

As a net importer, Indonesia is missing an opportunity to reap the benefits of the persistent surge in global oil prices, which are now hovering around US\$120 per barrel.

Instead, the government has had to allocate massive spending for fuel and electricity subsidies. For the fuel subsidy alone the government set aside Rp 126.8 trillion, more than 12 percent of this year's total spending.

After the Cabinet meeting Monday, the government announced plans to raise fuel prices to a rate that would be "affordable" to the majority of the public, but had yet to disclose an exact price or date.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro said the government would continue studying options to leave OPEC.

"We only had preliminary talks on this matter during Monday's meeting, so we will further analyze the consequences."

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

World oil at new record price above \$120 per barrel

Luqman Suratman

Agence France-Presse/Singapore

World oil reached a new record price above US\$120 a barrel on Tuesday as concerns over the United States economy eased, analysts said.

New York's main oil futures contract, light sweet crude for June delivery, reached an all-time high in electronic trade of \$120.23, breaking the last record of \$120.20 reached during Monday intra-day trade.

Monday marked the first time the price had crashed through the symbolic \$120 ceiling.

The contract was trading on Tuesday afternoon in Asia at \$119.95 a barrel against a record closing price of \$119.97 Monday on the New York Mercantile Exchange.

Brent North Sea crude for June delivery was one cent higher at \$118.00 a barrel, after settling at a record \$117.99 on Monday in London. The contract had earlier hit an

intra-day high of \$118.58.

Oil futures prices on both sides of the Atlantic have nearly doubled in a year and have continued to soar since the benchmark New York contract broke through \$100 at the start of 2008.

Latest U.S. economic data have given oil prices a fresh boost, said Victor Shum, senior principal at Purvin and Gertz energy consultancy in Singapore.

On Monday, the Institute of Supply Management said its index for the vast U.S. service sector rose to 52 percent in April, above the level of 50 that means expansion, and better than expected by private analysts.

That report followed official data on Friday which showed

that the U.S. economy shed 20,000 jobs in April, far fewer than the 75,000 expected by the market.

The unemployment rate unexpectedly slipped a tenth of a percentage point to 5.0 percent, the U.S. Labor Depart-

ment said, compared with an expected rise to 5.2 percent.

Shum said the jobs report gave momentum to the market and the numbers from the services sector "further added to the thinking that the slowdown in the U.S. economy may not be as bad as initially thought."

Traders had feared that a severe slowdown in the United States, the world's biggest economy and largest energy consumer, could affect oil demand.

"The sentiment is quite bullish as a lot of investors think that either way you can't go wrong with oil," Shum said.

Dave Ernsberger, Asia director of global energy information provider Platts in Singapore, said that "most importantly now there is evidence that the U.S. economy is doing quite well."

Supply jitters from Nigeria and geopolitical tension over Iran added to the price surge on Monday, analysts said.

Nigerian militants attacked an oil ship off the coast of the west African country and took two people hostage, a military spokesman said Sunday. Shell accounts for about one-half of Nigeria's 2.1 million barrels-per-day output.

"Nigeria is the lingering hotspot the markets will be focusing on," said MF Global analyst Ed Meir.

Iran said Monday it would reject any offer that violates its right to the full nuclear fuel cycle after world powers said they had prepared a new package to end a long-running standoff over its nuclear program.

41

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Indonesia Ucapkan "Good Bye Opec" Fahmi Idris: Nggak Pada Mati Tuh!

FAHMI Idris khawatir dengan opsi kenaikan BBM. Tapi, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kata Menteri Perindustrian itu, meskipun BBM naik 100 persen, "Nggak pada mati tuh..."

Fahmi, Menteri asal Partai Golkar itu mengatakan di Jakarta, kemarin, sebaiknya BBM tidak dinaikkan. Lalu, buru-buru dia menambahkan, "Tapi hal itu sulit dihindari."

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

"Dalam rapat kabinet terbatas 5 April lalu

ada pertimbangan apa kita masih perlu berada di dalam OPEC atau mengundurkan diri saja," ungkap SBY dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Hotel Bumi-karsa, kemarin.

Presiden mengatakan, produksi minyak mentah yang dihasilkan Indonesia saat ini kurang dari 1 juta per barel selama setahun. Hal itu disebabkan sumur-sumur penghasil minyak sudah berkurang. Untuk meningkatkan produksi, kata Presiden, perlu waktu satu atau dua tahun.

"Akibat itu APBN 2008 mengalami tekanan yang luar biasa. Pemerintah

dan DPR terus mencoba cari jalan keluarnya," tuturnya.

Opsi penyelesaian yang kembali diungkapkan Presiden yaitu, pertama, penghematan yang optimal. Kedua, subsidi dikurangi dengan menaikkan harga BBM pada persentase tertentu dan ketiga, apabila BBM dinaikan akan dibarengi dengan program bantuan langsung tunai (BLT) plus.

Presiden mengimbau agar tidak bergantung hanya pada sumber daya minyak. Masih ada gas dan batu bara yang bisa diefisiensikan.

Sementara itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengaku Pemerintah masih melakukan kajian terhadap rencana keluarnya Indonesia sebagai anggota OPEC. "Ini baru hasil rapat kabinet terbatas kemarin, jadi kita akan cari

langkah dalam menyikapinya," kata Purnomo.

Purnomo membantah jika wacana itu dikaitkan dengan kenaikan harga minyak dunia. "Presiden sudah mengatakan, antara konsumsi dan produksi minyak di Indonesia sudahimbang. Jadi kita tidak termasuk negara produsen minyak lagi," katanya.

Hal yang sama dikatakan Menko Perekonomian, Boediono. Pemerintah sedang membahas apa yang terbaik buat bangsa ini ke depan. Khusus soal keanggotaan OPEC, Boediono mengatakan saat ini Indonesia bukan lagi produsen minyak. "Keadaan kita hampir pas diantara konsumsi dengan produksi," katanya.

Terkait besaran kenaikan BBM, Boediono mengatakan, pemerintah hingga kini masih membahas berapa persen-

Laksanakan 7 Tuntutan Sebelum BBM Naik

tase kenaikannya. Program kompensasi akan dilaksanakan, setelah ada keputusan tersebut.

Sementara itu Direktur LPKP (Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik) Ichshanuddin Noorsy mengingatkan, sebelum menaikkan harga BBM, seharusnya pemerintah mengatasi tujuh hal krusial. *Pertama*, memberantas korupsi pada biaya pemulihan (cost recovery) yang pada 2007 mencapai 8,3 miliar dolar AS.

Kedua, menyehatkan alat ukur ekspor minyak mentah, sehingga jumlah yang diekspor sama dengan yang dilaporkan. Selama ini —berdasarkan info yang diterimanya— jumlah minyak yang dilaporkan atau dicatat, lebih rendah dari jumlah minyak yang diekspor yang sesungguhnya.

Ketiga, mendesak bank-bank BUMN supaya membiayai pengeboran sumur-sumur gemuk sementara yang depositnya tidak ekonomis (atau biasa disebut kambing kurus) tak perlu diprioritaskan, sehingga produksi minyak nasional kembali ke era Orba, yakni sekitar 1,6 juta barel per hari.

Keempat, hapuskan korupsi dalam kegiatan impor minyak mentah dan minyak olahan. *Kelima*, merevitalisasi kilang-kilang sehingga negara tidak tergantung pada impor minyak mentah. Selain itu, perlu dibangun kilang-kilang minyak baru seperti dilakukan beberapa negara.

Keenam, membangun infrastruktur hilir sehingga biaya bisa menjadi lebih efisien.

Ketujuh, menghentikan upaya-upaya meliberalkan industri minyak, karena kebijakan itu hanya membuat Indonesia tunduk dan patuh pada kediktatoran asing atau pasar minyak internasional. Di samping itu pemerintah perlu merestrukturisasi BP Migas dan BPH Migas.

Bekas anggota Komisi VIII DPR itu mengaku tidak percaya terhadap alasan pemerintah bahwa kenaikan harga BBM untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Ia menanyakan, pertumbuhan itu untuk siapa? Karena pada APBN 2005-2007, pertumbuhan itu justru untuk orang kaya atau untuk pasar finansial, bukan untuk rakyat miskin. (WHY/HPS)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

Dampak Pembatasan BBM

Oleh **Sarwoto**

Mantan Kepala Bagian Kepegawaian LIPI

MUSIBAH berupa bencana alam yang bertubi-tubi melanda negeri akhir-akhir ini melumpuhkan gerak sendi-sendi perekonomian dan berdampak pada kehidupan bermasyarakat.

Kerugian yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat adalah berkurangnya produksi beras dan kenaikan harga sembako. Barang-barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok lain produksi dunia perindustrian berkurang pula karena lumpuhnya kegiatan akibat bencana tadi.

Ancaman krisis tersebut ditanggulangi pemerintah dengan program stabilisasi harga. Tapi program yang dimaksudkan untuk meringankan beban ekonomi rakyat itu bukan tidak mungkin justru menimbulkan akibat sebaliknya, memperberat impitan yang mendera kehidupan rakyat.

Pemikiran ini dilandasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Dana Rp20 triliun untuk mendukung program tersebut sebelumnya diperuntukkan bagi subsidi BBM jenis minyak tanah, solar, dan premium Rp10 triliun serta subsidi listrik Rp10 triliun.

Pembatasan pembelian

Pemerintah berencana membatasi pembelian solar dan premium dengan kartu kendali. Berapa pun pembatasan pembelian solar dan premium untuk kendaraan angkutan umum dan barang yang ditetapkan nanti, barang dan jasa produksi dunia perindustrian akan berkurang karena membengkaknya biaya produksi. Sebab, untuk mencukupi keperluan bahan bakar kendaraan operasional, produsen terpaksa membeli pertamax yang harganya lebih mahal daripada premium.

Program pemerintah dengan membatasi pembelian solar dan premium bersubsidi itu justru mengakibatkan bertambah langka dan melonjaknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Pencapaian program itu paling-paling hanya sebatas pada kestabilan harga yang masih di atas jangkauan daya beli masyarakat.

43

Dengan demikian, kemakmuran rakyat yang seharusnya diwujudkan menggunakan minyak bumi yang merupakan sebagian dari kekayaan alam kian jauh dari kenyataan. Lebih-lebih kalau diperhitungkan dampak yang timbul dari pengurangan subsidi listrik dan konversi minyak tanah ke gas yang sebelumnya juga ditetapkan yang dilengkapi kartu kendali pembelian minyak tanah dengan uji coba di Jawa dan Bali.

Dengan timbulnya sederetan bencana alam plus krisis pangan minus subsidi BBM dengan dampak tersebut, lengkaplah musibah yang kini melanda negeri ini yang semakin menjauhkan amanat UUD 1945 untuk memakmurkan rakyat.

Amanat UUD 1945 untuk memakmurkan rakyat dengan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi itu terlupakan. Peggagas kebijakan pengurangan subsidi BBM dengan membatasi pembelian BBM seperti terpaku pada pemikiran hanya memperkecil dana yang semula diperuntukkan subsidi bahan bakar, tanpa memperhitungkan dampaknya.

Seiring dengan terus meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mencapai lebih US\$140 per barel, meningkat pula harga seluruh jenis BBM, di antaranya premium. Sebab, bahan bakar ini disuling dari petroleum impor yang harganya terus meningkat itu.

Mahalnya harga BBM logikanya bisa ditanggulangi dengan merenovasi instalasi penyulingan sedemikian rupa sehingga dapat menyuling petroleum hasil pengeboran domestik. Dengan demikian, harga BBM dapat menurun dan ditekan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat tanpa subsidi lagi. Menurunnya harga BBM dengan sendirinya menurunkan pula biaya produksi yang kemudian juga menurunkan harga barang-barang dan jasa termasuk kebutuhan pokok masyarakat. Pakar-pakar teknologi perminyakan tentunya berpotensi merenovasi instalasi penyulingan tersebut, kalau pemerintah memang berkehendak politik demikian. Kalau tidak, bisa mengundang pemikiran miring, apakah 'ada udang di balik batu' yang berkaitan dengan kesan pemarginalan pengetahuan masyarakat luas tentang seluk-beluk BBM, dengan motivasi perolehan keuntungan ilegal bagi pihak-pihak tertentu.

» "Peggagas kebijakan pengurangan subsidi BBM dengan membatasi pembelian BBM seperti terpaku pada pemikiran hanya memperkecil dana yang semula diperuntukkan subsidi bahan bakar tanpa memperhitungkan dampaknya.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 23

TAHUN 2008

Pikirkan Dampak Harga BBM Naik

Presiden sudah memberi persetujuan untuk menaikkan harga BBM. Persetujuan ini guna menyelamatkan anggaran negara. Demikian saya mengutip berita di harian ini.

Boleh saja pemerintah menaikkan harga BBM. Itu merupakan hak. Namun pemerintah harus mempertimbangkan masak-masak mengenai dampak menaikkan harga BBM, di luar pertimbangan politis.

Rakyat saat ini sedang banyak menerima banyak beban. Mulai kenaikan harga pangan, serta ongkos hidup. Mohon pemerintah bijaksana dalam menetapkan harga baru BBM.

Hendrik Olan,
Bekasi Jawa Barat

44

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: A. II

TAHUN 2008

Pembatasan Konsumsi BBM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mempercepat pembatasan konsumsi premium. ACC? Pak DPR, yang penting bahan bakar minyak bersubsidi untuk rakyat kecil tetap dipertimbangkan agar tidak terlalu menjadi beban. Bila BBM bersubsidi terlalu banyak mengalir ke mereka yang tidak patut disubsidi, jatah rakyat pula yang terdesak.

Konon pembatasan konsumsi premium bisa menghemat anggaran sampai Rp 20 triliun. Mudah-mudahan hal itu bisa dicapai dan dimanfaatkan untuk mengurangi dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia. Semoga para pelaksana kebijakan pemerintah dapat menjalankan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Bila ada yang main-main, babat saja.

Mabhami B. Mahmud
Jakarta

45

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

DJALI YUSUF
Staf Khusus SBY

"Presiden Tak Tega"

Jakarta, RM. Presiden SBY sebenarnya tidak tega membuat rakyat sengsara karena kenaikan harga BBM. Namun hal itu mau tidak mau harus dilakukan karena kenaikan harga minyak dunia sudah hampir menembus 120 dolar AS per barel.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden SBY bidang Komunikasi Politik, Djali Yusuf kepada *Rakyat Merdeka*, kemarin.

Djali mengungkapkan, Presiden sangat fokus memikirkan keadaan bangsa untuk keluar dari kemelut global. "Presiden SBY sebagai pemimpin tentu tidak akan tega melihat rakyatnya sengsara. Karena itu pemerintah berencana akan memberikan

subsidi kepada rakyat miskin akibat kenaikan harga BBM," ujarnya.

Subsidi, kata dia, diberikan dalam bentuk kompensasi yang tepat sasaran. Karenanya, "Para pelaksana yang diberi amanah harus benar-benar merealisasikan bantuan itu ke masyarakat yang membutuhkan. Jangan diselewengkan," tuturnya.

Ketua DPR Agung Laksono menawarkan solusi jitu supaya harga BBM tidak dinaikkan. Yakni, pemerintah jangan sungkan-sungkan atau malu untuk meninjau ulang atau menunda pembayaran utang luar negeri.

"Caranya? Presiden SBY mengirim Menko Perekomian Boediono dan Menkeu Sri Mulyani untuk melobi Bank Dunia dan IMF agar mau menunda pembayaran utang luar negeri kita hingga 5-10 tahun mendatang," kata Agung Laksono di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut Agung, ini keadaan darurat sehingga pemerintah tidak usah malu rating negara akan jeblok. Yang penting harga BBM tidak naik dan rakyat tidak sengsara hidupnya.

Ditanya, apakah yakin upaya itu berhasil, Agung langsung menukas, "Itu menjadi tugas pemerintah untuk melobi negara-negara donor agar mereka bisa menerima opsi peninjauan kembali pembayaran utang luar negeri itu tanpa ada tekanan."

Wakil Ketua Umum Golkar itu pesan berkali-kali agar harga BBM jangan

dinaikkan. Kata dia, sebelum bantuan kepada rakyat miskin siap 100 persen, BBM tidak dinaikkan. Bahkan kalau perlu, berikan bantuan subsidi dulu untuk rakyat miskin.

"Kalau itu sudah dilakukan, baru kita pikirkan rencana kenaikan BBM. Kalau bantuan untuk rakyat miskin belum jelas, jangan coba-coba menaikkan harga BBM. Coba lihat deh ke bawah, rakyat sudah sekarat. Saya merasakan, kehidupan rakyat kecil baik di sektor pertanian, perikanan, buruh pegawai rendah dan sektor informal makin berat," kata Agung Laksono.

Ia menjelaskan, sebagai Ketua DPR, dirinya memang harus membela aspirasi rakyat. Karena siapa lagi kalau bukan dirinya yang berbuat untuk menolong rakyat.

"Selain upaya-upaya itu, kita dorong supaya produksi minyak kita meningkat jadi 1,4 juta barel per hari. Pemerintah harus melakukan diversifikasi dan penghematan BBM, dan terakhir, operasi antikorupsi mesti ditingkatkan tanpa pandang bulu," kata Agung Laksono.

Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno juga meminta harga BBM jangan dinaikkan karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan. Misalnya, kata Mbah Tardjo, dana dari hasil pemotongan anggaran departemen bisa digunakan untuk menutupi kekurangan subsidi BBM. "Jadi prinsipnya, BBM jangan naik. Kalau naiknya 30 persen, ya sama saja menyusuh rakyat untuk gantung diri," katanya di gedung DPR. (WHY/HPS)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Vox Populi

CATATAN:
Supratman
doubojo2002@yahoo.com

Dasi Kupu-kupu Dan BBM



TIDAK ada pejabat yang begitu fanatik dengan dasi kupu-kupu selain Soebroto. Bekas Menteri Pertambangan dan Sekjen Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) ini telah mengharumkan nama Indonesia di antara negara-negara penghasil minyak. Dasi kupu-kupunya ikut mengantar Indonesia ke arena internasional semasa dia menjabat Sekjen OPEC di era 80-an.

Sekarang Indonesia berencana keluar dari OPEC karena bukan lagi negara pengekspor minyak. Wajar. Tapi, yang menyakitkan, sumber daya alam yang pernah dibangga-banggakan itu kini tinggal kenangan.

Yang menyakitkan, kita juga kerap mendengar adanya penyelundup dan mafia BBM. Presiden SBY di awal-awal masa jabatannya pernah memerintahkan untuk mengusut tuntas para penyelundup dan mafia BBM. Bahkan, ada belasan orang yang pernah disebut-sebut keterlibatannya. Tapi, hasilnya? Entahlah.

Sekarang, kita hanya mendengar ada beberapa penyelundup dan mafia BBM. Tapi kita tidak tahu, apa yang dilakukan pemerintah terhadap mereka. Padahal, tiap tahun, negara ditaksir dirugikan sampai hampir sepuluh triliun rupiah. Jumlah yang fantastis.

Indonesia memang tragis. Ketika negara-negara lain terus menghasilkan

minyak dan mendapat berkah dari kenaikan harga minyak, Indonesia justru didera pusing yang luar biasa.

Indonesia sebenarnya memiliki 150 ladang minyak bumi, namun hanya 58 yang bisa berproduksi. Itu pun produksinya hanya di bawah satu juta barrel per hari. Bandingkan dengan Iraq. Negeri yang dilanda perang itu bisa menghasilkan 1,9 juta barrel per hari. Kalau dibandingkan dengan Arab Saudi, jauh. Negeri kaya minyak itu bisa menghasilkan 9,1 juta barrel per hari.

Pemerintah pasti sedang pening. Karena, kalau harga BBM naik, popularitas menurun. Tidak dinaikkan, negara bisa bangkrut. Sebaliknya, di pihak oposisi, ini menjadi semacam berkah dan senjata. Karena, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, hujatan dan tuduhan pasti menyala-nyala.

Sebenarnya, pemerintah tak perlu pusing-pusing. Sita saja harta koruptor, terutama koruptor BLBI yang diduga merugikan negara sampai 600 triliun rupiah. Beres. Utang para penjarah uang rakyat tersebut, bahkan sampai sekarang bunganya masih dibayar pemerintah. Ini kan lucu, pemerintah terus menalangi utang konglomerat sementara rakyat megap-megap.

Ketika negara dan rakyat dipusingkan oleh BBM, saya jadi teringat dasi kupu-kupu Soebroto yang bisa membawa berkah. Eh, yang datang justru kupu-kupu beneran, yang hinggap di mana-mana.

Kata orang, ini pertanda bakal ada tamu. Tamunya justru menyesakkan: kenaikan harga BBM. Lebih menyesakkan lagi kalau pemerintah tak bisa berbuat maksimal menangkap penyelundup dan tak bisa berhemat serta tak kuasa menyita harta koruptor. (*)

47

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

BISA TEMBUS US\$150-200

Harga Minyak Capai Rekor US\$ 121 Per Barel

LONDON- Minyak mentah mencapai rekor terbaru US\$ 121 per barel menyusul risiko suplai dari Nigeria dan Iran. Melonjaknya harga minyak itu juga akibat tingginya permintaan minyak dari Amerika Serikat.

Perusahaan minyak Royal Dutch Shell Plc menyatakan adanya kerusakan stasiun pengaliran minyak di Nigeria selama sepekan, padahal Nigeria adalah produsen minyak terbesar di Afrika. "Rendahnya pertumbuhan suplai akan memicu tingginya harga minyak," kata analis Goldman Sachs Group Inc Arjun N Murti, seperti dikutip *Bloomberg* di London, Selasa (6/5).

Menurut Goldman Sachs Group Inc, kejadian itu kemungkinan akan membubungkan harga minyak pada kisaran US\$ 150-200 per barel dalam dua tahun ke depan. Dalam analisisnya, Murti menyatakan, sejak 2005 hingga kini harga minyak dunia menunjukkan tren meningkat. Tiga tahun lalu harga minyak rata-rata US\$ 56,71 per barel. Setahun kemudian naik menjadi US\$ 66,23 dan tahun lalu melompat ke level US\$ 72,36.

	2004	2005	2006
Inggris	2,03	1,81	1,64
Kanada	3,08	3,04	3,15
Meksiko	3,82	3,76	3,68
Rusia	9,29	9,55	9,77
Kazakhstan	1,30	1,36	1,43

Minyak mentah untuk pengiriman Juni naik 96 sen dolar AS menjadi US\$ 120,93 per barel di Bursa New York. Ini merupakan angka tertinggi sejak 1993. Sementara kontrak sejenis di Bursa London ditutup pada angka US\$ 119,67 per barel.

OPEC Tandingan

Di sisi lain, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) saat ini berkukuh belum berniat meningkatkan produksi minyak ken-

dati permintaan global terus melonjak. Produksi minyak OPEC sampai sekarang berkisar 32 juta barel per hari.

Sikap 'keras kepala' OPEC itu menyebabkan sejumlah negara penghasil minyak di luar OPEC, membuat kubu tandingan. Mereka siap menyuplai minyak mentah untuk pasokan global.

Tandingan OPEC ini merasa tidak puas dengan kebijakan OPEC. Negara kartel minyak sungguhan ini, enggan menambah suplai minyak dunia di tengah tingginya harga minyak yang telah menembus level US\$ 120 per barel.

"Dalam jangka pendek non-OPEC akan meningkatkan produksinya. Mereka akan menjual produksi minyaknya sebanyak mungkin," ujar Humas Petrole et Gaz, Francis Perrin, seperti dikutip *AFP* di Paris, Prancis, pekan lalu.

Negara OPEC tandingan yang akan ikut berjibaku menyuplai minyak dunia, antara lain Inggris, Meksiko, Rusia, Brasil, Kanada, dan Kazakhstan. Kendati begitu, aksi ini dinilai sumir oleh sebagian kalangan. Sejumlah analis menilai, volume minyak mentah hasil aksi tersebut sulit untuk menandingi hasil negara minyak terbesar di dunia, Arab Saudi, yang mampu menyuplai 2 juta bph.

Sikap OPEC yang tidak mau menaikkan suplai minyak dilatarbelakangi oleh faktor fundametal. OPEC menilai, harga minyak mentah dunia yang telah menghentakan ekonomi berbagai negara bukan disebabkan mimimnya pasokan minyak, tapi aksi para spekulan dan pelemahan nilai tukar dolar AS. (dr/ari)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Pertamina Pangkas Produksi Kilang

JAKARTA-PT Pertamina dan National Iranian Oil Refinery dan Distribution Co (NIORDC) akan memangkas kapasitas produksi kilang bahan bakar minyak (BBM) menjadi 150.000 barel per hari (bph) dari 300.000 bph karena terbatasnya bahan baku minyak. Rencananya kilang tersebut dibangun di Serang, Banten. Kepala Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Priyo Utomo seperti dikutip *Bloomberg*, di Jakarta, Selasa (6/5), mengatakan, realisasi pembangunan kilang tersebut dipastikan bisa membantu Indonesia mengurangi impor premium dan solar. "Dengan dipangkasnya kapasitas produksi, investasi juga bisa lebih rendah, kami masih menghitung angka pastinya," kata dia. Menurut dia, Pertamina dan NIORDC telah menandatangani kesepakatan untuk memiliki 40% proyek kilang tersebut, sedangkan Petrofield Refining Co dari Malaysia memiliki 20%. Kilang tersebut akan dibangun mulai tahun depan dan selesai 2011 dengan perkiraan investasi sebelumnya US\$ 7,1 miliar. (ari)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Pemerintah Siapkan Dana Kompensasi Rp 35 Triliun Bagi Masyarakat Miskin

Harga BBM Naik 30 Persen

JAKARTA, (PR).-

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan, pemerintah akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar 30 persen untuk menyelamatkan APBN 2008 akibat melonjaknya harga minyak dunia yang menembus 120 dolar AS per barel. Menurut dia, kenaikan harga BBM itu akan diimbangi dengan penyaluran bantuan tunai langsung (BLT) plus.

"Pemerintahan SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono - Ju-

suf Kalla) telah dua kali menaikkan harga BBM, yaitu 30 persen pada Maret 2005 dan 120 persen pada 1 Oktober 2005," kata Jusuf Kalla, saat berbicara di depan peserta Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Hotel Bidakara, Jln. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (6/5).

Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, dana kompensasi kenaikan harga BBM mencapai Rp 35 triliun dan akan dialokasi-

kan untuk program pengentasan kemiskinan, di antaranya BLT plus bagi masyarakat miskin.

"Kita sekarang sedang kaji kenaikan BBM sebesar 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. Kalau kenaikannya 30 persen, kita akan dapat dana dari penurunan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun," ujarnya.

Paskah menambahkan, pemerintah tetap akan menggunakan basis data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kenaikan harga BBM

pada 2005, yaitu 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM).

"Kalau kenaikannya 30 persen, maka akan digunakan basis BLT 2005 dengan besaran yang sama," katanya. Itu berarti, setiap RTM akan menerima sekitar Rp 100.000,00/ bulan selama setahun. Selain itu, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan kepada masyarakat berupa bahan makanan, di luar skema raskin.

Menurut Paskah, dalam dua pekan ini, pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan BLT

plus tersebut, sehingga penyalurannya bisa berbarengan dengan kenaikan BBM yang diharapkan paling lambat awal Juni 2008.

Agar BLT plus tepat sasaran, Paskah mengatakan, pihaknya terus mengkaji data-data penerima BLT, karena dengan adanya penurunan persentase penduduk miskin setelah BLT 2005 dari 17,75 persen menjadi 16,75 persen, kemungkinan ada penurunan penerima BLT plus.

"Untuk mencegah salah sasaran BLT, pola penyaluran-

nya tetap melalui kantor pos. Mekanisme penyaluran BLT sama seperti tahun 2005, tidak berubah mekanismenya. Mungkin berubah jumlahnya. Tapi kita tetap pakai patokan 19,1 juta," ujarnya.

Harus naik

Wapres menegaskan, kenaikan harga BBM merupakan langkah yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah, menyusul melonjaknya harga minyak dunia hingga menem-

bus angka 100 dolar AS per barel.

"Dengan kenaikan itu, sebenarnya ada yang harus membayar banyak (masyarakat pengguna) dan ada pula yang menerima banyak (Pertamina) sehingga perlu ada kompensasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa BLT," katanya.

Dijelaskannya, kenaikan harga minyak dunia saat ini mau tidak mau membuat Indonesia kewalahan, mengingat produksi minyak mentah dalam negeri semakin berkurang. "Saat ini, kita mengalami kesenjangan antara produksi dengan konsumsi sebesar 300 ribu barel per hari. Ini mengakibatkan subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah terus mengalami kenaikan, apalagi bila terjadi lonjakan harga minyak dunia," tutur Wapres.

Selisih sebanyak 300 ribu barel per hari inilah yang harus ditekan melalui penghematan, antara lain melalui pengalihan minyak tanah ke gas, dan minyak diesel ke batu bara.

Bank Indonesia (BI) mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah menyesuaikan subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM. "Kami melihat langkah pemerintah untuk mengurangi tekanan terhadap fiskal melalui penyesuaian subsidi BBM, merupakan perkembangan yang mengembirakan," ujar Deputy Gubernur Senior BI, Miranda S. Goeltom, se usai Rapat Dewan Gubernur BI di Gedung BI.

Hal itu akan memberi arah yang lebih pasti bagi BI dan pemerintah untuk mengendalikan tekanan inflasi yang menguat. BI sudah memperhitungkan angka inflasi akibat kenaikan BBM itu. "Semua sudah kami perhitungkan bagaimana perkiraan inflasi sampai akhir tahun. Lebih baik saya tidak menyebutkan, yang pasti kami sudah memperhitungkan semuanya," ujarnya.

DPR menolak

Sementara itu, kalangan DPR menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq, meminta pemerintah tidak terburu-buru menaikkan harga BBM. Dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum pulih benar.

"Perbedaan Indonesia dengan negara-negara lain, kondisi daya beli sebagian besar masyarakat masih lemah dan dampak kenaikan BBM tahun 2005 belum teratasi. Dikhawatirkan timbul gejolak sosial," ujarnya.

Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintahan SBY jangan menjadikan alasan perekonomian global untuk menaikkan BBM. "Alasan apa pun, Fraksi PDIP meminta pemerintah tidak menaikkan BBM, karena realitas beban rakyat untuk kehidupan sehari-hari semakin berat," ujarnya.

Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, inflasi yang tinggi akibat kenaikan BBM akan meningkatkan suku bunga sehingga

dunia usaha kesulitan memperoleh dana dan harga produk akan makin mahal, sementara daya beli rakyat turun.

Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo mengemukakan, angka kemiskinan diperkirakan akan bertambah sekitar 3 juta orang, jika harga BBM kembali naik tahun ini.

Keluar OPEC

Sementara itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar dari Or-

ganisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), mengingat posisi Indonesia yang saat ini telah menjadi negara pengimpor minyak.

"Dalam sidang kabinet terakhir, kita memikirkan apakah kita tetap berada di OPEC atau keluar, sambil kita meningkatkan produksi dalam negeri. Karena Indonesia saat ini tidak lagi menjadi *oil exporting country*, tapi justru menjadi *oil importing country*," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat membuka Musrenbangnas 2008 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/5).

Presiden memaparkan, produksi minyak mentah Indonesia hingga saat ini berada di bawah satu juta barel per hari, akibat sumur-sumurnya sudah mengalami *decline* dan tua. Untuk itu, Presiden berharap semua pihak bisa meningkatkan produksi minyak ke depan dengan mencari sumber-sumber baru tanpa merusak lingkungan. Harapannya, dalam dua sampai tiga tahun ke depan, Indonesia dapat meningkatkan kembali produksi minyak mentahnya.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan, rencana keluarnya Indonesia dari

keanggotaan OPEC masih akan dikaji pemerintah. Rencana itu lebih didasari pertimbangan terlalu banyaknya iuran keanggotaan, bukan karena pertimbangan kesulitan Indonesia terkait tingginya harga minyak.

Mengenai kapan Indonesia keluar dari keanggotaan OPEC, pemerintah belum memastikan waktunya. Saat ditanya Purnomo enggan menjawab. "Ini baru pembicaraan hasil rapat kabinet kemarin. Jadi akan kita kaji lagi secara cermat indikasinya," kata Purnomo. (A-130/Ant/Dtc)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Balongan Baru Tahu LPG Langka

Produksi Sudah Optimal, tak Bisa Ditingkatkan

BANDUNG, (PR).-

Meski kelangkaan elpiji 12 kg di Bandung Raya telah berjalan lebih dari satu bulan, Pertamina UP VI dan Pertamina UPMS III di Balongan Indramayu sebagai pemasok elpiji kepada stasiun pengisian dan pengangkutan *bulk* elpiji (SPPBE) di sebagian wilayah Jawa Barat dan DKI mengaku belum mengetahui masalah itu.

Hal itu terungkap ketika "PR" mengonfirmasi kondisi pasokan distribusi elpiji di Balongan kepada Kepala Humas PT Pertamina UP VI Balongan Indramayu Daryanto dan Asisten Manajer External Relations Pemasaran BBM dan Elpiji Pertamina UPMS III Susi Aria-

ni, Selasa (6/5). "Saya malah baru tahu dari Anda kalau Bandung Raya langka elpiji 12 kg," ujar Daryanto.

Ia kemudian menjelaskan bahwa sejak 26 Maret memang ada mobil tangki distribusi elpiji dari Semarang dan Yogyakarta yang mengantre di UP VI. Di sana mobil-mobil tersebut mengambil pasokan 100-200 ton per hari. Keberadaan mobil-mobil dari Semarang dan Yogyakarta tidak mengurangi jatah untuk daerah lain.

"Sedangkan kapasitas total kilang UP VI sebanyak 1.200 ton per hari. Kami sudah mematok jatah untuk Jabar 350 ton dan DKI 650 ton per hari. Nah yang mungkin membuat

pasokan terganggu adalah banyaknya mobil tangki yang antre sehingga waktu tempuh ke Area 5 jadi lama," katanya.

Sebelum 26 Maret, produksi kilang Pertamina UP VI tetap 1.000 ton per hari. Karena ada kebijakan dari Pertamina pusat yang membolehkan wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengambil jatah di balongan, jumlah produksi dimaksimalkan menjadi 1.200 ton per hari.

Dijelaskan, kilang di Pertamina UP VI Balongan berproduksi 24 jam sehari dan distribusi ke mobil tangki SPPBE pukul 6.00-24.00 WIB. Produksinya pun tidak mungkin ditingkatkan lagi karena sudah optimal. Salah satu cara menam-

bah pasokan membuat kilang baru atau melakukan impor. Akan tetapi, hanya pusat yang bisa membuat kebijakan itu.

Terkait konversi

Selain Bandung Raya, daerah lain yang mengalami kelangkaan elpiji 12 kg adalah Sumedang, Subang, Garut, dan Tasikmalaya. Wilayah itu masuk dalam distribusi Area 5 yang memperoleh jatah sekitar 305 ton per hari dari Pertamina.

Sementara itu, Susi Ariani menduga kelangkaan di Bandung Raya terjadi karena meningkatnya permintaan terkait dengan program konversi. Di sisi lain Pertamina di Balongan belum bisa menambah pasokan karena keterbatasan fasilitas.

Bahkan terjadi antrean yang menyebabkan distribusi ke SPPBE terhambat. Ia juga mengimbau kepada pelaku industri untuk tidak menambah kelangkaan dengan menggunakan elpiji 12 kg.

"Kami sedang berkoordinasi dengan Pertamina pusat untuk menyikapi peningkatan jumlah permintaan elpiji. Selain itu sedang dipikirkan pula bagaimana cara mengurangi kepadatan antrean mobil," ungkapnya. Meski demikian, dia enggan menyebutkan berapa jumlah penambahan pasokan yang diusulkan oleh Pertamina UPMS III kepada Pertamina pusat.

Seperti diberitakan sebelumnya, SPPBE Purnatarum Murni

Rahayu Jln. Soekarno-Hatta Bandung dan SPPBE Bajubang Gasindo Jln. Kerkof Cimahi mengalami penurunan pasokan 30% sejak akhir Maret. Kepala Operasional SPPBE PT Purnatarum Murni Rahayu di Jln. Soekarno-Hatta Bandung, Erwin menjelaskan dalam sehari pihaknya hanya memperoleh elpiji 65 ton.

Sementara sebelum ada antrean, Purnatarum biasa mendapat 80-90 ton per hari. Dari pasokan 65 ton per hari, rata-rata 20% harus disisihkan untuk tabung 3 kg. "Jadi bisa dibayangkan jumlah pasokan berkurang, tapi permintaan bertambah," ungkapnya. (CA-166/CA-174)***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Kenaikan Harga BBM & Rakyat

Oleh H. EDDY JUSUF

PENYESUAIAN harga BBM akan berdampak besar bagi rakyat. Terlebih pemerintah belum mengambil langkah lain dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh level 120 dolar AS per barel. Kondisi tersebut, tentunya akan menambah beban APBN 2008.

Untuk meminimalisasi tekanan terhadap APBN pemerintah tampaknya perlu menjadwalkan ulang pembayaran utang termasuk di bank rekap yang sama sekali belum disentuh.

Perkara kenaikan BBM, DPR sendiri telah memberi isyarat dan bisa mengizinkan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jika patokan *Indonesia crude price* (ICP) di atas USD 100 per barel atau kuota BBM bersubsidi di atas 37 juta kiloliter. Tentunya, isyarat tersebut sebagai langkah untuk mengamankan pelaksanaan APBN.

Sementara itu, Depkeu telah membuat kajian atas beberapa opsi untuk menyelamatkan APBN-Perubahan 2008 yang memiliki tingkat kepercayaan menurun dari pasar, di mana salah satunya adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi sebesar 28,7% pada Juni 2008. Sebagai asumsi, harga BBM jenis premium akan naik dari Rp 4.500,00 menjadi Rp 6.000,00 per liter, solar dari

Rp 4.300,00 menjadi Rp 5.500,00 per liter, dan minyak tanah dari Rp 2.000,00 menjadi Rp 2.300,00 per liter.

Melihat kecenderungan harga minyak yang terus bergolak, hendaknya pemerintah bisa mengupayakan langkah untuk menghindari kenaikan harga BBM yang disubsidi melalui berbagai cara. Namun, bila penyesuaian harga dijadikan opsi terakhir, harus ada upaya lain. Caranya dengan meminimalisasi dampaknya atau pemerintah harus bisa mencapai target produksi dan *lifting* minyak yang sangat memengaruhi sisi penerimaan APBN. Masalahnya, bila subsidi membengkak dan sisi penerimaan tidak tercapai dari *lifting*, akan timbul dampak ekonomi makro yang sangat serius.

Langkah lain yang bisa diambil pemerintah yakni menetapkan kebijakan pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan kebijakan fiskal lain yang terkait dan juga memfokuskan penghematan subsidi BBM. Sebab, ketahanan APBN menjadi taruhan manajemen ekonomi makro Indonesia, yang bukan mustahil akan ada rekor lagi yaitu perubahan APBN lebih dari satu kali dalam satu tahun anggaran.

Antisipasi pemerintah dalam menghadapi gejolak tersebut sebenarnya sudah tepat dilakukan di saat fluktuasi harga

minyak bumi dunia muncul dan pemerintah segera memperhitungkan angka rata-rata harga dalam ABPN dengan jangka waktu panjang. Apabila melihat struktur APBN 2008, sebenarnya sangat terbatas ruang gerak pemerintah dalam menangkali kondisi yang di luar perkiraan. Paling-paling dengan menaikkan sisi penerimaan atau menurunkan sisi pengeluaran. Meski peningkatan penerimaan rasanya kurang kurang realistis dalam kondisi perekonomian seperti saat ini. Peningkatan sektor pajak dan bea cukai, misalnya, akan sangat terbatas apabila pertumbuhan ekonominya berada pada kisaran 5-6%. Intensifikasi pajak berikut perbaikan administrasi mungkin bisa meningkatkan penerimaan tetapi tidak akan terlalu banyak apabila tidak diiringi.

Kebijakan pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) dalam mengantisipasi potensi gejolak ekonomi dalam negeri menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia (BI) merealisasikan melalui penyusunan landasan hukum dalam pengambilan keputusan moneter, perbankan, dan fiskal. Mungkin, salah satunya dengan membentuk *crisis management protocol* (CMP) yang berfungsi memengaruhi berbagai kebijakan yang akan diambil otoritas moneter dan fiskal jika terjadi krisis.

Sebetulnya, meski secara

resmi BBM bersubsidi belum dinaikkan, secara tidak langsung rakyat sudah merasakan imbasnya berupa kenaikan harga kebutuhan pokok yang disebabkan naiknya harga BBM industri. Oleh karena itu, pemerintah perlu diingatkan agar dalam membuat keputusan jangan hanya mengutamakan kepentingan politis. Namun harus mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk jangka panjang pemerintah seharusnya mempercepat realisasi penggunaan energi alternatif, pengganti BBM. Tujuannya untuk menutupi volume *lifting* minyak dalam negeri dan memperkecil kemungkinan langkanya BBM. Dalam konteks ini, yang dihadapi pemerintah tidak saja fluktuasi harga minyak mentah dunia, tetapi juga keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tidak seharusnya pemerintah menjadikan rakyat sebagai objek untuk penyelesaian masalah ini.

Dari sisi kekhawatiran meningkatnya inflasi akibat pengaruh penyesuaian tersebut justru timbul dari meningkatnya harga barang-barang kebutuhan pokok. Boleh jadi kenaikan harga minyak di pasaran internasional memberi tekanan yang kuat pada peningkatan harga jual barang-barang impor dalam negeri sehingga memicu tingginya inflasi di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS)

menyebutkan, laju inflasi selama bulan April 2008 mencapai 0,57%, dan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, hal tersebut akan ada tambahan inflasi lebih dari 0,75% dengan asumsi kenaikan BBM sebesar 20%. Angka inflasi ini lebih rendah dari Maret 2008 yang mencapai 0,95%. Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Maret 2008) mencapai 4,01% dan inflasi tahunan (*year on year*) sebesar 8,96%.

Walaupun, Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa Indonesia masih aman dan tahan dari guncangan krisis finansial global. Konkretnya, kreditor multilateral itu memprediksi, tahun ini pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 6,1%. Optimisme tersebut muncul karena IMF melihat permintaan domestik masih tinggi dan itulah yang membedakan Indonesia dari sejumlah negara Asia lainnya. IMF melihat itu sebagai situasi moneter yang umum terjadi di negara-negara lain di dunia. Agar momentum ini bisa terjaga, IMF memberi resep kebijakan moneter ketat melalui peningkatan suku bunga.

Terlepas dari analisis optimistis tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana pemerintah bisa percaya diri dengan sejumlah target makroekonomi yang diasumsikan.

Sekarang ini tinggal menunggu Inpres pembatasan konsumsi BBM dan energi

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Kompensasi Kenaikan BBM

Pemerintah masih punya waktu untuk merumuskan langkah yang efektif sehingga kenaikan harga BBM tidak ikut melonjakkan angka kemiskinan.

PEMERINTAH memastikan akan menaikkan harga BBM bersubsidi secara terbatas dalam waktu dekat. Keputusan itu merupakan salah satu dari tiga langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah menghadapi kenaikan harga minyak mentah dunia. Tujuannya jelas, yakni mengamankan APBN 2008-2009 dari tekanan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, besaran kenaikan kini masih dihitung. Namun, banyak yang menduga kenaikan harga nantinya sekitar 30%, dengan perkiraan pengurangan anggaran subsidi mencapai Rp 30 triliun. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merekomendasikan kenaikan harga BBM antara 20% hingga 30%. Sementara itu, berdasarkan penilaian pemerintah, kenaikan harga BBM yang pantas adalah 28,7%.

Namun berapa pun besarnya, pemerintah menjamin bahwa kenaikan itu diupayakan berada dalam jangkauan rakyat banyak dan pelaku usaha. Hanya, bercermin pada pengalaman empiris, kebijakan kenaikan harga BBM selalu memukul rakyat kecil. Apalagi, mereka sudah terpukul oleh kenaikan harga kebutuhan pokok terutama pangan akhir-akhir ini.

Oleh karena itu, kenaikan harga BBM harus diiringi dengan program kompensasi yang jelas dan terarah. Satu yang tidak bisa ditawar-tawar, pemerintah harus menyiapkan dan merealisasikan jaring pengaman sosial sehingga dapat mencegah timbulnya konsekuensi yang tidak diinginkan.

Masyarakat tentu tidak mudah melupakan keputusan pemerintah pada Oktober 2005 lalu, ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM. Sebagian besar rakyat mengecam keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM sebesar 110%. Ketika itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) Rp 300.000,00 per kepala keluarga miskin per bulan. Namun, hal itu dianggap tidak mencukupi untuk mengurangi beban masyarakat.

Faktanya, akibat yang dirasakan dari kebijakan tersebut bukan sekadar meningkatnya pengeluaran masyarakat. Kondisi ini pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat melemah dan sulit untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Kebijakan tahun 2005 tentu harus berbeda dengan kebijakan tahun 2008 ini meski substansinya sama, menaikkan harga BBM. Namun, kali ini tampaknya pemerintah mendapat dukungan, paling tidak dari wakil rakyat yang duduk di DPR maupun dunia usaha yang tergabung dalam Kadin.

Belum lagi, menurut Presiden Dana Pembangunan Asia (ADB) Haruhiko Kuroda dalam Sidang Tahunan ke-41 ADB di Madrid, Spanyol, Sabtu (3/5), Indonesia tidak sendiri merasakan dampak kenaikan tingginya harga minyak mentah dunia dan harga pangan. Negara lainnya adalah Afganistan, Bangladesh, Kamboja, Cina, India, Kirgistan, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Tajikistan, dan Vietnam. Negara yang terkena dampak paling serius adalah Bangladesh, Kamboja, Kirgistan, dan Tajikistan.

Meski demikian, itu tidak berarti persoalan yang dihadapi kita akan lebih ringan. Kendati penyebabnya merupakan fenomena yang melanda banyak negara, bagaimanapun pemerintah masih punya waktu untuk merumuskan langkah-langkah apa yang memang benar-benar efektif sehingga angka kemiskinan tidak makin melonjak.***

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Harga Minyak Dunia Lampau 120 Dolar AS

NERACA

New York - Harga berjangka minyak melewati level 120 dolar AS per barel di New York, untuk pertama kalinya Senin (Selasa WIB) setelah sebuah laporan menyebutkan terjadi penyerangan terhadap stasiun pompa minyak di Nigeria setelah akhir pekan.

Kontrak berjangka minyak mentah jenis *light sweet* melesat ke rekor 120,25 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange di tengah kekhawatiran pasokan di Nigeria setelah serangan para pemberontak, menurut kantor berita keuangan *Bloomberg*.

Juru bicara Gedung Putih Scott Stanzel mengatakan Presiden George W Bush akan mengangkat isu ini ketika ia melakukan kunjungan ke negara produsen minyak Arab Saudi, pekan depan.

Gedung Putih juga menyatakan kembali seruannya untuk meningkatkan eksplorasi minyak domestik di kawasan-kawasan seperti Alaska, yang sejauh ini telah menjadi sumber kontroversi dengan oposisi, Partai Demokrat dan kelompok-kelompok lingkungan hidup.

Stanzel mengatakan rekor harga minyak adalah "contoh lain" dari perlunya bagi AS mengurangi ketergantungannya terhadap minyak asing.

"Kami punya, di sini, di negeri ini, sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan," kata dia.

Meningkatnya harga bensin di Amerika Serikat, sebuah konsekuensi dari tingginya harga minyak, telah menjadi sebuah topik panas dalam beberapa pekan terakhir dalam kampanye pemilihan kecil presiden.

Calon dari Demokrat Hillary Clinton dan dari Republik John McCain telah menyerukan penghentian sementara pajak federal untuk bensin setelah musim panas, yang oleh rivalnya Clinton, Barack Obama, disebutnya sebagai salah satu langkah "tipu muslihat" politik.

Di London, minyak mentah jenis Brent untuk pengiriman Juni melesat ke rekor tertinggi perdagangan harian pada 118,58 dolar AS per barel, sebelum ditutup naik 3,43 dolar AS pada rekor 117,99 dolar AS.

Volume perdagangan di London cerah karena bank-bank di Inggris libur. Minyak *rally* ditutup pada sebuah rekor 120 dolar AS per barel pekan lalu di tengah kekhawatiran pasokan terkait pemogokkan pekerja di kilang minyak Skotlandia dan Nigeria.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

BBM Naik, Pemprov Sulut Akan Lakukan Penghematan

Manado - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) akan melakukan penghematan anggaran, jika nantinya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sekitar 28,7 persen dilakukan pemerintah pusat. "Langkah penghematan akan dilakukan disemua sektor, termasuk biaya BBM kendaraan operasional pejabat dan sebagainya," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemprop Sulut, Roy Tumiwa, Selasa di Manado.

Penghematan anggaran akan dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan aspek pelayanan masyarakat dan kebutuhan pembangunan lainnya.

Juru bicara Pemprop Sulut itu mengatakan, langkah penghematan akan dimulai dari jajaran pemerintah daerah sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga bisa diimplementasikan dalam praktik setiap hari.

Pemprop Sulut dan pihak legislatif sementara membahas sejumlah pergeseran anggaran yang tertata pada APBD tahun 2008, yang kemungkinan besar berdampak pada rencana kenaikan BBM sekitar 28,7 persen. "Penghematan akan dilakukan pemerintah daerah dijamin tidak akan dilakukan sama pada sektor kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya," katanya.

Anggota DPRD Sulut, James Sumendap, mendukung kebijakan pejabat daerah akan melakukan penghematan jika BBM dinaikkan, dan itu tidak sekedar *lips service* atau janji belaka. Semua anggaran yang berhubungan dengan pemborosan sebaiknya dipangkas, karena masih banyak kebutuhan penting lainnya di daerah, karena rencana kenaikan harga BBM sulit dibendung, akibat gejolak ekonomi dunia yang berdampak ke Indonesia juga. ant

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 <u>7</u> 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 10										TAHUN 2008	

SIKAP KORPORASI

Emiten Tak Risau, Kenaikan Harga BBM Tak Lebih 30 Persen

JAKARTA (Suara Karya): Sejumlah emiten tidak terlalu mempersoalkan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM, asalkan kenaikannya tidak melebihi 30 persen, karena hal ini akan berpengaruh terhadap ongkos produksi.

"Ongkos produksi tidak akan terlalu berat kalau kenaikan harga BBM hanya sekitar 30 persen. Kenaikan sebesar itu tidak akan berdampak signifikan terhadap korporasi," kata Wakil Direktur Utama PT Charoend Pokphand Tbk, Thomas Effendy, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, bagi Charoend, yang bergerak di bidang agribisnis peternakan dan pembibitan serta pakan ayam terpadu, kenaikan harga BBM tidak banyak pengaruhnya.

"Karena dalam biaya produksi perseroan tidak terlalu banyak mengguna-

kan energi BBM. Dalam berproduksi kita lebih banyak menggunakan gas alam, walaupun berpengaruh itu pada biaya transportasi saja," kata Thomas.

Di samping itu, perusahaan juga sudah melakukan terobosan dan inovasi baru untuk mengatasi sumber energi yang berasal dari BBM. "Dalam pengeringan jagung (untuk bahan pakan ternak) kami menggunakan tongkol jagung sebagai alat pembakarnya, sehingga tidak menggunakan minyak atau solar lagi. Hal ini jauh lebih hemat," ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan PT Elnusa Tbk, Heru Samodra, berharap kenaikan harga minyak dunia tidak akan terlalu tinggi, sebab hal itu akan memengaruhi biaya jasa pengeboran.

Dikatakannya, kalau biaya bahan bakar untuk pro-

duk pengeboran terlalu tinggi, tentu akan memengaruhi target laba tahun ini.

"Sebagai kontraktor jasa pengeboran migas, kita memang tidak menerima keuntungan langsung (*linier*) dari kenaikan harga minyak dunia. Justru kita harus perhitungkan biaya pengeboran (*drilling*) akibat kenaikan biaya bahan bakar," ujarnya.

Produsen nikel Indonesia PT Inco Tbk merasa kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi, karena dalam biaya produksi komponen biaya energi (BBM) lumayan besar dalam struktur biaya produksi.

Direktur Utama Inco, Arif Siregar, mengatakan, saat ini Inco sangat mengandalkan pasokan listrik dari dua PLTA di Danau Matano dan Towuti, Sulawesi, dengan daya 165 MW dan 110 MW. (Sabpri Piliang)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

POLRESTA SUKABUMI

Polisi Bongkar Penyelundup BBM

SUKABUMI (Suara Karya): Penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kota Sukabumi akhirnya berhasil dibongkar jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sukabumi. Diduga kuat BBM jenis minyak tanah yang diselundupkan itu akan digunakan untuk keperluan industri pabrik garam.

Saat ini tersangka pelaku penyelundupan BBM tersebut, ES (61), warga Kelurahan Jayaraksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, diamankan di Mapolresta Sukabumi.

Dalam setiap pekan, menurut Kasat Reskrim Polresta Sukabumi AKP Ahmad Sobari Ridwan, pelaku menyelundupkan empat drum minyak tanah (satu drum berisi 205 liter) yang dibelinya di sebuah pangkalan minyak tanah di kota ini. Pelaku menggunakan minyak tanah bersubsidi itu, jelasnya, untuk industri pabrik garam PT Marga Samudra miliknya yang berlokasi di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Perusahaan ini

beroperasi sejak 1997 lalu.

Menurut Ahmad Sobari, pelaku menyalahgunakan BBM bersubsidi sejak tahun 2001 lalu. Itu berbarengan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Aksi ilegal tersangka ES dibongkar pada Senin (5/5) dini hari di lokasi pabrik oleh Satuan Buru Sergap Polresta Sukabumi. Sejumlah barang bukti berupa empat deriken minyak tanah yang belum terpakai berhasil disita petugas.

Di hadapan petugas penyidik yang memeriksanya, pelaku mengaku membeli minyak tanah bersubsidi itu secara bertahap. Setiap drum minyak tanah pelaku membelinya seharga Rp 515 ribu. Tersangka, menurut Ahmad Sobari Ridwan, bakal dijerat dengan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas. Ia terancam hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.

(Heddi)

58

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MED JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Para Pengusaha Tunggu Kepastian

JAKARTA, (PR).-

Para pengusaha belum mengambil keputusan untuk menaikkan harga produk atau jasanya. Mereka masih menunggu pemerintah mengumumkan besaran kenaikan harga BBM secara resmi.

Demikian rangkuman pendapat yang dihimpun "PR", sehubungan dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Pendapat tersebut dihimpun dari Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Murphy Hutagalung, serta Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian (Depperin) Fauzi Aziz. Mereka dihubungi secara terpisah kemarin.

Menurut Thomas Darmawan, para pengusaha makanan dan minuman saat ini ma-



USEP USMAN NASRULLOH

ANGKUTAN kota berjejer menanti penumpang di Jln. Soekarno-Hatta, Bandung, beberapa waktu lalu. Organda menolak rencana kenaikan harga BBM bila angkutan umum tidak mendapat subsidi.*

sih menghitung kenaikan harga jual produknya bila BBM dinaikkan. "Sebelum ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM, kami sudah menjajaki kemungkinan itu," kata Thomas.

Gapmmi, kata Thomas, me-

nyambut baik rencana pemerintah menaikkan harga BBM itu. Dengan demikian, para pengusaha bisa merencanakan bisnisnya dengan mengacu pada besaran kenaikan BBM. Dukungan yang sama disampaikan Ketua Umum Apindo,

Sofjan Wanandi. Menurut dia, kenaikan harga BBM memiliki risiko paling kecil dibandingkan upaya lain untuk menambah subsidi.

"Kami bisa menerima kenaikan harga BBM sebesar 20-30 persen, asal jangan sampai 110 persen saja. Dengan kenaikan harga sebesar itu, biaya produksi tidak akan meningkat karena selama ini kami membeli bahan bakar dengan harga internasional," kata Sofjan.

Tolak

Namun, pihak Organda menolak rencana pemerintah tersebut bila angkutan umum tidak mendapat subsidi. Kenaikan harga BBM akan diikuti kenaikan biaya operasional kendaraan, sebab kontribusi BBM terhadap biaya operasi kendaraan mencapai 30 persen. "Kenaikan BBM juga akan diikuti kenaikan suku cadang dan ban, yang kontribusinya ke total biaya mencapai 10 persen. Jadi, kalau tidak ada

subsidi, kami mau pasang tarif berapa pada penyewa," kata Murphy Hutagalung.

Industri penerbangan pun kini berancang-ancang untuk menaikkan harga tiket atau pengenaan biaya bahan bakar (*fuel surcharge*) kepada para penumpangnya.

Menurut Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, biaya bahan bakar nantinya akan dikenakan di luar harga tiket. Dengan demikian, calon penumpang akan dikenakan harga tiket dan pengenaan komponen-komponen lain termasuk *fuel surcharge*.

"Contoh, harga tiket Rp 165.000,00, maka pengguna Garuda akan membayar tambahan *fuel surcharge* Rp

15.000,00 setiap satu jam penerbangan. Jadi, pengenaan *fuel surcharge* akan tergantung pada jarak dan durasi penerbangan. Sedangkan harga tiket tetap," katanya.

IKM
Nasib industri kecil dan menengah (IKM) bakal terancam oleh kenaikan BBM, terutama untuk sektor-sektor yang menggunakan solar. Namun untuk sektor-sektor pengguna minyak tanah, masih memungkinkan untuk selamat dari dampak kenaikan BBM.

"Dampak kenaikan BBM akan dirasakan siapa pun yang memakainya. Dengan tidak dinaikkannya harga minyak tanah, maka ada hara-

pan bagi IKM untuk tidak terganggu, termasuk IKM makanan. Mungkin yang terkena adalah yang memakai solar," ujar Dirjen IKM Dep-perin, Fauzi Aziz.

Depperin sendiri akan melakukan kajian khusus mengenai dampak kenaikan BBM terhadap semua sektor IKM, termasuk pengguna minyak tanah dan solar. Bila BBM jadi dinaikkan, maka yang akan bertambah adalah biaya distribusi. Namun, ia yakin untuk sektor garmen dan pangan tidak terlalu terkena dampak kenaikan BBM.

Kebutuhan pokok

Sementara itu, harga beberapa kebutuhan pokok di Bandung sudah mulai merangkak naik. Berdasarkan paman-tauan "PR" di Pasar Induk Caringin, Pasar Andir, dan

Pasar Ciroyom, terjadi kenaikan harga rata-rata Rp 500,00.

Harga daging ayam saat ini mencapai kisaran Rp 18.000,00- Rp 20.000,00/kg. Menurut Rusmini, salah seorang pedagang ayam, ia sudah sebulan menjual daging ayam dengan kisaran harga tersebut, walaupun harga di penyalur sudah naik.

Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas beras sebesar Rp 300,00 dalam seminggu terakhir. Untuk kualitas sedang, harga beras berkisar antara Rp 5.200,00- Rp 5.500,00. Menurut salah seorang pedagang, harga beras itu berlaku sejak dua hari terakhir.

Untuk beberapa komoditas, harga cenderung masih stabil meskipun dari penyalur ada kenaikan. Hal ini terjadi kare-

na pedagang tidak ingin mengambil risiko dagangannya tidak laku. Misalnya, harga daging sapi kualitas baik tetap dijual pada kisaran Rp 45.000,00-Rp 48.000,00, padahal di pemotongan harganya sudah naik Rp 1.000,00/kg.

Sementara itu, harga telur ayam dan jagung justru mengalami penurunan. Telur ayam yang dijual antara Rp 12.000,00 - Rp 13.000,00 per kilogram, cenderung menurun tipis sekitar Rp 200,00. Menurut Adang, salah seorang pedagang telur, penurunan terjadi sejak dua hari lalu. Meski begitu, pelanggan banyak yang mengeluh dan memilih membeli telur di pasar modern. "Dua hari ini harga turun, tapi tetap kurang laku," kata Adang. (A-83/A-75/A-78/A-109/CA-173/CA-170)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEL JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Harga BBM Naik, Berantas Korupsi?

Oleh : **Firdaus Baderi**
 Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Pemerintah sudah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) naik dalam waktu dekat ini. Karena itu tidak terhindarkan dampak berganda (*multiplier effect*) dari kenaikan tersebut cepat atau lambat membebani rakyat, terutama kalangan pegawai swasta, buruh pabrik, pekerja informal yang sekarang penghasilannya pas-pasan. Memang benar, jika harga BBM tidak dinaikkan maka akan membuat beban APBN semakin berat apalagi harus menanggung defisit hingga 2,5 persen. Jadi sah-sah saja tindakan pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara tersebut.

Namun di sisi lain, kebocoran keuangan negara juga disebabkan oleh perbuatan korupsi aparatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah membuktikan banyak pejabat negara maupun kalangan anggota DPR/DPRD yang kini meringkuk dalam tahanan.

Jika uang negara dikorupsi, rakyat juga menjadi korbannya karena tidak akan menikmati uang negara tersebut. Bantuan-bantuan yang mestinya disalurkan untuk kepentingan kaum miskin, malah ditilep oleh koruptor sehingga 38 juta rakyat miskin tidak akan mendapatkan bantuan yang jelas dari pemerintah.

Persoalannya sekarang, masih banyak pejabat negara yang belum tertangkap tangan oleh KPK alias masih berkeliaran bebas. Tidak dapat disangkal, praktik korupsi di Indonesia sudah menggurita di berbagai bidang, baik pemerintah maupun swasta. Selain sudah membudaya, korupsi nampaknya sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantasnya.

Selama ini, perbuatan korupsi diidentikkan dengan penyalahgunaan uang atau mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Ini baru satu varian bentuk korupsi. Padahal, sebenarnya, banyak sekali jenis korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi ilmu pengetahuan, suap, hadiah, pemerasan, pungli, *mark up*, transaksi rahasia, penggelapan, mengkhianati amanah, melanggar sumpah jabatan, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara seperti perjalanan dinas fiktif dan lain-lain.

Bagi sebuah negara, dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat besar. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan ada pihak lain —entah perorangan atau kelompok— yang akan menanggung kerugian akibat perbuatan korupsi tersebut. Yang paling jelas, salah satu akibat perbuatan korupsi tersebut adalah kemiskinan.

Kalimat paling ringkas untuk menjelaskan persoalan ini adalah: "Jika uang negara dikorupsi, maka rakyat tidak akan menikmati uang negara tersebut".

Mereka yang mendapatkan akses korupsi akan makin kaya, sedangkan masyarakat miskin di bawah akan kesulitan mencari makanan. Koruptor akan berhura-hura dengan berbagai kemewahannya, sedangkan rakyat dibuat makin sengsara olehnya. Sebuah anggaran untuk proyek tertentu bisa berkualitas jelek, ketika anggarannya ada yang disunat alias dikorupsi. Kalau sudah begini, siapa lagi yang rugi kalau bukan rakyat. Rakyat makin miskin, karena dana untuk mereka dikorup orang lain.

Korupsi yang dilakukan siapapun akan memperparah jurang pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Selain itu, korupsi juga akan menurunkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun ketika sebuah negara berhasil memberantas korupsi, bisa dilihat dari indikator makin menguatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, mudahnya akses pendidikan dan kesehatan bagi rakyat, dan menurunnya angka kemiskinan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

BBM Naik Maksimal 30 Persen, Dana Subsidi Hemat Rp 35 T

NERACA
Kamsari/Sandy R

Jakarta - Pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tak lebih dari 30 persen. Dengan kenaikan ini maka pemerintah bisa menghemat dana subsidi sebesar Rp 35 triliun.

"Kita sekarang sedang kaji kenaikan BBM sebesar 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. Kalau kenaikannya 30 persen, akan dapat dana dari penurunan subsidi BBM sebesar Rp35 triliun," jelas Menneq PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta disela pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2008 di Jakarta, Selasa (6/5).

Paskah menambahkan, pemerintah tetap menggunakan basis data kemiskinan BPS untuk kenaikan harga BBM pada 2005, yaitu 19,1 juta rumah tangga miskin (RTM).

"Kalau kenaikannya 30 persen, maka digunakan basis data BLT 2005," katanya. Artinya tiap RTM akan menerima Rp100 ribu perbulan selama setahun.

Sedangkan BLT plus bagi masyarakat miskin, pemerintah akan memberikan tambahan berupa bahan makanan,

di luar skema raskin.

Menurut Paskah, dalam dua pekan ini pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan BLT plus hingga penyaluran BLT bisa berbarengan dengan kenaikan BBM yang diharapkan paling lambat awal Juni 2008. Agar BLT plus ini tepat sasaran, Paskah mengatakan pihaknya kini mengkaji data-data penerima BLT, karena adanya penurunan prosentase penduduk miskin setelah BLT 2005 dari 17,75 persen menjadi 16,75 persen, kemungkinan ada penurunan penerima BLT plus.

Menkeu Sri Mulyani memastikan harga BBM akan naik pada awal Juni 2008 sebagai opsi terakhir yang diambil pemerintah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menko Kesra dan Mensos untuk mengantisipasi dampak tersebut dan mengurangi gejala di masyarakat," ujarnya di hadapan sejumlah pimpinan media di Graha Niaga, Selasa malam (6/5)

Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan data BLT (bantuan langsung tunai) untuk masyarakat miskin berdasarkan database 2005 yaitu 19,1 juta orang, untuk mengantisipasi dam-

pak kenaikan BBM tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR, Dradjad Wibowo menegaskan, kenaikan harga BBM berdampak meningkat jumlah rakyat miskin sekitar 3 juta orang. "Kalau harga BBM naik 30 persen, dengan melihat kondisi sekarang angka kemiskinan akan bertambah sekitar 3 jutaan," ujarnya.

Menurut survei Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2007 sebesar 37,17 juta atau 16,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Drajad menyebut, Pemerintah berpikiran terlalu sempit dengan menaikkan harga BBM karena hanya mempertimbangkan dampak kenaikan harga minyak terhadap anggaran APBN.

Sebenarnya, kata Drajad, pemerintah punya tiga opsi untuk meredam pembengkakan subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia yang sudah menembus 120 Dolar AS per barel.

Ketiga opsi itu adalah, pertama pengenaan pajak dan cukai yang progresif untuk sektor minyak. Jika harga minyak mengalami kenaikan

DAMPAK DARI KEBIJAKAN KENAIKAN BBM

Parameter	Tahun	Subsidi terbatas	Kenaikan harga BBM
Inflasi	2008	13,2%	11,1%
Pertumbuhan ekonomi	2008	5,8%	6,0%
Nilai tukar	2008	9.600	9.000
Yield SUN	2008	15%	12%
Defisit APBN	2008	2,5%	1,9%

DATA KENAIKAN HARGA BBM PER 1 JUNI 2008

Jenis	Harga		SUBSIDI BBM APBN (TRILIUN RP)
	Eceran (Rp/lit)	Harga Eceran Baru (Rp/lit)	
Bahan Bakar	4.500	6.000	2003 30,04
Premium	4.300	5.500	2004 63,1
Solar	2.000	2.300	2005 59,2
Minyak Tanah			2006 52,2
			2007 61,8

Sumber: Tim Riset NERACA

"Kalau harga BBM naik 30 persen, dengan melihat kondisi sekarang angka kemiskinan akan bertambah sekitar 3 jutaan."

maka pajaknya akan meningkat. Pengenaan pajak progresif sebenarnya berbeda dengan pengenaan *windfall* pajak yang sifatnya muncul ketika harga minyak naik.

Besaran pajak progresif akan berubah. Jika harga minyak turun, pajak minyak turun. Jika harga minyak naik pajaknya naik pula.

Opsi kedua adalah pemerintah memotong anggaran kementerian dan lembaga hingga 20 persen. Pemotongan anggaran kementerian dan lembaga akhirnya disepakati 10 persen setelah diprotes sejumlah kementerian dan lembaga. *Opsi ketiga* adalah renegosiasi pembayaran utang luar negeri. Penghematan dari pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri sekitar 1-10 miliar Dolar AS. Pemerintah bisa berhemat dalam kegiatan ekspor dan impor BBM, yakni memangkas rente-rente distribusi yang menambah biaya.

01

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Menyikapi Kenaikan Harga BBM

Pemerintah akhirnya bersiap untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Bola kenaikan harga BBM itu telah menggelinding. Bocoran kenaikan harga BBM juga sudah beredar di masyarakat. Bahkan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun mengusulkan agar pemerintah

menaikkan harga BBM sekitar 30%. Sementara itu, Wapres Jusuf Kala pun sudah membicarakan opsi kenaikan harga BBM rata-rata sebesar 27,5%.

Dengan kenaikan harga BBM ini, pemerintah sebenarnya juga bisa menggenjot penerimaan negara dengan meningkatkan produksi minyak yang harganya tengah *booming*. Artinya, kenaikan harga BBM sangat berpeluang meningkatkan pe-

nerimaan negara sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat bangsa ini. Bagaimana kita bisa menyejahterakan rakyat bangsa ini jika kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki untuk menjadi "uang".

Di sisi lain, dengan kenaikan harga BBM ini, masyarakat dan seluruh industri serta seluruh instansi, baik swasta maupun negeri, hendaknya melakukan

penghematan besar-besaran. Ini penting agar kita semakin menyadari bahwa BBM adalah sumber daya di mana suatu saat akan habis juga. Janganlah kita suka memboroskan sumber energi hanya untuk keperluan yang justru tidak mendatangkan uang.

Karena itu, menyikapi kenaikan harga BBM ini, sudah bukan saatnya lagi kita sambut dengan keluh kesah, derita, dan air mata. Apalagi caci-maki dan

sumpah serapah. Inilah saatnya kita kencangkan ikat pinggang. Berhemat sehemat-hematnya. Sebagai orang kecil, kita tentu sudah terbiasa menderita. Bahkan, BBM belum naik pun kita sudah menderita. Makanya, naik tidaknya BBM tidak berpengaruh terhadap nasib si miskin.

Jadi, daripada sama-sama menderita, lebih baik pemerintah naikkan harga BBM setinggi-

tingginya, disesuaikan harga pasar dunia. Biar para mafia BBM kelimpungan. Jangan pikirkan kami rakyat kecil, karena kami sudah kebal terhadap berbagai penderitaan. Kami rela menderita demi tetap tegaknya bangsa dan negara. Demi kejayaan Indonesia.

Rosi Sugiharto
Pondok TK AL Firdaus
Jatisari BSB
Mijen, Semarang

65

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF											
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : 7										TAHUN 2008	

KENAIKAN HARGA BBM

Gelombang PHK Ancam Industri Manufaktur

JAKARTA (Suara Karya): Gelombang penutupan hubungan kerja (PHK) secara massal mengintai industri manufaktur seiring dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setelah kenaikan harga bahan baku dan BBM khusus industri akibat gejolak harga minyak dunia, kini sektor manufaktur juga harus menghadapi peningkatan biaya transportasi dan biaya produksi lainnya.

Industri manufaktur nasional akan dihantui ancaman penurunan kinerja produksi jika kenaikan harga BBM bersubsidi mencapai 28,7 persen. Dalam hal ini, sektor industri padat karya, seperti tekstil, sepatu serta makanan dan minuman, diperkirakan akan terkena dampak yang paling berat.

Oleh karena itu, Kadin Indonesia mengusulkan insentif fiskal berupa penundaan pembayaran pajak penghasilan (PPh) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Kadin Indonesia menilai, industri padat karya akan mengalami guncangan berat selama enam bulan setelah ke-

naikan harga BBM bersubsidi itu.

Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat menjelaskan, seluruh sektor industri manufaktur, apalagi padat karya, akan terkena dampak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, margin keuntungan akan mencapai titik terendah menyusul pelemahan daya beli masyarakat serta peningkatan biaya produksi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan kompensasi yang tepat untuk sektor ini. "Jangan sampai manufaktur bangkrut, sehingga *lay off* (PHK) besar-besaran," kata Hidayat usai menghadiri musyawarah rencana pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Hidayat, selama ini, industri manufaktur sudah disulitkan dengan perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang memicu penurunan ekspor. "Tidak ada jalan lain.

Di samping pemberian insentif seperti penundaan PPh, pemerintah perlu merealisasikan janji pemangkasan biaya birokrasi dan ekonomi biaya tinggi lainnya," tuturnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan masalah seperti yang sudah terjadi di akhir 2005. Namun, masalah yang terjadi tidak akan seburuk saat itu. "Memang akan ada penyesuaian, tapi tidak akan lama. Kan sudah ada pengalaman sebelumnya. Saat kenaikan harga BBM bersubsidi hingga 100 persen, pada tidak mati tuh (industri padat karya)," kata Fahmi.

Menurut dia, industri manufaktur nasional akan mencapai titik keseimbangan (equilibrium) baru dalam produksi dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi. Tekanan berat yang diderita industri manufaktur, diper-

kirakan terjadi selama empat bulan setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Apalagi pemerintah akan memberikan insentif sebagai kompensasi kebijakan tersebut. "Otomatis ada insentif. Macam-macam, kan udah ada di PP Nomor 1 Tahun 2007 yang terus disempurnakan," ujar Fahmi.

UKM

Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan mampu beradaptasi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. "UMKM sebenarnya merupakan komunitas pengusaha yang paling kenyal dan paling bisa beradaptasi," kata Suryadharma Ali.

Menurut dia, ketangguhan dan adaptasi UMKM telah dibuktikan saat krisis moneter pada 1997. Saat itu justru UMKM yang mampu menjadi penopang perekonomian di

Tanah Air. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait nasib UMKM di tengah kepastian naiknya harga BBM bersubsidi.

"Kenaikan harga BBM harus dilihat secara komprehensif, terutama melihat kondisi keuangan negara yang tertekan sangat berat oleh gejolak harga minyak mentah dunia. Itu harus dilihat secara komprehensif. Kita tetap harus lihat kondisi keuangan kita yang tertekan oleh gejolak harga BBM dunia," katanya.

Namun demikian, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Depperin Fauzi Aziz mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi secara otomatis akan berdampak terhadap UMKM di sektor produktif. Ini karena mereka selama ini mengandalkan minyak tanah, bensin, maupun solar. Belum lagi masalah biaya transportasi dan distribusi yang meningkat. "Kami akan melakukan peninjauan lang-

sung ke lokasi IKM (industri kecil dan menengah) yang menggunakan bahan bakar solar seperti pada produsen batu bata di Jateng dan pengecoran logam, serta industri pembuatan suku cadang di pesisir selatan Sumbar. Demikian juga industri pembuatan sarung di Pekalongan yang mengalami kesulitan akibat naiknya harga beberapa jenis bahan baku," ujar Fauzi.

Menurut dia, kenaikan biaya transportasi dan distribusi sebesar 10 persen akibat kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan akan membuat beban IKM semakin berat. Apalagi selama ini IKM hanya mempunyai skala produksi yang kecil dan margin keuntungan terbatas. "Pemerintah memang seharusnya juga memberikan bantuan bagi IKM atau UMKM secara umum agar bisa melakukan penyesuaian. Seharusnya bunga kredit bisa diturunkan ya, maksimal 10 persen per tahun. Selain itu, rencana pengenaan pajak bagi UMKM juga harus ditunda, karena mereka sedang mengalami kesulitan," tutur Fauzi. (Andrian)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Pertamina Perbaiki Sumur Gas Indramayu

INDRAMAYU, (PR).-

Pertamina EP Region Jawa memastikan Sumur Gas Existing (SGE) 192 Jatibarang di Desa Dukuh Jeruk, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, akan diperbaiki dalam dua hari ke depan. Langkah itu diambil untuk menghindari semakin meluasnya semburan lumpur dan gas yang diprediksi akibat adanya kebocoran di instalasi SGE tersebut.

Selain memperbaiki SGE, Pertamina juga akan memberikan kompensasi sosial kepada warga yang areal sawahnya ditemukan semburan lumpur dan gas. Kepala Humas Layanan Operasi Field Jatibarang Pertamina EP Region Jawa, Sunyoto menegaskan hal itu, Selasa (6/5) se-sai meninjau lokasi semburan lumpur dan gas di Desa Dukuh Jeruk.

Meski berdalih sumber semburan lumpur dan gas belum bisa dipastikan berasal dari instalasi SGE 192 Jatibarang, kata Sunyoto, namun Pertamina EP Region Jawa tetap akan melakukan perbaikan. "Langkah tersebut, juga untuk bisa memastikan apakah SGE mengalami kebocoran yang mengakibatkan mun-

culnya semburan liar berupa gas dan lumpur," ujarnya.

Untuk itu, dalam upaya mengatasi munculnya fenomena tersebut, peristiwa itu akan diselidiki oleh tim teknis yang dibentuk secara khusus. Tim teknis Pertamina akan meneliti alur semburan gas liar, sehingga akan bisa menemukan titik awal semburan gas dan lumpur itu. Di samping itu, semburan gas akan dilokalisasi dengan pola penyedotan agar tidak menyebar lebih luas.

Dikatakannya, berdasarkan hasil inventarisasi tim teknis Pertamina EP Region Jawa, terdapat enam titik atau kubangan semburan gas yang cukup besar. Titik-titik semburan dengan skala besar tersebut, nantinya akan dipasangi *police line* oleh kepolisian untuk menjaga keamanan petani dan warga setempat.

Berdasarkan penelitian sementara, semburan gas yang muncul di persawahan tersebut, merupakan gas natural dan bukan merupakan gas metan yang beracun. "Tekanan gasnya pun cukup rendah dan tidak sebesar seperti yang ada di Muara Enim dan Sidoarjo," katanya. (A-96)***

67

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Lagi, Penyelundupan BBM Berhasil Digagalkan Polisi

Pelaku dan Ribuan Liter Minyak Tanah Diamankan

PURWAKARTA, (PR).

Jajaran Polres Purwakarta kembali berhasil menggagalkan penyelundupan dan penimbunan ribuan liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah, Senin (5/5) malam, di dua tempat berbeda. Dalam kasus tersebut, petugas mengamankan empat tersangka berikut ratusan jeriken dan kendaraan pengangkut.

Kapolres Purwakarta AKBP Sufyan Syarif didampingi Kasatreskrim AKP Iwan R.S., Selasa (6/5), mengatakan penangkapan berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah kendaraan Suzuki pikap yang membawa barang dalam keadaan tertutup yang ditumpangi tiga awak, yaitu UBJ (40), KBH

(35), dan US (28), semuanya warga Purwakarta.

Berbekal dari kecurigaan tersebut, petugas kemudian memberhentikan Suzuki pikap nopol B 9061 VX warna biru tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata mobil tersebut mengangkut 38 jeriken ukuran 20 dan 30 liter yang berisi minyak tanah. "Setelah dihitung, 38 jeriken itu berisi kurang lebih 733 liter minyak tanah yang akan dijual ke luar Purwakarta," kata AKP Iwan.

Minyak tanah yang berada di dalam mobil pikap tersebut dibeli dari sejumlah pengecer di Purwakarta seharga Rp 2.000,00 hingga Rp 2.300,00/liter dan rencananya akan dijual ke daerah

Bekasi dengan harga Rp 5.000,00 hingga Rp 6.000,00/liter.

Tangkap penimbun

Di tempat berbeda, jajaran Polres Purwakarta juga menangkap satu orang pelaku yang diperkirakan sebagai penimbun minyak tanah di Kampung Sukarapih Desa Sawit Kec. Darangdan. Dari lokasi penimbunan tersebut polisi mengamankan 1 drum yang berisi 225 liter minyak tanah, 40 jeriken isi 30 liter, dan 22 jeriken isi 20 liter.

Berdasarkan catatan yang diperoleh "PR", selama kurun waktu 5 bulan terakhir ini, jajaran Polres Purwakarta berhasil mengamankan sekitar 7,8 ton BBM bersubsidi jenis minyak tanah dan solar dari

sejumlah tempat berbeda di Purwakarta. Selain itu, polisi juga mengamankan 12 tersangka yang diperkirakan sebagai penimbun dan pemilik bahan bakar.

Kapolres AKBP Sufyan Syarif dan Kasatreskrim Polres Purwakarta Iwan R.S. menambahkan operasi BBM bersubsidi akan terus dilakukannya dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah. "Pokoknya operasi penindakan terhadap para pelaku BBM bersubsidi ini akan terus dilakukannya demi terciptanya ketenteraman di masyarakat, misalnya terjadinya kelangkaan minyak tanah dan sebagainya," kata AKBP Sufyan Syarif. (A-86)***

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

KENAIKAN HARGA BBM

Agung: Konsultasikan dengan DPR

JAKARTA (Suara Karya): Ketua DPR HR Agung Laksono mengatakan, meski kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi domain pemerintah, namun sebaiknya pemerintah tetap mengonsultasikannya dengan DPR.

"Memang domain pemerintah, tapi secara etika sebaiknya dikonsultasikan dengan DPR karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak," kata Agung Laksono kepada wartawan usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan pimpinan komisi, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/5). Rapat konsultasi itu untuk membahas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Agung Laksono, sebenarnya DPR menyanggkan kebijakan pemerintah jika benar-benar menaikkan harga BBM. Sebab, pemerintah pernah mengatakan memiliki sepuluh alternatif dalam menyikapi melambungnya harga minyak dunia.

"Tapi alternatifnya apa, sebenarnya kita juga tidak tahu. Kita

cuma mempertanyakan kenapa kok pemerintah sekarang berencana menaikkan harga BBM," katanya lagi.

Ketika ditanya apakah secara institusi DPR akan menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, Agung

**Sebenarnya DPR
menyanggkan ke-
bijakan pemerintah
jika benar-benar
menaikkan harga
BBM.**

**HR Agung Laksono
Ketua DPR**

Laksono menyatakan hal itu sepenuhnya menjadi keputusan fraksi-fraksi di DPR.

"Saya tidak dalam posisi untuk menyampaikan hal itu, fraksi-fraksilah yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna DPR," ujarnya.

Agung Laksono mengingatkan, bila pemerintah merealisasikan kenaikan harga BBM, maka pemerintah harus bisa menjamin kompensasi subsidi kepada masyarakat miskin tepat sasaran.

"Pengalaman yang sudah-sudah menunjukkan, kompensasi langsung kepada masyarakat tidak efektif. Malah muncul kekisruhan di sana-sini," katanya.

Untuk itulah, menurut Agung, pemerintah sebaiknya berkonsultasi dengan DPR. Selain membahas soal kenaikan harga BBM dan besaran harganya, juga mendiskusikan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampaknya di masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto berpendapat, langkah pemerintah menaikkan harga BBM harus dikaji secara cermat. Meski, ia mengakui kebijakan menaikkan harga BBM memang tidak bisa dihidari lagi. Apalagi, subsidi yang digulirkan pemerintah untuk BBM sudah mencapai Rp 260 triliun per tahun.

Dito juga berpendapat, untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM, pemerintah tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR. Hal ini sesuai dengan UU APBNP Pasal 14 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jika terjadi kenaikan harga minyak dunia yang signifikan, pemerintah bisa mengambil satu tindakan untuk mengatasi hal tersebut.

Hanya saja, menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi ini, untuk mengantisi-

pasi gejolak sosial di tengah masyarakat akibat naiknya harga BBM, pemerintah harus menyiapkan solusinya.

"Menurut saya, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) dan JPS (jaringan pengaman sosial) harus disiapkan untuk mengantisipasi naiknya harga barang dan melemahnya kondisi ekonomi masyarakat," ujar Dito.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PPP Achmad Ferial juga menyatakan setuju dengan kenaikan harga BBM. Karena, jika BBM tidak dinaikkan, berarti pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp 4.000 per liter kepada pembeli premium.

Untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial, kata Ferial, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memahami kenapa BBM naik. Di samping itu, pemerintah

"Untuk mengantisipasi melonjaknya harga minyak mentah, pemerintah harus mencari jalan keluar yang tepat, bukan menaikkan harga BBM."

Effendi Simbolon
Anggota Komisi VII DPR

juga harus menyiapkan antisipasinya agar masyarakat tidak terbebani dan hidup mereka tidak semakin sulit.

Sementara anggota Komisi VII dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, fraksinya tetap konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM. Sebab, jika pemerintah menaik-

kan harga BBM, rakyat akan menderita, apalagi kondisi ekonomi rakyat juga tak baik.

"Fraksi PDIP tidak sependapat dengan rencana kenaikan harga BBM, karena hal ini akan menyengsarakan rakyat. Untuk mengantisipasi melonjaknya harga minyak mentah, pemerintah harus mencari jalan keluar yang tepat, bukan menaikkan harga BBM," ujarnya.

Ia membantah anggapan sementara pihak yang mengatakan jika BBM tidak dinaikkan roda ekonomi tidak akan berputar. "Analisis itu tidak benar. Kami minta sebelum menaikkan harga BBM hendaknya Presiden mengendalikan langsung distribusi bahan bakar, listrik, dan lainnya. Hugo Cavez pun mengendalikan langsung distribusi bahan bakar dan listrik agar tidak terjadi penyimpangan," kata Effendi.

(Rully/Kartoyo DS)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR M JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

Harga BBM versus Subsidi BBM

Harry Azhar Azis

Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI



Kenaikan harga BBM dunia' mendekati 125 dolar AS per barel menekan lagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2008, yang disepakati pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna DPR 10 April lalu. Asumsi harga BBM pada APBNP 2008 menjadi 95 dolar AS/barel dibanding 60 dolar AS/barel pada APBN 2008 yang disahkan Oktober 2007.

Kenaikan asumsi harga BBM sebesar 35 dolar AS/barel itu menambah pendapatan negara Rp 113,5 triliun, dari Rp 781,4 triliun menjadi Rp 894,9 triliun. Tetapi, belanja negara bertambah Rp 134,9 triliun, dari Rp 854,6 triliun menjadi Rp 898,5 triliun, sehingga defisit anggaran menjadi Rp 21,4 triliun (2,1% dari 1,7% terhadap PDB).

Tambahan defisit ini terutama disebabkan membengkaknya subsidi BBM/listrik dari Rp 75,6 triliun menjadi Rp Rp 187,1 triliun atau meningkat Rp 111,5 triliun. Sementara subsidi nonenergi meningkat dari Rp 22,3 triliun menjadi Rp 47,3 triliun, sehingga total subsidi menjadi Rp 234,4 triliun (dari sebelumnya Rp 97,9 triliun). Dengan pola kebijakan ini, setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS/barel menambah pendapatan Rp 3,3 triliun dan subsidi sebesar Rp 6,7 triliun. Artinya, kenaikan 1 dolar AS/barel asumsi harga BBM membuat subsidi menjadi dua kali bertambah lebih besar dibanding pendapatan negara.

Apakah kenaikan harga BBM dunia ini membuat APBNP 2008 perlu diubah lagi seperti kasus APBN 2008? Pemerintah tentu dituntut memahami sinyal perubahan harga ril (bukan harga asumsi) BBM, dan mengambil kebijakan cermat serta memahami implikasinya. Pasal 14 ayat 2 UU APBNP 2008 menjelaskan, "dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibanding asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan di bidang subsidi BBM dan/atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBNP 2008." Pasal itu juga menjelaskan, perubahan signifikan adalah bila harga rata-rata/tahun minyak Indonesia (ICP) di atas 100 dolar AS/barel dan langkah kebijakan adalah kontrol volume BBM bersubsidi, harga BBM bersubsidi dan/atau kebijakan fiskal lainnya.

Empat skenario opsi kebijakan adalah menaikkan *lifting* minyak di atas 927.000 barel/hari, memperbesar defisit menjadi 2,5% (tambahan Rp 20 triliun), menyetop BBM bersubsidi di batas 35,5 juta kiloliter/tahun (hemat Rp 4,1 triliun), dan/atau menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar rata-rata 20%-30% (hemat Rp 20 triliun-Rp 25 triliun).

Bila tidak melakukan sesuatu kebijakan, inflasi bisa mencapai 13,2% (APBNP 2008 6,5%) dan angka kemiskinan mencapai 19,5% (target Bappenas 14%). Apa pun kebijakannya, pemerintah wajib menurunkan angka kemiskinan di bawah 14% dan pengangguran di bawah 8%. Karena tidak ada anggaran tambahan untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran--akibat kenaikan harga-harga--pemerintah tetap fokus mencapai target-target fiskal, menjaga stabilitas makro ekonomi dan memperbaiki level kesejahteraan rakyat. Akhirnya, marilah kita terus berdoa dan mengawasi pemerintah agar dapat mengambil

70

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 25

TAHUN 2008

Dampak Kenaikan Harga BBM Hanya Sesaat

Oleh **Antique Sulaeman**

► **JAKARTA** – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya akan menimbulkan dampak sesaat bagi penjualan properti segmen menengah-bawah. Lonjakan permintaan potensial terjadi pada produk residensial di perkotaan untuk efisiensi biaya transportasi.

Corporate Secretary PT Bakrieland Development Tbk Nuzirman Nurdin mengatakan, pengembang properti yang menasar segmen menengah-bawah akan terkena dampak sesaat dari kenaikan harga BBM. Pada bulan-bulan awal pascakenaikan harga BBM, akan terjadi banyak penundaan pembelian properti.

“Secara teori, kenaikan harga BBM pasti berdampak. Namun, berdasarkan pengalaman Bakrieland, dampaknya tidak akan berlangsung lama dan tidak signifikan. Permintaan terhadap hunian

masih besar. Kenaikan harga BBM justru berpotensi meningkatkan permintaan hunian, terutama properti perkotaan. Masyarakat akan cenderung mencari hunian yang dekat dengan kantornya,” tutur Nuzirman saat dihubungi *Investor Daily*, di Jakarta, Selasa (6/5).

Senada, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) F Teguh Satria menilai, kenaikan harga BBM merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah, meskipun berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Dampaknya, akan terjadi penurunan penjualan properti segmen menengah ke bawah, terutama yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hanya properti segmen atas yang penjualannya tidak akan banyak terpengaruh dengan kenaikan harga BBM.

“Pada segmen menengah akan terjadi penundaan pembelian sementara, kecuali rumah susun sederhana milik bersubsidi di perkotaan. Sedangkan pada segmen bawah akan lebih buruk dampaknya,” kata Teguh.

Akan halnya kemungkinan harga rusunami juga ikut naik, menurut Teguh, baru akan ditentukan setelah mengalkulasi perkembangan harga material hingga September 2008.

Menurut Nuzirman, masyarakat kelas menengah-atas yang bekerja di Jakarta akan cenderung membeli apartemen daripada rumah horizontal di wilayah kota penyangga ibu kota.

Direktur PT Sentul City Tbk Harie Ganie menambahkan, pasar properti segmen menengah ke atas masih tetap bergairah. Keyakinan itu didu-

kung oleh pergeseran gaya hidup masyarakat di segmen ini.

“Saat ini ada pergeseran pasar untuk apartemen mewah, yang pada awalnya sebagian besar dibeli oleh investor, sekarang bisa dibbilang proporsi antara investor dan *user* adalah 50:50,” kata Harie memperjelas.

Apartemen di perkotaan, baik kelas menengah atas maupun rumah susun sederhana, akan menjadi pilihan masyarakat untuk lebih mendekatkan diri dengan tempat kerjanya dan mendukung efisiensi konsumsi BBM.

Yang tak banyak punya pilihan untuk menyalasi dampak kenaikan harga BBM, menurut Harie adalah kalangan MBR. Kondisi ini, menurut dia, akan menghambat realisasi pembangunan rumah sederhana sehat (RSH).

Sementara itu, Direktur Pemasaran Perum Perumnas Teddy Robinson mengatakan, pihaknya belum berencana untuk menaikkan harga jual RSH.

“Memang, harga bahan bangunan terus melonjak. Namun, harga yang ditetapkan saat ini masih ‘masuk’ hitungan bisnis,” jelasnya. (c120)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2008

BBM

Inflasi Melonjak, Harga Komoditas Lain Naik

JAKARTA (Suara Karya): Inflasi bulan Mei 2008 diperkirakan melonjak, sebagai respons atas pengumuman pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Percepatan laju inflasi diperkirakan berlanjut begitu harga baru BBM bersubsidi diberlakukan 1 Juni 2008.

Demikian prediksi Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika, anggota Komisi VII DPR Dito

Ganinduto, dan Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Selasa (6/5) kemarin.

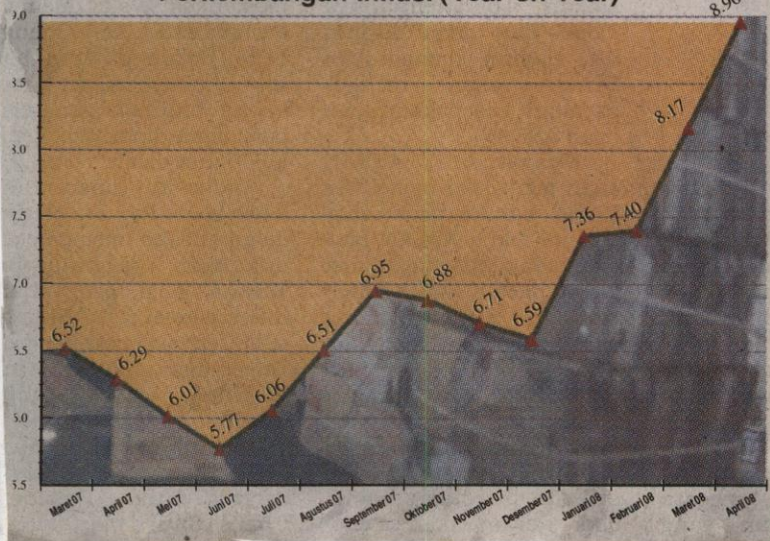
Untuk memperkecil eksensnya bagi masyarakat, mereka minta pemerintah mewaspada

spekulasi di pasar. Jika spekulasi dibiarkan, dapat memicu inflasi. Untuk meredam kemungkinan buruk itu, pemerintah sebaiknya segera memberlakukan harga baru BBM bersubsidi.

Pemerintah menyatakan, harga baru BBM bersubsidi diberlakukan setelah program kompensasi untuk masyarakat selesai dirumuskan. Kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan mencapai 30 persen. Maka, harga bensin premium menjadi Rp 6.000 per liter dari Rp 4.500 per liter, dan solar menjadi Rp 5.600 per liter dari Rp 4.200 per liter.

Pri Agung Rakhmanto menilai, pengumuman pemerintah yang memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan memicu spekulasi di pasar. Tidak hanya penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan SPBU atau pembelian dalam jumlah besar-besaran (*rush*) oleh para spekulan, harga komoditas lainnya juga berpotensi naik akibat spekulasi. Para spekulan akan menahan stok dan menimbun berbagai komoditas untuk menjualnya kembali di saat harga baru BBM bersubsidi diberlakukan.

Perkembangan Inflasi (Year on Year)



"R^{ush} tidak hanya terjadi terhadap BBM, tetapi juga pada berbagai kebutuhan pokok dan komoditas lainnya, termasuk barang untuk proses produksi. Ini pasti memicu inflasi. Dampak rencana kenaikan harga BBM ini harus diperhatikan," kata Pri Agung.

Mestinya, dia menambahkan, pemerintah memberi penjelasan lebih lanjut tentang besaran kenaikan dan waktu pelaksanaannya. Ini dilakukan untuk meredam spekulasi. Karena itu, kenaikan harga BBM bersubsidi jangan ditunda-tunda karena akan menimbulkan ketidakpastian di masyarakat.

"Tidak bijaksana bila sudah menyampaikan kenaikan tapi kapan diterapkannya tidak jelas, malah ditunda-tunda. Ini menambah persoalan baru dan mendorong terjadinya kekawatiran yang berlebihan di tengah masyarakat," ujar dia.

Ahmad Erani Yustika mengatakan, ekspektasi lonjakan inflasi akibat ketidakjelasan waktu dan besaran kenaikan harga BBM sangat beralasan. Masalah ini terjadi akibat pemerintah mengisyaratkan keragu-raguan, meski memastikan akan menaikkan harga BBM.

"Saat ini, kebijakan apapun silakan diambil pemerintah, asalkan cepat dilaksanakan. Kalau tidak, spekulasi akan menyebabkan inflasi yang tinggi dan akan terjadi dalam waktu lama. Kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah, jelas berisiko. Sehingga, pemerintah diharap-

kan tidak ragu-ragu, asalkan demi kepentingan negara," tutur Ahmad Erani.

Sedangkan Dito Ganinduto mengatakan, jika pemerintah berniat menaikkan harga BBM bersubsidi, seharusnya dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan. Sebab, gaung kenaikan itu akan memicu kenaikan harga komoditas lainnya, termasuk biaya transportasi.

Menurut Dito, jika pemerintah menaikkan harga BBM dalam satu dua hari ke depan, lonjakan inflasi dan penimbunan bisa dihindari. Sebab, pasar sudah mendapat kepastian.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia MS Hidayat menyarankan agar kenaikan harga BBM dilakukan sekaligus 30 persen untuk memberi kepastian. "Saya sarankan sekaligus. Kira-kira 30 persen. Jadi kita punya kepastian," kata Hidayat.

Meski menjalani masa sulit, pengusaha bisa langsung membuat kalkulasi baru jika kenaikan harga BBM dipastikan.

Kadin Indonesia sendiri berharap pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan ini. "Tetap ada pengaruh pada inflasi (akibat kenaikan BBM). Makin cepat makin baik. Pengumuman kenaikan harga BBM dengan besaran dan waktu yang jelas akan langsung menghapuskan spekulasi di pasar. Spekulasilah yang menyebabkan kenaikan harga," katanya.

Terkait potensi lonjakan inflasi, Menko Perekonomian Boediono menolak anggapan

bahwa ketidakpastian pemerintah dalam menentukan kapan dan besaran kenaikan harga BBM akan mendorong tekanan inflasi bulan Mei. "Tidak ada itu. Kondisi ini sudah diperkirakan oleh pasar bahwa akan ada kenaikan BBM bersubsidi," kata Boediono.

Dia menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan jika persiapan program kompensasi atas kebijakan itu telah selesai. "Jika (persiapan--Red) program kompensasi telah selesai, baru kita naikkan," kata Boediono.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen. "Pemerintahan SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) telah dua kali melakukan kenaikan harga BBM, yaitu 30 persen pada Maret 2005 dan 120 persen pada 1 Oktober 2005," kata Wapres.

Wapres menambahkan, untuk saat ini, pemerintah kemungkinan akan menaikkan harga BBM sama dengan kenaikan Maret 2005, namun dengan memberikan BLT yang lebih besar dibanding saat kenaikan harga BBM yang kedua. Dengan begitu, masyarakat menengah ke bawah tetap mendapat kompensasi dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

"Sehingga, perlu ada kompensasi yang harus diberikan pemerintah dengan kenaikan itu bagi masyarakat berupa BLT," katanya.

(Indra/Kartoyo DS/Abdul Choir/Andrian)

Sejak itu, produksi minyak Indonesia turun hingga 35% dalam 12 tahun terakhir. Tahun lalu, produksi minyak RI hanya 54 ribu bph dengan laju pengurangan 9% per tahun atau *reserve to production ratio* 11 tahun.

Sejak 1998-2007, kegiatan eksplorasi sumur minyak cenderung turun. Pada 1998 tercatat 145 sumur yang dibor dari rencana 119. Sebanyak 55 sumur di antaranya sebagai sumur penemu dengan rasio sukses (*success ratio*) 52%. Sementara itu, pada 2007 dibor sebanyak 39 sumur dari rencana 43. Dari jumlah itu, 15 sumur dinyatakan sebagai sumur penemu dengan rasio sukses 38%.

Penurunan produksi minyak telah menempatkan Indonesia sebagai net importir minyak. Kini, pemerintah pun mengkaji keputusan untuk keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-Negara Peng ekspor Minyak (OPEC). "Kita memikirkan, apakah kita masih tetap berada di OPEC atau untuk sementara kita mengundurkan diri saja, di luar itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Mus-

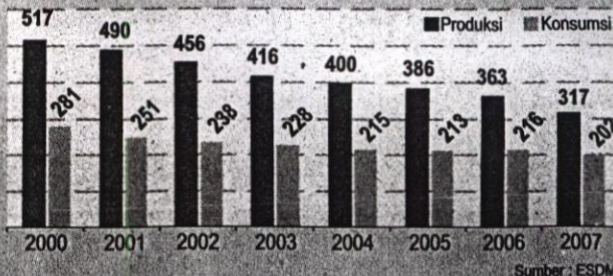
renbangnas) 2008 di Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Presiden, Indonesia tidak layak lagi disebut sebagai negara pengekspor minyak. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi salah satu importir minyak terbesar di dunia. Bahkan, produksi minyak Indonesia yang hanya 927 ribu barel per hari tidak mampu menutupi permintaan di dalam negeri yang hampir mencapai 1,3 juta barel per hari. "Indonesia sekarang ini tidak lagi menjadi *oil exporting country*," tegas Presiden.

Pemerintah akan berupaya meningkatkan produksi dan kebutuhan minyak mentah di dalam negeri, sehingga nantinya Indonesia pantas bergabung kembali dalam organisasi OPEC. "Kita memproduksi jumlah minyak yang pantas. Kita akan meningkatkan produksi itu, tapi masih perlu waktu 1-3 tahun ke depan," ujar Presiden.

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, keputusan keluar dari keanggotaan OPEC belum dapat direalisasikan tahun ini. Sebab, lanjutnya, Indonesia telah membayar iuran keanggotaan sebesar US\$ 2 juta untuk periode 2008. "Implikasinya sedang dikaji. Tapi, keluarnya

Produksi dan Konsumsi Minyak Bumi Indonesia (juta barel)



Indonesia dari OPEC tidak ada kaitannya dengan penurunan produksi," ujar dia.

Terbelenggu Aturan

Menurut Wahyudin Yudiana Ardiwinata, salah satu aturan yang hingga kini membelenggu investor adalah Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Investor masih harus tunduk pada aturan itu, padahal badan usaha milik negara (BUMN) sudah tidak lagi menerapkannya. "Terus terang, pemberlakuan aturan itu membuat kami tidak bisa bergerak cepat," kata dia.

Dengan diberlakukannya aturan itu, investor tidak bisa tender barang dan jasa industri minyak dan gas bumi secara langsung. Akibatnya, proses

eksplorasi dan eksploitasi menjadi molor karena sering kali proposal pengadaan barang mandeg di institusi pemerintah yang ditunjuk. "Kalau produksi minyak nasional harus ditingkatkan dengan cepat, aturan itu harus dikaji ulang atau bila perlu dihapuskan," ujar Yudiana yang juga penasihat Indonesian Petroleum Association (IPA) ini.

Investor migas juga merasakan ketatnya pelaksanaan audit, terutama menyangkut biaya produksi yang dikembalikan pemerintah (*cost recovery*). Hal itu menyebabkan terhambatnya proses produksi. Selama ini, audit meliputi *pre audit*, *current audit*, dan *post audit*. "Dalam berbisnis yang penting adalah *trust*, seharusnya audit semacam itu hanya menyang-

kut *post audit*," tegas Yudiana.

Dia mengakui, Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas telah mengakomodasi kepentingan investor migas. Demikian juga dengan sistem maupun besaran bagi hasil (*production sharing contract/ PSC*) yang diterapkan pemerintah Indonesia saat ini. "Lahirnya UU Migas membuat arus investasi sektor minyak dan gas bumi menjadi lebih baik, jadi tidak ada yang perlu dipersoalkan," tambah dia.

Sebaliknya, Kurtubi berpendapat, UU Migas harus direvisi karena tiga alasan. Pertama, proses perizinan menjadi birokratik. Kedua, investor dibebani pajak saat melakukan eksplorasi. Ketiga, bertentangan dengan kontrak bagi hasil (*production sharing contract/PSC*) migas. "UU Migas ini adalah biang dari hengkangnya investor minyak dari Indonesia dan telah menyebabkan migas Indonesia hancur," katanya.

Menurut Kurtubi, penyebab turunnya *lifting* karena produksinya hanya mengandalkan lapangan tua (*brownsfield*). Di sisi lain, produksi dari lapangan baru masih sangat kecil karena langkanya penemuan cadangan baru, terutama delapan tahun terakhir.

Dia mengungkapkan, langkanya penemuan cadangan baru terjadi karena rendahnya investasi dalam kegiatan eks-

plorasi. Rendahnya investasi dalam kegiatan pengeboran minyak di blok-blok baru terutama disebabkan sistem manajemen perminyakan nasional yang diatur dalam UU Migas tidak efisien dan tak bersahabat dengan investor.

Sebelum RUU Migas dibahas pemerintah dan DPR, sumur eksplorasi minyak selalu di atas 110 sumur. Begitu RUU tadi dibahas menurun menjadi 90 sumur. "Ironisnya, pada saat pemberlakuan UU Migas (2001) sumur eksplorasi merosot drastis menjadi hanya 62 sumur. Bahkan pada 2003 mencapai titik terendah, yakni 36 sumur, sebelum kemudian kembali menjadi 62 sumur pada 2005," ujar Kurtubi.

Masalah Krusial

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono mengakui birokrasi perizinan sebagai akibat penerapan Keppres No 80 Tahun 2003 memang menjadi masalah krusial dalam industri minyak nasional. Kendala birokrasi itu lah yang menjadi salah satu pemicu utama terhambatnya produksi minyak periode lalu, selain kendala teknis seperti menuanya sejumlah lapangan dan rusaknya sejumlah fasilitas produksi.

Dia mengatakan, selama ini BP Migas terkesan hati-hati

karena khawatir dipertentankan dengan Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kami akan berupaya memangkas birokrasi agar produksi minyak nasional bisa meningkat," kata dia, kemarin.

Priyono optimistis, produksi minyak yang bisa dijual (*lifting* yang ditetapkan dalam APBN P 2008 sebesar 927.000 barel per hari (bph) bisa terlampaui. Saat ini, produksi minyak telah mencapai 977.000 bph dan diperkirakan tembus 980 ribu bph pada Juni mendatang.

Untuk mengejar target tersebut, BP Migas akan mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mempercepat produksinya. Selain itu, mendorong tambahan produksi dari lapangan baru. "Namun demikian, produksi minyak baru bisa mencapai 1 juta bph pada 2009," jelas Priyono.

Deputi Operasi BP Migas Dodi Hidayat menjelaskan, pada April 2008, produksi minyak mencapai 978.460 bph. Tingkat produksi April itu belum menghitung gangguan operasi Lapangan Poleng milik Kodeco di Jawa Timur yang menyebabkan produksi berkurang 14.000 bph. "Kalau gangguan tersebut sudah selesai, maka produksi minyak akan bertambah 14.000 bph, dengan catatan tidak ada gangguan lagi," jelas dia. (nov)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/> O
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : <u> 7 </u>	
TAHUN 2008	

Yang pertama adalah pembentukan dua macam SPBU, yaitu untuk kendaraan roda dua dan umum, dan nonroda dua/umum. Tentu saja SPBU untuk kendaraan roda dua dan umum menjual BBM subsidi, sedang yang untuk nonroda dua tanpa subsidi. Saya rasa ini akan jauh lebih efektif dan ekonomis untuk dijalankan daripada pemakaian smart card apa pun, karena secara kasat mata, orang dapat menilai siapa yang melakukan kecurangan apabila mengisi BBM di SPBU yang tidak pada tempatnya.

Yang kedua sama seperti yang diusulkan sebelumnya, yaitu penghapusan BBM subsidi di daerah DKI Jaya, termasuk untuk roda dua. Jadi hanya kendaraan umum saja yang berhak untuk BBM subsidi. Dengan demikian sekali tepuk dua alat, penggunaan kendaraan pribadi termasuk roda dua dapat ditekan sehingga kemacetan akut di Jakarta dapat dikurangi dengan drastis.

Tentu ada risiko penyelewengan seperti mengisi dengan kendaraan umum lalu dikosongkan tangkinya kemudian dijual secara liar di pinggir jalan. Hal seperti ini tentunya jadi tanggung jawab aparat negara untuk menjalankan kewajibannya sebagai pengawas masyarakat, sama halnya menjaga keamanan negara.

Mengatasi harga BBM

Menurut saya ada dua cara yang paling efektif mengatasi harga BBM.

WIRAHADI KUSUMA
pakwira@gmail.com
Surabaya

74

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

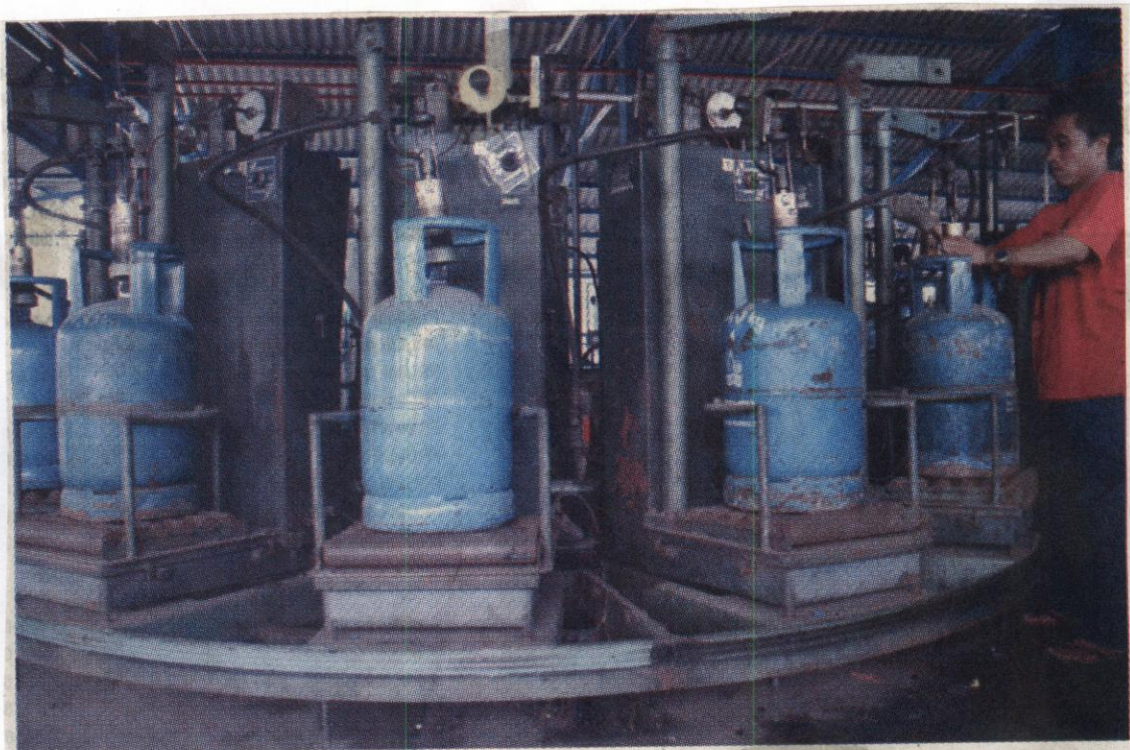
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008



ANTARA/ARIEF PRIYONO

TABUNG ELPIJI MAHAL – Seorang pekerja mengisi tabung elpiji di depo pengisian Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, Senin (5/5). Harga tabung elpiji di Kediri saat ini Rp 800.000 (ukuran 12 kg) jauh di atas harga Pertamina yang hanya Rp 350.000. Mahalnya harga tabung elpiji mempersulit program konversi energi nasional dari minyak tanah ke elpiji.

75

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR <u>MEI</u> JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : /		TAHUN 2008

DIPERKIRAKAN PEKAN DEPAN

Harga BBM Naik 30%

Oleh Imam Suhartadi dan Heriyono

► JAKARTA – Pemerintah mengisyaratkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik 30%, pekan depan. Sementara itu, menjelang kenaikan harga BBM, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di beberapa daerah diserbu pembeli hingga terjadi antrean panjang kendaraan.

Di Makassar dan Pontianak, ratusan masyarakat cari elemen mahasiswa dan buruh berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan mahasiswa UIN Alauddin Makassar berlangsung ricuh. Selain terjadi aksi lempar batu antara polisi dengan mahasiswa, sebuah mobil pengangkut BBM juga disandera oleh pengunjuk rasa.

Sumber *Investor Daily* mengatakan, harga BBM akan dinaikkan pada 15 Mei 2008, sebelum Menko Perekonomian Boediono menjadi gubernur BI untuk menggantikan posisi Burhanuddin Abdullah yang masa jabatannya berakhir 17 Mei 2008.

Ditanya tentang hal itu, Menko Perekonomian Boediono menegaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi akan diumumkan jika persiapan program kompensasi atas kebijakan tersebut telah

selesai. "Jika program kompensasi telah selesai, baru BBM kita naikkan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (6/5).

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menurut dia, kenaikan harga BBM kemungkinan akan diumumkan sekitar tiga minggu lagi, menyusul selesainya pembahasa tentang BLT. "Kalau persiapan BLT memakan waktu sekitar tiga minggu, maka kira-kira dalam jangk waktu seperti itu yang kita matangkan, termasuk hitungan-hitungan detailnya," ujarnya dalam temu wicara dengan editor media nasional di Jakarta, Selasa malam.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengisyaratkan harga BBM akan dinaikkan sekitar 30%. Dengan kenaikan sebesar itu, pemerintah bisa menghemat anggaran sebesar Rp 35 triliun. "Dana hasil penghematan selu-

ruhnya dialokasikan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin," ujarnya.

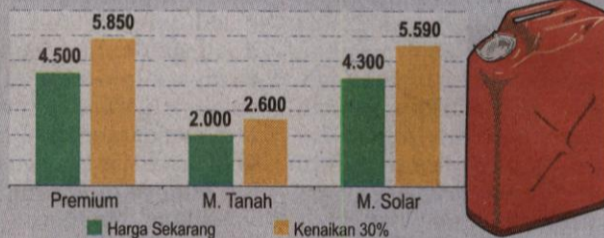
Kenaikan harga BBM sebesar 30%, kata Kalla, hampir sama dengan kenaikan harga BBM Maret 2005 sebesar 29,9%. Ia berharap masyarakat mau mengerti kondisi keuangan pemerintah yang tertekan akibat harga minyak internasional yang melambung tinggi. Di pasar New York, harga minyak, kemarin, kembali mencatat rekor baru, menembus US\$ 120 per barel akibat pelemahan dolar AS dan kekhawatiran terganggunya pasokan menyusul kerusuhan di Irak dan Nigeria.

Pada kesempatan itu, Kalla juga mengimbau para kepala daerah agar tidak cemas dan ragu atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurut Kalla, aksi demonstrasi masyarakat bisa diredam bila pemerintah daerah mau bekerja keras melakukan sosialisasi soal manfaat pencabutan subsidi BBM. "Saya minta kepala daerah tidak menahan pembagian kartu untuk mengambil BLT," ujarnya.

Wapres menegaskan, demo penolakan kenaikan harga BBM sama artinya melawan orang kecil yang akan menikmati kompensasi dari kenaikan tersebut. "Pilihan kenaikan harga BBM karena pemerintah ingin subsidi diberikan kepada kelompok masyarakat yang layak dan tepat sasaran," ungkapnya.



Asumsi Kenaikan BBM sebesar 30% (Rp/Liter)



Sumber : diolah Investor Daily

Penyesuaian Harga BBM di Kawasan Asia

Negara	Harga BBM per Maret 2008 (US\$/Liter)			Pajak Atas BBM	Rencana Selanjutnya
	Premium	Solar	Kerosin		
Malaysia	0,59	0,47	-	Ya hingga 2006	Merencanakan mencabut subsidi solar (Juni 2008) dan selanjutnya premium
Singapura	1,49	1,09	-	Ya	-
Thailand	0,87	0,77	0,87	Tidak	-
Filipina	1,16	1,09	1,12	Ya (25%)	-
Vietnam	0,87	0,86	0,86	Tidak	Merencanakan kenaikan 30% Juni 2008
Tiongkok	0,75	0,74	0,38	Tidak	Nov 2008 menaikkan harga BBM
Timor Timur	0,87	0,86	0,87	Tidak	-
India	1,13	0,79	0,23	Ya (50%)	Merencanakan kenaikan harga
Kamboja	1,23	0,94	-	Ya (25%)	-
Indonesia	0,49	0,47	0,22	Ya	Merencanakan kenaikan harga

Sumber : Pengarahan Menkeu pada Musrenbangnas 2008

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MAY** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Kenaikan BBM Masih Bisa Ditanggung Masyarakat

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, besaran kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah ditetapkan pada kisaran yang masih bisa ditanggung masyarakat dan pelaku ekonomi. "Yang penting adalah sinyal kita kepada seluruh pelaku ekonomi bahwa kenaikan ini dalam kisaran yang masih bisa diserap dan ditanggung masyarakat dan pelaku ekonomi," kata Menkeu usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/5).

Selain itu, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi ini diharapkan bisa menimbulkan kepercayaan dan menghilangkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi.

Namun pemerintah perlu

waktu untuk mempersiapkan kebijakan ini terutama untuk melindungi masyarakat yang paling rawan terkena dampak kenaikan BBM ini, katanya. "Jadi kebijakannya akan kita matangkan, nanti pemerintah akan menetapkan kapan dan tingkat kenaikannya," katanya.

Menkeu juga meminta agar keputusan menaikkan harga BBM ini bisa dipahami oleh masyarakat karena kenaikan ini juga terjadi di negara lain di dunia.

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah akan memfokuskan diri untuk melindungi kelompok masyarakat dan pelaku ekonomi supaya tetap memiliki daya tahan sosial dan daya tahan ekonomi.

(ant)

77

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

KENAIKAN HARGA BBM

PHK Sektor Manufaktur kian Mengancam

JAKARTA (MI): Pemerintah diminta menyiapkan insentif fiskal kepada pengusaha, untuk menyeimbangkan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, saat ini ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah membayangi sektor manufaktur nasional.

Jika pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 28,7%, sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, dan makanan/minuman diperkirakan menderita beban paling berat.

"Kecenderungan *lay off* (pengurangan tenaga kerja/PHK) sudah terjadi. Jangan sampai manufaktur



MS Hidayat
Ketua Umum Kadin

kolaps ketika memberlakukan *lay off*," tegas Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat, di sela acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008, di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Kadin Indonesia mengusulkan agar pemberian in-

sentif fiskal berupa penundaan pajak penghasilan (PPh) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi segera disiapkan. Saat ini, sebelum harga BBM bersubsidi dinaikkan, sektor manufaktur nasional sudah mengalami pukulan berat di tengah menurunnya daya beli masyarakat. Margin profit manufaktur diperkirakan akan mencapai titik terendah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperhitungkan kompensasi yang tepat untuk sektor strategis tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Bambang Soesatyo, Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kadin Indonesia, menyatakan kepastian

pemerintah menaikkan BBM itu melahirkan persoalan baru dalam jangka dekat. Cara yang ditempuh pemerintah kali ini tidak lazim, yakni memastikan bakal menaikkan harga BBM bersubsidi jauh sebelum jatuh tempo atau jauh sebelum harga baru diberlakukan.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengakui, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menimbulkan masalah seperti yang terjadi di akhir 2005. Secara terpisah, Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian Fauzi Azis meyakini, IKM nasional akan dapat bertahan di tengah kenaikan BBM. **(Zhi/E-2)**

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Bersiap Menghadapi Kenaikan Harga BBM

BLT Jadi Jaring Pengaman

Jakarta, Probisnis RM.

Meski belum jelas kapan kepastian kenaikan harga BBM, pemerintah sudah menyiapkan jaring pengaman berbentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu rakyat kelas bawah.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta menyatakan, kompensasi kenaikan harga BBM yang mencapai Rp 35 triliun seluruhnya akan dialokasikan kepada program pengentasan kemiskinan, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus bagi masyarakat miskin.

"Kita sekarang sedang kaji kenaikan BBM sebesar 20 persen, 25 persen dan 30 persen. Kalau kenaikannya 30 persen, kita akan dapat dana dari penurunan subsidi BBM sebesar Rp35 triliun," jelas Paskah usai pembukaan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, kemarin.

Paskah juga menjelaskan, saat ini pemerintah masih terus mengkaji kenaikan harga BBM. "Pemerintah masih melakukan kajian soal kenaikan harga BBM. Kenaikan harga ini membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk memutuskan besarnya kenaikan BBM serta besarnya BLT yang akan diberikan," ujar Paskah.

Ia menambahkan, pemberian

BLT bukan semata mencari simpati rakyat jelang Pemilu 2009. BLT hanya untuk membantu masyarakat kecil akibat dampak dari kenaikan harga BBM, seiring tingginya harga minyak dunia.

Di tempat terpisah, Komite Indonesia untuk Pengawasan dan Penghematan Energi (KIPPER) mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang peruntukan/penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sekjen KIPPER, Sofyano Zakaria mengatakan, PP tersebut untuk mempertegas bahwa BBM bersubsidi digunakan hanya untuk kepentingan alat transportasi darat non industri dan hanya untuk golongan masyarakat tidak mampu.

Transportasi darat misalnya, untuk kendaraan bermotor angkutan penumpang dan atau angkutan barang khusus yang ber-plat kuning serta sepeda motor.

"Mengingat dalam harga jual BBM terdapat subsidi pemerintah/negara dan subsidi BBM bukan merupakan kewajiban hukum yang tidak diamanatkan dalam UUD 1945, tetapi lebih bersifat kebijakan politis, agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan maka PP tersebut perlu dikeluarkan," kata Sofyano di Jakarta, kemarin.

Dikatakannya, KIPPER memahami keputusan pemerintah me-

naikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sepanjang keputusan tersebut dapat memperbaiki kondisi perekonomian dan pembangunan nasional dan bukan semata-mata untuk mengurangi beban anggaran atas subsidi BBM.

Namun, lanjutnya besarnya presentase kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut harus terukur dengan kemampuan/daya beli masyarakat lemah.

KIPPER juga mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan agar kendaraan-kendaraan dinas sipil, TNI dan Polri serta kendaraan angkutan umum diwajibkan menggunakan atau beralih ke bahan bakar gas (BBG).

Selain itu, KIPPER mendesak pemerintah meninjau ulang kontrak kerjasama dengan para Kontraktor Kontrak Production Sharingn (KPS) yang ternyata tidak mampu merealisasikan peningkatan *lifting*.

"Sebaliknya pemerintah memberikan insentif terhadap keberhasilan peningkatan *lifting* dan sesuai amanat UUD 1945 agar pemerintah segera memberikan perlindungan/jaminan sosial kepada rakyat miskin dengan memberikan kartu jaminan sosial kepada mereka yang benar benar berhak dan membnerikan pendidikan gratis hingga SMU sederajat serta pengobatan gratis," tambahnya. ● FIK/MAF

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEL** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Hillary Bertekad Menantang OPEC

JASON A. FRIZZELLE/AP



MERRILLVILLE — Hillary Clinton, Senin (5/4), bertekad akan menantang Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) menyusul harga minyak dunia menembus 120 dolar AS. Dalam kampanye terakhirnya menjelang primari Partai Demokrat di Indiana dan North Carolina, Hillary mengatakan OPEC tak lebih sebagai sebuah kartel yang memonopoli produksi dan penjualan minyak. "Kita akan mencari keadilan di OPEC, Mereka tidak bisa lagi menjadi sebuah kartel, sebuah monopoli yang bertemu di ruangan konferensi di sebuah ruangan mewah," kata Hillary saat berkampanye di Merrillville, Indiana.

"Mereka memutuskan berapa barel minyak yang akan mereka produksi dan berapa harganya. Itu adalah sesuatu yang mereka lakukan kepada kita dan itu bukanlah sebuah pasar melainkan monopoli," lanjut Hillary yang langsung disambut histeria pendukungnya.

Tidak dapat disangkal, ke-

DI CAROLINA:

Hillary Clinton dalam kampanye di Pitt Community College di Greenville, North Carolina, Senin (5/5).



naikan harga bahan bakar dan pangan menjadi isu sensitif dalam persaingan sengit Demokrat. Hillary tampak dengan sigap memanfaatkan isu ini dan menjadikannya sebagai tema kampanye yang populis. Hillary misalnya berjanji akan melakukan amandemen konstitusi yang memungkinkan AS melawan OPEC. Hillary juga berjanji akan menghadapi OPEC melalui jalur WTO.

Pengamat politik menilai pernyataan Hillary yang keras mengenai kebijakan luar negeri, termasuk Irak, lebih ditujukan untuk konsumsi dalam negeri, khususnya da-

lam meraih pendukung. Hillary memang dalam tekanan besar untuk memenangi hajatan Demokrat yang tersisa untuk memperpanjang ambisinya ke Gedung Putih dan meneguhkan klaim bahwa ia dan bukan Barack Obama sebagai kader Demokrat yang paling tepat untuk menghadapi jagoan Partai Republik, John McCain.

Sejauh ini Hillary disemangati oleh jajak pendapat yang menunjukkan persaingan ketat dengan Obama di Indiana dan ia terus mengikis keunggulan Obama di North Carolina. Jauh sebelum primari, Obama jauh diunggul-

kan di atas Hillary terkait dengan mayoritas pemilih Demokrat di kedua negara bagian itu warga kulit hitam.

Sebaliknya Obama juga disemangati oleh dukungan aktor papan atas Hollywood, Tom Hanks. Peraih dua piala Oscar ini mengatakan kemampuan Obama untuk menyatukan AS tak jauh beda dengan presiden Franklin Delano Roosevelt, Harry Truman, John F Kennedy dan Ronald Reagan. Sebelumnya Obama di dukung oleh pesohor Hollywood lainnya seperti George Clooney, Robert De Niro, Scarlett Johansson, dan Halle Berry ■ ap/afp/lan

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Pemerintah Berencana Keluar dari OPEC

JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Pertimbangan itu didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia kini bukan lagi negara pengekspor minyak, melainkan hanya produsen, bahkan pengimpor minyak.

Tengara ke arah itu dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan sambutan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Muslambangnas) 2008 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (06/5).

"Indonesia tak lagi menjadi *oil exporting country*. Kita sekarang menjadi *oil importing country*," ujar Presiden, dalam sambutan pembukaan tersebut. Dengan alasan itulah, Presiden mengatakan bahwa dalam rapat terbatas bidang ekonomi yang digelar Senin (05/5) lalu dibahas soal rencana pengunduran diri dari keanggotaan OPEC itu.

"Kita berpikir, apa kita masih tepat berada di OPEC. Sementara (kita akan) mengundurkan diri sambil meningkatkan produksi sampai kemudian pantas lagi menjadi negara pengekspor," ujar Presiden. Lebih lanjut Yudhoyono mengatakan, produksi minyak Indonesia saat ini mencapai kurang dari 1 juta barel per hari. Hal itu antara lain disebabkan sumur-sumur minyak yang ada saat ini umumnya sudah tua. "Perlu waktu dua ahun ke depan, baru bisa diperbaiki."

Mengenai rencana tersebut, Menteri ESDM, Purnomo Yusgiantoro membenarkan hal itu. Purnomo menyatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan keluar dari OPEC tersebut dengan alasan sebagaimana dinyatakan Presiden. "Indonesia sekarang sudah

tidak lagi menjadi negara pengekspor minyak, tapi negara produsen dan konsumen minyak," kata Purnomo.

Menurut Purnomo, rencana itu sendiri baru merupakan hasil pembicaraan rapat terbatas. "(Rencana) ini baru kemarin, *fresh from the oven*. Jadi kita akan kaji lagi secara cermat bagaimana nanti implikasinya."

Purnomo membantah kalau pengunduran diri itu terkait dengan rencana Indonesia yang akan menaikkan *lifting* produksi minyak. "Itu tak ada kaitannya. Ini soal keanggotaan OPEC saja," kata dia, mengelak.

Meski demikian, Purnomo tidak memberikan kepastian kapan waktu Indonesia menarik keanggotaan tersebut. "Tahun ini kita sudah bayar iuran keanggotaan," kata Purnomo. Ia juga bungkam ketika ditanya waktu keluar itu kemungkinan tahun 2009 mendatang.

Soal tengah dikajinya kemungkinan keluar dari OPEC tersebut dibenarkan Menko Perekonomian, Boediono. Saat ditanya wartawan tentang hal itu, Boediono langsung mengiyakan. "Benar, dan sekarang hal itu tengah kita pelajari," kata Boediono. Namun demikian, menurut dia, kalau pun jadi keluar dari OPEC, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan kembali masuk ke dalam keanggotaan organisasi negara-negara eksportir minyak tersebut seandainya memiliki kelebihan produksi minyak.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin), MS Hidayat, mengatakan, rencana keluarnya Indonesia dari OPEC itu bukanlah hal baru. Apalagi status Indonesia yang sudah menjadi negara importir minyak pun sudah cukup lama.

■ wed/rto

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEL** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2008

Harga Minyak Tembus 120 Dolar AS Per Barel

Sejumlah serangan yang mengganggu produksi minyak serta melemahnya ekonomi Amerika Serikat salah satu pemicu harga minyak naik.

SINGAPURA — Harga minyak kembali catatan rekor tertinggi, Selasa (6/5), di atas 120 dolar AS per barel. Menurut analisis, rekor terbaru itu merespons kekhawatiran pasokan minyak dunia akibat kerusakan di Nigeria dan ketidakstabilan politik di Timur Tengah.

Kontrak berjangka minyak mentah jenis *light sweet* melesat ke rekor 120,23 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange (NYME). Untuk pendistribusian bulan Juni melonjak ke 120,20 dolar AS per barel dalam perdagangan harian. Acuan kontrak ditutup pada posisi tertinggi selama ini di 119,97 dolar AS. Namun kini melonjak 3,65 dolar AS dari penutupan Jumat. Di London, minyak mentah jenis *brent* untuk pendistribusian Juni melesat ke rekor tertinggi perdagangan harian pada 118,58 dolar AS per barel sebelum ditutup naik 3,43 dolar AS pada rekor 117,99 dolar AS.

Di Irak, pemberontak Kurdi melakukan serangan bunuh diri di wilayah kepentingan AS. Serangan itu bertujuan memberi pelajaran kepada AS yang bekerja sama dengan Turki setelah Turki mengebom pemberontak di Irak Jumat lalu.

Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khomeini mengatakan, negaranya tidak akan tunduk pada tekanan internasional untuk menyerahkan program nuklirnya. Iran merupakan negara eksportir terbesar kedua yang tergabung dalam organisasi pengeksport minyak (OPEC).

Di Nigeria, juru bicara Royal Dutch Shell PLC mengatakan, aksi pemberontakan lokal yang menyerang fasilitas

perusahaan di selatan Nigeria telah membuat produksi minyak dihentikan. Nigeria adalah negara penghasil minyak terbesar di Afrika dengan produksi 2,1 juta barel per hari. Sedangkan Shell adalah perusahaan terbesar yang mengelola separuh hasil tersebut. "Nigeria adalah titik penting bagi pasar yang harus mendapatkan perhatian," kata analisis MF Global Ed Meir.

Menanggapi kenaikan harga minyak dunia, pengamat energi dari Purvin and Gertz, Victor Shum mengatakan, data perekonomian AS terakhir juga menjadi pendorong kenaikan harga minyak. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di AS bulan April lalu tercatat memiliki 20 ribu pekerja baru. Angka tersebut jauh dari ekspektasi pasar yaitu 75 ribu. Departemen Tenaga Kerja AS menyatakan, angka pengangguran turun menjadi lima persen dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen.

Shum mengatakan, laporan tenaga kerja itu memberikan gairah positif kepada pasar. "Pelemahan ekonomi AS tidak seburuk yang diduga," katanya.

Pelaku pasar ketakutan dengan melemahnya ekonomi AS sebagai negara ekonomi dan konsumen terbesar dunia. Anggapan mereka kondisi tersebut akan mempengaruhi permintaan minyak.

Tapi rupanya, menurut Shum, melemahnya nilai tukar dolar AS terhadap euro membuat investor melirik kembali komoditas, terutama minyak. Dengan melemahnya mata uang hijau ini, harga minyak dinilai lebih murah lantaran minyak dihargakan dengan dolar AS.

Serangkaian aksi bank sentral The Fed memangkas suku bunga sejak September lalu sampai tujuh kali semakin menambah terpuruknya dolar AS. Analisis menuding pelemahan dolar AS ini sebagai pemicu kenaikan harga minyak.

Juru bicara Gedung Putih, Scott Stanzel mengatakan, Presiden George Walker Bush akan mengangkat isu kenaikan harga minyak saat berkunjung ke negara produsen minyak terbesar dunia, Arab Saudi, pekan depan.

■ ap/afp/ria



MELONJAK: Harga minyak yang telah menembus harga 120 dolar AS per barel disebabkan berbagai faktor. Selain kondisi ekonomi Amerika Serikat yang melemah juga karena terjadinya aksi penyerangan di beberapa fasilitas penghasil minyak, seperti yang terjadi pada Royal Dutch Shell, perusahaan minyak terbesar di Nigeria yang terpaksa menghentikan produksinya.

82



ISI BBM: Sejumlah petugas mengisi truk tanki BBM Pertamina, Selasa (6/5), di Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) karena hanya menjadi produsen minyak.

82

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Harga Bahan Pokok Mulai Melambung

Pedagang sudah berspekulasi dengan menaikkan harga.

JAKARTA — Belum lagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, harga bahan-bahan makanan sudah beranjak naik. Di beberapa daerah, kenaikan harga sejumlah bahan pokok itu dipicu rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, harga bahan makanan pokok naik Rp 200-Rp 300 sejak awal Mei. Pantauan *Republika* di beberapa pasar tradisional kota itu, kenaikan harga terutama ter-

jadi pada komoditas beras, minyak goreng, terigu, telur ayam, ayam potong, dan daging sapi.

Di Pasar SMEP, beras kualitas satu naik dari Rp 5.300 per kg menjadi Rp 5.500. Tepung terigu dijual Rp 6.500 per kg, naik dari Rp 6.000. Di Pasar Tugu, minyak goreng curah naik dari Rp 11.500 per kg menjadi Rp 12 ribu.

Pemberitaan akan naiknya harga BBM di media massa, menurut Suwadi, pedagang di Pasar SMEP, memicu harga bahan pokok melonjak. "Naiknya karena isu BBM bakal naik. Distributor atau agen lebih dahulu menaikkan, nanti pas-

BBM naik, harga naik lagi," katanya, Selasa (6/5).

Kenaikan harga juga terjadi di beberapa pasar tradisional di Banjarmasin, Kalsel. Minyak goreng curah kuning naik dari Rp 9.800 per kg menjadi Rp 10 ribu. Daging sapi yang sebelumnya harganya stabil, kini naik dari 58 ribu per kg menjadi Rp 59 ribu.

"Dari hasil pantauan di lapangan, rata-rata pedagang mengatakan terpaksa menaikkan harga karena ongkos angkut juga naik," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kalsel, Nurliansyah.

Kendati kenaikannya relatif kecil, namun dia menilai ini baru langkah awal. Biasanya, begitu harga BBM resmi naik, harga bahan pokok langsung naik drastis. "Pedagang sudah berspekulasi dengan menaikkan harga secara bertahap."

Hal serupa terjadi di Pasar Sentral Toddopuli Makassar, Sulsel. Menurut Tu-

ti, pedagang di pasar itu, harga-harga merangkak naik dalam sepekan ini. Dia berharap harga turun karena jumlah pembeli sekarang berkurang. "Tapi, sepertinya harga tak turun karena harga BBM juga akan naik," katanya.

Kenaikan harga BBM, kata Slamet Supriadi, pedagang bawang dan cabai di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, berdampak pada biaya ongkos angkut pada biaya sayur-mayur. Jika harga bawang merah saat ini Rp 11 ribu per kg, bisa naik menjadi Rp 14 ribu. "Pengaruhnya pasti ke penjualan kita karena daya beli masyarakat menurun."

Ketua DPC Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Surabaya, Wasotomi Suheri, mengatakan, pengusaha angkutan kini serbasalah. Menaikkan tarif, pilihan tak mungkin, karena kenaikan BBM tahun 2005 lalu memangkas separuh penumpang. "Iba-

rat dipukul KO, belum sadar, sudah dipukul lagi."

Dia berharap pemerintah tetap menyubsidi angkutan umum. "Misalnya pakai *smart card* atau apalah caranya supaya kami bisa bernapas. Sebab, kalau BBM naik tapi tak ada solusi, ya paling kita bisanya demo untuk menekan pemerintah."

Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Departemen Perindustrian (Depperin), Fauzi Aziz, mengakui industri kecil dan menengah akan terimbas paling dulu atas kenaikan harga BBM. Sebabnya, biaya distribusi bertambah, sehingga menaikkan biaya produksi.

"Di sisi lain, daya beli masyarakat makin turun," kata Fauzi. Jumlah IKM yang tercatat di Depperin hingga 2006 sebanyak 3,21 juta unit usaha, dengan kemampuan dapat menyerap 9,34 juta tenaga kerja.

■ mur/rfa/zak/uki/ant

Dampak Sosial Kenaikan Harga BBM

Parameter	Smart Card	Subsidi Terbatas	Kenaikan Harga BBM
Tambahan beban biaya transportasi per kendaraan/bulan	Rp 333 ribu	Rp 555 ribu	Rp 225 ribu
-Pemilik roda empat	0	0	Rp 22,5 ribu
-Pemilik roda dua			
Kemiskinan			
-2008 (Maret)	14,8-15,0 %	14,8-15,0 %	14,8-15,0 %
-2009 (Maret)	19,5 %	19,5 %	17,2 % (tanpa BLT) 14,2 % (dengan BLT)

- Asumsi konsumsi BBM satu kendaraan roda empat: 120 liter per bulan dengan alokasi *smart card* sebanyak 60 liter.
- Kendaraan roda dua diasumsikan menggunakan 15 liter per bulan, sepenuhnya dipenuhi *smart card*.
- BLT diberikan selama 12 bulan (Juni 2008-Mei 2009) sebesar Rp 100 ribu per bulan untuk 19,1 juta KK.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

‘Saya Takut Bensin Langka’

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar 20-30 persen belum lagi diberlakukan. Baru direncanakan. Tapi, efeknya sudah mulai menjalar. Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah kota mulai diserbu. Demonstrasi pun mulai bermunculan.

Di salah satu SPBU di Desa Kotabatu, Kec Ciomas, Kab Bogor, Jawa Barat, ratusan orang terlihat mengantre. Bahkan, antrean itu sudah terlihat sejak Senin (5/5) pagi. Pengelola SPBU, Jumali, terkejut oleh antrean itu. "Sebelumnya nggak pernah kaya gini," kata Jumali kepada *Republika*, Selasa (6/5).

Petugas SPBU pun pontang-panting melayani pembeli yang tak putus-putus sejak pukul 06.00 pagi hingga tengah malam. Para pengantre datang dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Yang mereka cemas bukan hanya harga, tapi juga kemungkinan bensin menghilang. "Saya takut bensin jadi langka," kata Ahmad, seorang pengantre.

Di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, antrean di SPBU-SPBU juga marak. Di SPBU Sabilal Muthadin, antrean kendaraan roda dua dan roda empat sudah *berbanjar* atau berlapis dua hingga ke perempatan Jl Sudirman, Jl Merdeka, dan Jl Lambung Mangkurat. Kemarin, panjang antrean mencapai setengah kilometer.

Terlambatnya *droping* BBM ke SPBU itu, membuat para pengantre khawatir. "Sudah lama mengantre, jangan-jangan tidak kebagian," kata Amat (45 tahun), seorang sopir truk yang ada di

barisan belakang. "Mungkin karena BBM mau naik, sampai pukul 11.00 belum ada *droping*," duga pengantre lain, Asan (32).

Sales Area Manager PT Pertamina Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Budi Bushama, memaklumi kerisauan masyarakat yang melahirkan antrean panjang. Menurut dia, keadaan itu menunjukkan tingginya respons masyarakat atas berita rencana kenaikan harga BBM. Tapi, dia meminta masyarakat tak panik. "Kalau masyarakat panik, justru menjadi kesempatan bagi spekulasi. Stok di depo masih cukup,"

kata Budi.

Meski para pemilik kendaraan bermotor sudah mengantre di SPBU-SPBU, namun para pengecer BBM di Banjarmasin belum menaikkan harga. Para pengecer yang kebanyakan pedagang kaki lima masih menjual premium dan solar Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per liter—bergantung jarak dengan SPBU tempat pengecer membeli bensin atau solar.

Di Depok, Jawa Barat, antrean panjang belum terlihat. Namun, sejumlah SPBU sudah mulai memasang peraturan untuk mencegah penimbunan BBM. Masyarakat yang hendak

membeli BBM dalam jumlah besar, diwajibkan membawa surat izin dari Polres dan Hiswana Migas. Di situ, kata Heru Suponco, pengelola SPBU di Jl Siliwangi, Depok, harus tertera siapa pembelinya, untuk keperluan apa, dan berapa besar volumenya.

Selain itu, Heru mengatakan SPBU yang dikelolanya tak lagi melayani pembelian menggunakan jeriken atau bolak-balik mengisi bensin dengan kendaraan. Warga yang mobilnya kehabisan bensin dan terpaksa membeli dengan jeriken, kata Heru, akan diberi dispensasi. "Tapi, maksimal hanya lima liter," katanya.

Adapun SPBU di Jl Margonda, masih melayani pembelian 10

liter dengan jeriken, tapi khusus untuk pengusaha tahu-tempe atau untuk kebutuhan Politeknik Jakarta. "Selain itu, tidak kami layani," kata pengelola SPBU tersebut, Sukaryo.

Tapi, pembatasan ini bisa menjadi buah simalakama. Seperti terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Karena pedagang pengecer telah dilarang membeli dengan jeriken, harga bensin di tingkat pengecer pun meroket. Bila semula hanya Rp 5.000 per liter, kemarin telah menjadi Rp 7.500 per liter. "Itu pun hanya boleh membeli satu liter per orang," keluh Wiwik (29), pembeli bensin di Desa Juwiring, Klaten.

Yulianto (38), pedagang pengecer di Desa Juwiring, mengaku

85

kenaikan harga karena adanya pembatasan pembelian dengan jeriken di SPBU-SPBU. Dia pun akhirnya putar otak agar tetap bisa jualan. "Saya beli bensin dengan tangki sepeda motor, kemudian disedot ke botol-botol, lalu dijual," katanya.

Tidak di semua tempat di Klaten naik sampai 50 persen, memang. Di Desa Pasung, Kec Wedi, harganya naik 10 persen: dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Tapi, warga Desa Pasung, Nanang, mengaku khawatir terhadap dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, kemarin, bensin di SPBU Wedi diserbu hingga ludes.

Demonstrasi

Rencana kenaikan harga BBM

juga mulai memancing para mahasiswa turun ke jalan, kendati jumlahnya masih kecil. Di Ponorogo, Jawa Timur, misalnya, sekitar 100 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan *longmarch* di jalan-jalan protokol Ponorogo.

Di halaman kantor DPRD Ponorogo, mereka menyampaikan orasi yang isinya menolak kenaikan harga BBM. 'BBM naik rakyat menjerit', 'BBM Naik, Pemilu Golput', demikian antara lain bunyi poster yang mereka usung. Daripada menaikkan harga BBM, mereka menuntut pemerintah melakukan penghematan dan mengusut tuntas kasus BLBI.

Di DPRD, para mahasiswa sempat bersitegang dengan

aparatus keamanan. Namun, tak sampai terjadi bentrok. Setelah diterima anggota DPRD, para mahasiswa mengirim pernyataan sikapnya ke alamat faksimile Menko Perekonomian, Menteri ESDM, dan Pertamina.

Di Makassar, demo mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin yang menolak kenaikan harga BBM berakhir ricuh. Mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan. Akibatnya, lima mahasiswa dan tiga polisi luka-luka. Lima mahasiswa UIN ditahan untuk dimintai keterangan. Penahanan itu memicu aksi solidaritas mahasiswa perguruan tinggi lain. Mereka mengancam turun ke jalan dalam jumlah lebih besar.

■ c63/c67/ant

85-

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

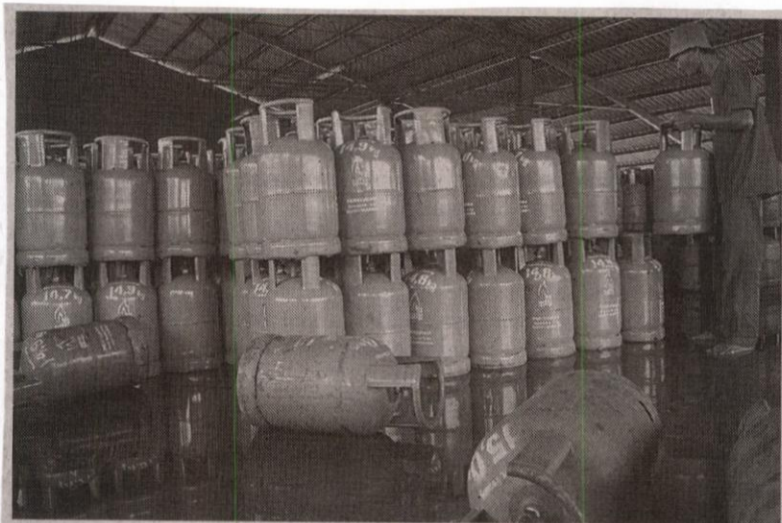
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008



Antara

TABUNG ELPIJI MAHAL-Seorang pekerja menata tabung elpiji di depo pengisian Gampengrejo, Kediri, Jawa Timur, Senin (5/5). Harga tabung elpiji di Kediri saat ini Rp 800.000 (ukuran 12kg), jauh di atas harga Pertamina yang hanya Rp 350.000. Mahalnya harga tabung elpiji mempersulit program konversi energi nasional dari minyak tanah ke elpiji.

86

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input checked="" type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
HALAMAN : 1 TAHUN 2008	

Kurangi Beban Rakyat Kecil

RENCANA pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) langsung berdampak pada perekonomian rakyat. Meski belum putus berapa besaran dan kapan kenaikan itu diberlakukan, harga-harga bahan pokok langsung terkerek. Karena itu, selain kebijakan tersebut harus segera diputuskan, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban rakyat banyak akibat dampak kenaikan harga BBM tersebut.



■ M/M IRFAN

Thamrin Amal Tomagola

Sosiolog

INFORMASI harga BBM akan naik sudah memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Kebijakan kenaikan harga BBM harus disertai dengan langkah konkret pemerintah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah agar tidak terlindas kenaikan harga BBM dan kenaikan harga barang di pasaran yang tidak terkontrol. Intinya, kenaikan harga BBM harus diikuti dengan kebijakan menyeluruh dan terintegrasi yang melindungi masyarakat lemah. **(Hil/X-5)**



■ DOK-YLKI

Tulus Abadi

Ketua Pengurus Harian YLKI

JIKA pemerintah memiliki nyali, harus meminta maaf dulu kepada masyarakat karena sebelumnya berani menjamin tidak ada kenaikan harga BBM sampai 2009. Walaupun masih rencana, hal itu sudah menimbulkan dampak pada perekonomian masyarakat. Ini disebabkan pemerintah selalu ragu mengambil keputusan. Pemerintah harus menekan biaya ekonomi tinggi karena pada akhirnya semua akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen akhir. **(* /X-5)**



■ M/M SOLEH

Pramono Anung

Sekjen PDIP

PEMERINTAH harus mengkaji secara mendalam soal rencana kenaikan BBM. Tidak boleh *grusa-grusu* karena memberikan dampak luar biasa kepada rakyat yang daya belinya masih sangat rendah. Karena itu, pemerintah harus mencari solusi alternatif yang tidak menambah beban berat kepada rakyat kecil. Karena kenaikan itu terlalu banyak diwacanakan, didiskusikan, dampaknya menjadi lebih besar. Hampir semua barang dan jasa sudah merangkak naik. **(Tia/X-5)**

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Mematahkan Belunggu BBM

BELENGGU bahan bakar minyak terhadap sistem kehidupan dan perekonomian Indonesia sangat kuat. Celakanya, belunggu BBM itu semakin lama semakin mematikan. Karena itu, diperlukan keberanian luar biasa untuk mematahkan belunggu tersebut.



Perekonomian Indonesia dibangun dan dimanjakan kelimpahan minyak sejak 1970-an. Kita berperilaku—sampai sekarang—seperti negara kaya minyak. Padahal, faktanya kita telah menjadi importir minyak sejak akhir 1980-an.

Kemajaan itu terlihat sangat jelas sampai sekarang. Yaitu Indonesia tetap bertahan sebagai anggota OPEC—organisasi negara-negara pengeksport minyak—padahal kita telah kehilangan status sebagai pengeksport.

Perilaku sebagai negara kaya minyak dipelihara melalui kebijakan subsidi BBM hingga saat ini. Dalam APBN 2008 yang telah diperbarui, subsidi BBM mencapai Rp126,8 triliun.

Padahal dari waktu ke waktu, ketika harga minyak bergejolak, subsidi BBM menjadi bumerang.

Tatkala harga minyak sekarang mulai menyentuh US\$120/barel, lonjakan subsidi BBM bisa mencapai Rp250 triliun. Itulah angka yang mematikan bila terus dipelihara.

Dengan posisi sebagai importir, tidaklah masuk akal Indonesia mempertahankan kebijakan subsidi BBM. Negara biasanya memberi subsidi pada barang-barang yang ketersediaannya melimpah ruah. Air minum, misalnya, bisa disubsidi karena kita memiliki sumber yang banyak.

Yang amat menggelikan, Indonesia menempuh subsidi BBM yang persediaannya semakin langka. Subsidi itu pun dibakar mobil-mobil yang berseliweran di jalan raya tanpa banyak makna bagi kemaslahatan publik.

Jadi sangat jelas, subsidi BBM adalah kebijakan bunuh diri. Namun, pemerintah seperti kehilangan akal untuk mematahkan belunggu itu.

Begitu parahnya belunggu BBM, pemerintah tidak saja kehilangan akal secara substansial, yaitu menaikkan atau menghapus subsidi, tetapi juga kehilangan akal dalam cara menyampaikan kebijakan.

Belum tahu kapan diumumkan, pemerintah sudah memberi sinyal bahwa BBM akan naik sekitar maksimal 30%. Apa akibatnya? Pasar yang memperoleh sinyal itu segera menaikkan harga barang kebutuhan sesuai dengan perhitungan sendiri. Ketika harga BBM dinaikkan secara resmi, pasar menaikkan lagi harganya. Jadi, untuk satu kenaikan harga BBM rakyat memikul beban dua kali. Itu kesalahan prosedur yang fatal.

Belunggu BBM mungkin terlalu sulit dan riskan untuk dihapus serentak. Namun, opsi tentang penghematan tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Semua penghematan BBM yang disuarakan beberapa kali adalah penghematan sebatas omongan belaka. Dalam praktik, tidak dilaksanakan, terutama oleh pemerintah sendiri.

Lalu tentang energi alternatif. Itu juga kebijakan yang tidak jelas skema, sasaran, dan operasionalnya. Rakyat di sejumlah daerah diiming-iming menanam jarak pagar, tetapi tidak jelas akan dijual ke mana dan diproses pabrik apa. Akibatnya, biji jarak membusuk dan rakyat membasmi tanaman jarak karena tidak memberi kontribusi pada kesejahteraan.

Penghematan BBM di sektor transportasi publik juga tidak dilaksanakan. Proyek kereta bawah tanah di Jakarta baru sebatas omongan selama dua dasawarsa. Monorel terancam jadi besi tua.

Belunggu BBM hanya bisa dipatahkan dengan keberanian luar biasa, yaitu tidak ada lagi subsidi BBM dalam perekonomian Indonesia mulai sekarang dan seterusnya. Untuk mematahkan itu diperlukan pemimpin yang juga berani luar biasa.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

PENIMBUNAN BBM

50 Pangkalan Ilegal Disegel Polisi

JAKARTA (MI): Berkaitan dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Polda Metro Jaya menyegel 50 pangkalan ilegal yang diduga kerap menjadi lokasi penimbunan.

Selain itu, Satuan Reserse Sumber Daya Lingkungan (Sumdal-ing) Polda Metro Jaya juga menangkap 51 tersangka dalam operasi sepekan terakhir.

Para tersangka itu ditangkap karena kedapatan menjadi pemilik pangkalan minyak liar, pengoplos, penyelundup BBM, dan pemilik kios bensin eceran.

Kasatserse Sumdaling Polda Metro Jaya AKB Bahagia Dachi di Jakarta, kemarin, mengatakan operasi yang digelar sejak 28 April-4 Mei 2008 itu menyita 20,6 ton minyak tanah, 40,1 ton solar, 1.920 liter premium, dan 8.300 liter residu atau minyak hitam.

Selain itu, disita pula 11 mobil pikap, 4 kapal nelayan, 3 mesin alkon, 2 tangki duduk kapasitas 5.000 liter, serta uang Rp7,7 juta.

Dachi mengungkapkan sebagian besar pangkalan ilegal yang disegel itu sudah ditinggalkan pemiliknya. Namun, di dalamnya

masih terdapat sejumlah peralatan seperti mesin sedot, tangki duduk, dan drum berisi BBM. "Karena kosong, kami tidak menangkap tersangkanya. Kami hanya memasang garis polisi," ujarnya.

Selanjutnya, kata Dachi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Tramtib dan Linmas DKI terkait dengan keberadaan pangkalan liar tersebut.

Panik

Di Bogor, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM membuat sebagian warga Bogor panik karena khawatir BBM akan langka

menjelang kenaikan harga.

Aksi antre membeli BBM jenis bensin pun sudah mulai dilakukan warga. Seperti yang terjadi di SPBU yang terletak di Desa Kota-batu, Ciomas, Kabupaten Bogor, kemarin. Di lokasi SPBU tersebut, ratusan warga yang memiliki berbagai kendaraan, mulai pukul 06.00 WIB telah memadati SPBU untuk memborong bensin.

"Sebelum harganya naik, ya mending beli sekarang. Nanti selain mahal, suka mendadak menghilang," kata Asep, 43, warga Ciomas. **(Bay/DD/J-3)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

Keanggotaan OPEC tak beri manfaat optimal

Oleh RUDI ARIFFIANTO, RATNA ARIYANTI & ERNA S. U. GIRSANG
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Rencana Indonesia untuk keluar dari Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak (OPEC) tidak akan memberi dampak signifikan karena pemerintah selama ini tidak mendapatkan manfaat optimal dari lembaga tersebut.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai selain alasan tidak lagi menjadi negara peng-eksportir minyak neto, Indonesia tidak dapat membeli minyak murah dari sesama anggota.

"Nyatanya pemerintah [Indonesia] malah banyak membeli minyak dan produk turunannya dari negara produsen di luar OPEC, seperti Nigeria atau Malaysia," tuturnya, kemarin.

Menurut dia, Indonesia selama ini juga tidak mendapat jaminan pasokan dari negara anggota OPEC. Atas dasar itu, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk memaksakan diri bertahan di OPEC. "Wujud konkret keuntungan diplomatis itu sampai saat ini tidak dirasakan."

Dengan produksi yang minim, lanjut Pri Agung, Indonesia juga bukan pemegang kendali harga minyak dunia. Negeri yang selalu digambarkan kaya akan sum-

ber energi dan mineral ini pun selalu tidak mampu mencapai kuota produksi yang ditetapkan OPEC.

Produksi minyak mentah Indonesia rata-rata hingga 30 April 2008 masih berkisar di level 979.000 barel per hari. Padahal, untuk konsumsi BBM dalam negeri dibutuhkan tidak kurang dari 1,5 juta barel per hari.

Indonesia sejak awal 2000, bahkan me-

rupakan satu-satunya negara anggota OPEC yang memiliki tingkat konsumsi di atas rata-rata produksi dalam negeri. "Jadi memang sepantasnya kita sadar diri untuk keluar, walaupun kita tidak tahu kapan status layak menjadi anggota kembali bisa diwujudkan," ujarnya.

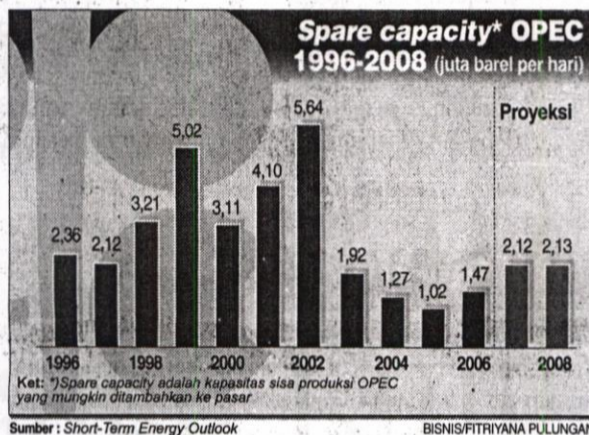
Masih dikaji

Menko Perekonomian Boediono sebelumnya mengatakan produksi minyak dalam negeri saat ini tidak dapat lagi memenuhi semua kebutuhan nasional. Akibatnya, Indonesia bukan lagi negara pengeksportir minyak neto, seperti anggota OPEC lainnya.

Menghadapi kondisi ini, pemerintah, lanjutnya, sedang membahas keuntungan dan dampak negatif jika Indonesia keluar dari OPEC. Pembahasan tersebut termasuk langkah-langkah lanjutan setelah kebijakan itu diambil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro berpendapat opsi untuk mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC masih dikaji lebih lanjut.

Namun, keputusan untuk mengakhiri keanggotaan dipastikan tidak akan diberlakukan tahun ini karena Indonesia telah melunasi iuran keanggotaan OPEC untuk 2008. (rudi.ariffianto@bisnis.co.id/ratna.ariyanti@bisnis.co.id/erna.girsang@bisnis.co.id)



**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Menanti Kenaikan Harga BBM

Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tinggal menunggu waktu. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan pimpinan media massa nasional, Senin (5/5), menegaskan sinyalemen itu dan diperkuat pada rapat kabinet terbatas di hari yang sama. Kini, masyarakat menunggu dengan cemas, kapan, dan berapa besar kenaikannya, serta dampaknya terhadap penghasilan mereka.

Harga minyak dunia, yang kini di kisaran US\$ 110 - 120 per barel, sungguh merepotkan pemerintah. Subsidi BBM yang harus disediakan APBN melonjak hingga mencapai Rp 270 triliun, atau lebih dari seperempat volume belanja APBN. Sangat besar dibandingkan dengan belanja pembangunan, seolah mengunci ruang gerak pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Kita tak bisa mengharapkan perekonomian dapat bergerak, karena APBN tak bisa menjadi stimulus.

Persoalan membengkaknya subsidi BBM bukan perkara baru yang dihadapi pemerintah. Salah satu solusi yang sering dilakukan adalah membatasi subsidi dengan menaikkan harga jual BBM. Cara itu diyakini cukup manjur meredakan tekanan terhadap APBN, setidaknya untuk beberapa saat.

Kebijakan menaikkan harga BBM tentu sangat tidak populis di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih tertatih-tatih. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi di skala rumah menyusul kenaikan harga komoditas pangan.

Namun, secara objektif kita juga harus mengakui bahwa pilihan kebijakan subsidi BBM puluhan tahun telah menjerat masyarakat hingga mengakibatkan inefisiensi dalam pola konsumsi energi nasional. Data menunjukkan, volume konsumsi BBM, terutama untuk sektor transportasi, terus meningkat, sehingga negara terpaksa mengimpor BBM, meskipun Indonesia adalah produsen minyak. Persoalan fundamental lain adalah ketidakmampuan pemerintah (dan Pertamina) menggenjot produksi minyak nasional untuk memenuhi konsumsi domestik serta maju-mundurnya kebijakan diversifikasi energi nasional.

Kini, pilihan untuk segera menaikkan harga BBM telah ditetapkan. Menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan jaring pengaman agar warga miskin tak makin terjerembap ke lembah penderitaan ekonomi.

Tak hanya itu, pemerintah juga wajib menyusun paket kebijakan insentif bagi dunia usaha, sebagai kompensasi dari dampak kenaikan harga BBM. Dengan demikian, sektor riil tidak tenggelam dan tetap bergerak mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dua hal inilah yang menjadi tantangan terbesar pemerintah. Sebab, pengalaman dari kebijakan kenaikan harga BBM sebelumnya jaring pengaman bagi kaum miskin dan kebijakan insentif bagi dunia usaha tak pernah optimal dilaksanakan. Masyarakat dan pengusaha dibiarkan mencari sendiri solusi untuk bisa bertahan hidup.

Adalah wewenang pemerintah untuk menaikkan harga BBM berdasarkan kalkulasi ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, wewenang itu harus dibarengi dengan kebijakan yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat. Sebab, tanpa jaring pengaman bagi warga miskin dan insentif bagi dunia usaha, kenaikan harga BBM akan menciptakan persoalan besar yang semakin menenggelamkan perekonomian nasional.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Soal Harga BBM, Jangan "Grusa-grusu"!

Belakangan gencar berembus isu bahwa pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi (bensin, solar, dan minyak tanah) dengan kalkulasi besaran kenaikan sekitar 28 persen. Meski dalam beberapa kesempatan, pemerintah—yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—menyatakan bahwa tak akan menaikkan harga BBM. Namun, masyarakat tetap diselimuti kecemasan yang luar biasa terkait efek domino yang bakal muncul dari adanya kebijakan tersebut.

Kenaikan harga BBM jelas akan berimplikasi luas pada munculnya efek berganda (*multiplier effect*), seperti fenomena kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan jasa yang lain.

Memang, langkah yang diambil pemerintah memberlakukan penghematan anggaran bagi departemen/lembaga negara tanpa mengurangi efektivitas program, serta berbagai bentuk program hemat energi (listrik dan BBM), jika semua itu bisa tercapai, tentunya sangat bagus.

Tetapi, perlu diingat, jika ternyata opsi penghematan (selain juga konversi energi) ditempuh lebih karena alasan politik, akan jadi lain masalahnya. Semua tentu mafhum, jika dilihat dari kalkulasi politik, kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang sama sekali tidak populis. Kebijakan tersebut bisa menjadi bumerang bagi kepentingan pemilu atau pemilihan presiden tahun depan.

Jika skenario seperti ini yang terjadi, yang ketiban *sampur* adalah pemerintah berikutnya. Ujung-ujungnya, rakyatlah yang akhirnya akan selalu jadi korban. Pasalnya, di kemudian hari, rakyat akan terkena dampak yang luar biasa besar dengan persentase kenaikan harga BBM yang lebih tinggi untuk mengompensasi penundaan sebelumnya. Kebijakan menaikkan harga BBM bukan solusi yang tepat dalam kondisi seperti saat ini. Itu lebih merupakan mencerminkan kebijakan yang *grusa-grusu* dan "cupet akal". Mestinya pemerintah mencari alternatif lain yang bisa diterima semua pihak.

Sulis Styawan

*Mahasiswa FMIPA, Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY)
Depok, Sleman, Yogyakarta*

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

“Lifting” Diusahakan 1 Juta Barel Per Hari

[JAKARTA] Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R Priyono berkomitmen untuk menaikkan *lifting* minyak menjadi satu juta barel per hari pada 2009 dan 2010.

“*Lifting* produksi nasional April ini mencapai 979 barel, pada bulan lalu 977 barel, mudah-mudahan naik terus,” katanya sesuai acara pisah sambut kepala BP Migas di Jakarta, Senin (5/5).

Dikatakan, saat ini BP Migas mempunyai “PR” untuk memajukan kinerja, yaitu dengan meningkatkan produksi minyak sesuai dengan target APBNP. Kemudian mengendalikan *cost recovery* untuk mengurangi opini negatif publik terhadap BP Migas.

Dikatakannya, saat ini BP Migas sedang mengupayakan pengetatan pengawasan terhadap para kontraktor dan melakukan efisiensi *cost recovery*. Namun, yang terutama adalah pengamanan penerimaan negara.

Ditegaskan, jika diketahui terjadi pembengkakan *cost recovery* dan diketahui adanya penyelewengan pada anggaran operasional, BP Migas akan memberikan sanksi kepada kontraktor tersebut.

“Kami akan memberikan teguran kepada mereka,” katanya.

Priyono juga berjanji akan terbuka dalam memberikan *cost recovery* dan rapor produksi para kontraktor. Tugas selanjutnya adalah memangkas birokrasi untuk mempercepat proses industri hulu migas.

Dia berjanji akan mempercepat administrasi operasional. “BP Migas menerima banyak keluhan dari luar berkenaan keterlambatan proses administrasi. Itu tugas saya untuk memotong rantai birokrasinya. Mudah-mudahan setelah reorganisasi terbentuk prosesnya akan lebih cepat,” katanya.

Sementara itu, Dirut Pertamina, EP Trisiwindono mengatakan, agenda Pertamina saat ini adalah mengoptimalkan produksi di sejumlah lapangan minyak, mengoperasikan kembali sumur-sumur lama, dan memperbanyak kondesat dan *enhanced oil recovery*.

Sebelumnya, Deputy President Director Pertamina, Iin Arifin Takhyan mengatakan, *lifting* minyak Pertamina 140.000 barel/hari. Target tahun 2008 akan meningkatkan *lifting* hingga 170.000 barel/hari. [DLS/N-6]

93

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Prediksi

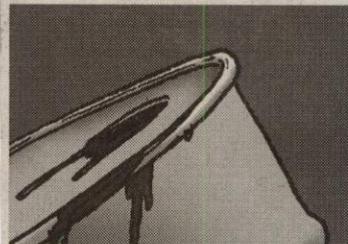
Sentimen Minyak

JAKARTA. Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga patokan menjadi 8,25% tak banyak mengubah posisi nilai tukar rupiah. Hingga pukul 19:00 WIB kemarin (6/5), rupiah berada di Rp 9.215 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat tipis dari Rp 9.220 per dolar AS di hari sebelumnya.

Menurut Frans Darwin Sinurat, Treasuri Bank Century, hal itu terjadi karena pelaku pasar sudah mengantisipasi kenaikan suku bunga tersebut. "Jadi, hampir tidak ada reaksi dari pelaku pasar," katanya, kemarin.

Namun, setelah suku bunga naik, kini, rupiah kembali terancam bahaya. Sebab, kini, pasar mengkhawatirkan kondisi harga minyak yang terus melonjak. Hingga semalam, harga minyak jenis WTI di AS sudah mencapai kisaran US\$ 122 per barel.

Di satu sisi, kenaikan harga minyak memang akan melemahkan posisi dolar AS. Jadi, rupiah bisa menguat. Tapi, menurut Frans, pasar lebih melihat dam-



pak harga minyak terhadap inflasi. Apalagi, pemerintah telah memastikan bakal menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Nilai rupiah mungkin bisa melemah hari ini. Kisaran pergerakannya Rp 9.210 - Rp 9.240 per dolar AS," ujarnya.

Kepala Tresuri Bank BN, Rosady TA Montol juga tak mau terlalu optimistis. Menurutnya, kenaikan harga BBM akan membuat inflasi semakin melejit. Sementara inflasi tinggi adalah momok pergerakan rupiah. Ia memprediksi, hari ini, rupiah akan bergerak antara Rp 9.205 sampai Rp 9.225 per dolar AS. Sekedar catatan, sejak awal tahun, rupiah masih menguat 2,01% terhadap dolar AS.

Avanty Nurdiana

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ **BANTUAN LANGSUNG TUNAI**

Pemerintah Akan Membagi Paket Duit Tunai Plus Bahan Makanan

JAKARTA. Masyarakat miskin boleh berharap bisa selamat dari gebukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah akan kembali membagikan duit bagi mereka sebagai kompensasi kenaikan harga BBM mulai Juni 2008.

Program ini lebih beken bernama Bantuan Tunai Langsung (BLT). Berbeda dengan BLT yang berlaku untuk kompensasi kenaikan BBM pada Oktober 2005, kali ini pemerintah menamakan program ini dengan BLT Plus. Plusnya adalah, selain menerima duit, masyarakat juga akan mendapatkan bahan pangan selain beras.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta mengatakan, pemerintah harus menyediakan dana kompensasi kenaikan harga BBM hingga Rp 35 triliun. Itu dengan asumsi jika kenaikan harga BBM maksimal 30%. "Seluruhnya akan dialokasikan kepada program pengentasan kemiskinan, di antaranya Bantuan

Langsung Tunai (BLT) plus," ungkap Paskah, Selasa (6/5).

Untuk mematangkan program tersebut, saat ini Bappenas bersama Departemen Keuangan dan Departemen Sosial sedang membahas BLT Plus. Mulai dari jumlah dana, sumber duit hingga mekanisme pembagiannya. Maklum, BLT Plus kali ini lebih rumit karena ditambah pula pembagian bahan makanan.

Paskah menjamin, dalam dua pekan mendatang, pemerintah sudah selesai menyiapkan skema BLT Plus dan cara pembagiannya. Sehingga, begitu harga BBM naik, BLT Plus ini bisa langsung berjalan. "Tambahan bahan makanan itu di luar skema beras miskin," tambah menteri dari Partai Golkar ini.

Pemerintah tetap akan menggunakan basis data kemiskinan BPS untuk kenaikan harga BBM pada 2005. Artinya, yang akan menerima jatah BLT Plus ini sekitar 19,1 juta rumah tangga miskin. Jumlah duit yang diberikan kepada setiap rumah tangga miskin pun kemungkinan masih sama, yakni Rp 100.000 per bu-

lan selama setahun.

Cara penyalurannya pun tetap mengandalkan PT Pos Indonesia atau sama dengan mekanisme penyaluran BLT 2005. Mekanisme ini dianggap lebih efektif apalagi PT Pos memiliki jaringan hingga ke seluruh pelosok tanah air.

Cuma, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan berjalan bertahap. Untuk tahap pertama, program BLT Plus 2008 mulai bergulir pada Juni-Desember 2008. "Selanjutnya diteruskan sampai tahun 2009," kata Sri Mulyani.

Tentu, yang krusial dalam pelaksanaannya adalah duit plus paket bahan benar-benar sampai ke masyarakat. Apalagi, data para penerima BLT Plus adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005. Makanya, "Kami sekarang sedang mengkaji data penerima BLT 2005, karena persentase penduduk miskin kan turun, sehingga mungkin penerima BLT Plus juga turun," kata Paskah.

Hans Henricus Benedictus

95

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2008

PGN dan Petross Capai Kesepakatan

Berdasar kesepakatan kedua perusahaan, Petros harus mencicil utang ke PGN hingga lunas pada Desember 2008

Subandang Purwanti

JAKARTA. Sengketa utang piutang pembelian bahan bakar gas untuk busway mendekati titik penyelesaian. PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk., yang memiliki piutang, mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan yang menunggak, yaitu PT Petross Gas. Petross merupakan pemasok gas dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk bus Transjakarta.

"Sudah ada kesepakatan agar Petross membayar dengan cara mencicil mulai Mei ini sampai dengan Desember 2008," kata *General Manager Strategic Business* I Jawa Barat PT PGN Subanendro kepada KONTAN, kemarin. Semula, Petross menol-

ak membayar tunggakan ke PGN sebesar Rp 10,6 miliar dengan alasan tak memiliki dana.

Subanendro menuturkan, kesepakatan baru tercapai pekan lalu, sehingga Petross belum mulai membayar cicilan. Petros masih punya waktu untuk melunasi angsuran pertama hingga akhir bulan Mei ini.

Setelah Petross bersedia mencicil, PGN bersedia tak mengenakan tambahan biaya, entah bunga atau penalti. Namun, Subanendro menolak menyebut besaran cicilan Petross ke PGN dengan alasan lupa.

Ketegangan antara Petross dan PGN sempat memuncak pada Awal April lalu. PGN sempat mengancam menghentikan pasokan Bahan Bakar Gas (BBG) pada 1 April lalu karena Petross tak kunjung membayar

utangnya.

Petross sempat menolak membayar PGN dan menyeret Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, Pemprov

PGN meminta transaksi pembelian BBG berubah menjadi cash and carry.

juga memiliki utang ke Petross senilai Rp 15 miliar. Tagihan ke Pemprov Jakarta berasal dari pembangunan SPBG untuk mengisi bahan bakar Busway. Petross berkilah, dana inilah yang akan mereka alokasikan untuk melunasi utang ke PGN.

"Langkah Petross menyeret Pemprov sangat tak rasional," tukas Subanendro. Namun karena ingin tagihannya lunas, PGN pun bersedia memberikan keringanan pembayaran utang untuk Petross.

Untuk mencegah pembelian BBG berikutnya juga ikut tertunggak, Subanendro meminta transaksi berubah menjadi *cash and carry*. Hingga berita ini turun, Direktur Utama PT Petross Bagus Andika belum memberikan tanggapan atas kesepakatan pelunasan utang itu.

DKI Masih Berhitung

Pemprov sendiri masih belum rampung menghitung ulang utang yang diklaim Petros, yaitu Rp 15 miliar. Kepala Dinas Pertambangan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta, Peni Susanti mengatakan sampai saat ini tim independen dari Pemprov DKI masih bekerja. "Tim masih terus menghitung nilai utang ke Petross untuk investasi SPBG," kata Peni.

Kisruh bermula saat Petross menang tender pembangunan dua SPBG pada 2005. Saat itu, Pemprov meneken perjanjian kerjasama dengan Petross dalam pembangunan SPBG di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Rawa Buaya mulai November 2005.

Dalam perjanjian tersebut, Pemprov punya kewajiban untuk ikut urun investasi senilai Rp 15 miliar. Total nilai investasi menurut Petross sebesar Rp 28 miliar. Petross mengaku investasi itu dibiayai dengan pinjaman bank dan modal sendiri.



KONTAN/Muradi

Mulai bulan Mei ini Petross harus membayar cicilan.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

Rencana Kenaikan Harga BBM Undang Pro Kontra

Kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi sebelum pemerintah menaikkan harga BBM

Edy Can, Antara

SEMARANG. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai memicu beragam reaksi. Ada yang pro dengan keputusan itu, namun lebih banyak kontra.

Nah, ada pula sebagian orang yang hanya bisa pasrah dengan keputusan pemerintah. "Orang seperti saya ini bisa apa kecuali menerima keputusan dari atas," kata Kamari, warga Kedungwining, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, kemarin (6/5).

Sebagian lagi menganggap, kenaikan harga BBM ini bakal menyengsarakan hidup mereka. "Kalau bensin naik otomatis kami pedagang kecil ini akan

terbebani. Sekarang saja sudah sulit untuk berjualan," ujar Rusman, pedagang di Makassar.

Sebaliknya, pemerintah yakin usaha mikro kecil menengah (UMKM) bakal tetap bertahan. "UMKM sebenarnya merupakan komunitas pengusaha yang paling kenyal dan paling bisa beradaptasi," kata Menteri Koperasi dan UMKM Suryadharma Ali.

Harga pangan naik lagi

Banyak pula yang mulai panik dengan rencana pemerintah. Ini terlihat dari antrean panjang di sejumlah pom bensin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Antrean sepeda motor dan mobil terlihat mengular di sebagian besar pompa bensin.

Memang, pemerintah belum memutuskan waktu kenaikan harga BBM. Yang jelas, kini, harga bahan pokok sudah lebih

"Orang seperti saya ini bisa apa kecuali menerima keputusan dari atas," katanya.

dulu naik. Harga bahan pokok bahkan sudah mencuri start sebelum pemerintah menaikkan harga BBM.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, kenaikan harga bahan po-

kok ini bahkan sudah terjadi sejak sepekan lalu. Kisarannya 5% hingga 10%.

Contohnya, harga minyak goreng curah yang sebelumnya sempat turun kini mulai beranjak tinggi lagi, dari Rp 11.000 seliter menjadi Rp 12.000 seliter Cabe kecil yang pekan lalu hanya Rp 10.000 sekilo kini melambung menjadi Rp 15.000 per kilogram (kg). Begitu pula dengan harga telur ayam yang beringsut dari Rp 23.000 per rak menjadi Rp 26.000 per rak.

Pemerintah Kota Makassar terpaksa turun ke lapangan untuk meredam gejolak harga makanan ini. Mereka mengimbau agar para pedagang tidak menimbun stok bahan pangan. "Jangan berspekulasi dengan me-

nimbun stok agar suplai barang ke pasar tetap lancar untuk mencegah terjadinya gejolak harga," kata Ilham Arif Sirajudin, Walikota Makassar.

Kenaikan harga bahan pangan juga terjadi di Banjarmasin. Harga minyak goreng curah kuning yang sebelumnya Rp 9.800 per liter kini merangkak naik menjadi Rp 10.000 per liter.

Minyak goreng curah putih juga naik dari sebelumnya Rp 12.250 per liter menjadi Rp 12.650 per liter, daging sapi yang sebelumnya harga stabil Rp 58.000 per kilo naik menjadi Rp 59.000 per kilo. Harga daging ayam juga melonjak tajam dengan kenaikan mencapai 18,75% dari sebelumnya Rp 20.000 per kg menjadi Rp 23.750 per kg.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8.2

TAHUN 2008

Rencana Indonesia Keluar dari OPEC Mencuat

Pemerintah belum membuat kajian untung-ruginya.

JAKARTA — Pemerintah mempertimbangkan untuk keluar dari keanggotaan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Alasannya, Indonesia saat ini bukan lagi negara *net exporter* minyak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan hasil rapat terbatas kabinet membahas soal keanggotaan Indonesia di OPEC. "Apakah masih tetap (sebagai anggota) atau tidak," ujarnya kemarin.

Yudhoyono menjelaskan Indonesia saat ini bukan bukan lagi *net exporter* minyak. Minyak yang diimpor lebih banyak daripada yang diekspor. "Apalagi produksi minyak kita sekarang semakin turun," katanya.

Menurut dia, keputusan keluar dari OPEC atau tidak setelah melihat rencana kenaikan produksi minyak nasional pada tahun ini. "Produksi minyak saat ini di bawah satu juta barel," katanya. Pemerintah berencana menaikkan produksi minyak menjadi satu juta barel per hari dari target APBN sebesar 927 ribu barel.

Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan pembahasan keluar atau tidak dari OPEC masih merupakan wacana. Menurut dia, pemerintah belum membuat kajian secara mendalam mengenai rencana tersebut. "Masih *fresh*

from the oven, jadi kami masih mengkajinya," ujarnya.

Menurut Purnomo, Indonesia pada tahun ini tidak akan keluar dari OPEC karena telah membayar iuran keanggotaan. Menurut dia, wacana keluar atau tidak dari OPEC bukan karena penurunan produksi minyak nasional.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Muhammad S. Hidayat menyatakan dukungannya Indonesia keluar dari OPEC. "OPEC organisasi pengekspor. Kalau tidak ekspor, kan *diketawain*, jadi wajar saja kalau Indonesia keluar dari keanggotaan," katanya.

Pengamat perminyakan Kurtubi menyatakan hal yang sama. Menurut dia, kepentingan Indonesia berbeda dengan anggota OPEC lainnya. Indonesia dinilai telah gagal

mempertahankan produksi minyaknya.

Kurtubi mengungkapkan, produksi minyak mentah hanya 927 ribu barel per hari, padahal konsumsi bahan bakar minyak mencapai 1,4 juta barel per hari. Dia menambahkan, selama delapan tahun terakhir produksi minyak nasional anjlok. Padahal sumber minyak di perut bumi Indonesia sekitar 80 miliar barel. "Ini kondisi tragis," ujarnya kepada *Tempo*.

Anggota Komisi Energi, Tjatur Sapto Edy, menolak rencana pemerintah keluar dari OPEC. Dia menilai Indonesia mendapat banyak manfaat dari keanggotaannya. "Kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi dan kajian strategis soal perminyakan dunia," katanya.

● ALI NUR YASIN | NININ DAMAYANTI | AGUS SUPRIYANTO



HASAN SARBAKSHIAN (AP)

Fakta Produksi, Ekspor, dan Impor Minyak Nasional

Produksi minyak mentah dan kondensat:

927 ribu barel per hari

Produksi minyak diolah kilang Pertamina:

600 ribu barel per hari

Ekspor minyak mentah: 347 ribu barel per hari

Impor minyak mentah: 302 ribu barel per hari

Impor bahan bakar minyak: 550 ribu barel per hari

Manfaat Menjadi Anggota OPEC

- Mendapat informasi data tentang kebutuhan dan pasokan minyak dunia.
- Kerja sama dengan anggota OPEC untuk mengamankan stok bahan bakar.
- Kerja sama ekonomi dan politik dengan negara anggota lainnya.

Faktor yang Tidak Mendukung Sebagai Anggota OPEC

- Indonesia bukan lagi *net exporter* minyak (impor lebih dari besar ekspor)
- Produksi minyak Indonesia terus menurun (dari 1,2 juta barel pada 2002 menjadi 950 ribu barel pada 2007)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: R.2

TAHUN 2008

Industri kecil tertekan kenaikan harga BBM

Oleh ENDOT BRILLIANTONO
& MOH. FATKHUL MASKUR
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Industri kecil dinilai paling terkena tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di Jateng, sedikitnya 10% industri mebel terancam gulung tikar, sementara itu lembaga keuangan mikro memperketat penyaluran pinjaman.

Pemerintah memastikan memilih menaikkan harga BBM untuk mengamankan anggaran 2008 dan 2009. Keputusan ini diambil pada sidang kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Kepresidenan, Senin.

Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jateng Anggoro Ratmadiputro mengatakan kenaikan BBM merupakan 20%-30% dari komponen biaya produksi dari industri permebelan dan kerajinan kayu. "Jadi kalau BBM naik kami sangat terpukul," katanya kepada *Bisnis* kemarin.

Asmindo mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana kenaikan BBM, paling tidak menunda sampai industri mebel siap.

Kalaupun terpaksa naik, dia mengusulkan tidak lebih dari 10% - 15%, sehingga pengusaha dan perajin masih bisa mengambil margin meskipun sangat kecil. Kalau kenaikan BBM lebih dari itu dunia usaha bakal berguguran, termasuk industri mebel dan kerajinan kayu.

Saat ini jumlah anggota Asmindo Jateng mencapai 900 unit usaha, meskipun masih beroperasi tapi kondisinya pas-pasan. Umumnya, industri mebel di Indonesia beroperasi hanya untuk mempertahankan hidup saja.

Dari jumlah sebanyak itu paling sedikit 10% di antaranya diperkirakan bakal gulung tikar jika pemerintah tetap menerapkan kebijakan kenaikan harga BBM.

Dia menyebutkan jumlah usaha yang terancam bangkrut bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Itu pun belum termasuk industri mebel dan kerajinan di luar anggota Asmindo.

Menurut data Bank Indonesia (BI) Sema-

rang, saat ini terdapat 92.386 unit usaha mebel di Jateng. Sentra lokasi industri ini ada di Jepara, Klaten, Sukoharjo, Surakarta, Blora, dan Semarang.

Ekspor mebel Jateng pada 2006 sebesar US\$574,04 juta atau turun 13% dari tahun sebelumnya yang tercatat US\$664,81 juta. Menurut Anggoro, pada 2007 ini nilai ekspor mebel Jateng tidak beranjak dari tahun sebelumnya. Jadi, kenaikan BBM pasti memengaruhi kinerja produksi dan ekspor mebel dalam negeri, khususnya Jateng.

Menurut dia, pengaruh terbesar adalah pada daya saing produk di pasar lokal dan pasar internasional. Anggoro mengatakan adanya kecenderungan kenaikan harga BBM selalu diikuti peningkatan harga semua komoditas, termasuk bahan baku dan sejumlah barang kebutuhan lain yang nilainya sama dengan BBM.

Risiko kredit

Direktur Induk Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wattanwil (Inkopsyah - BMT) Widji Trikusuma Adhi mengatakan manajemen koperasi sekunder ini mulai memperketat penyaluran pembiayaan, seiring dengan perhitungan risiko yang makin besar.

"Kami akan selektif untuk merekomendasikan penerbit surat utang. Apalagi ini *kan*, yang disalurkan itu sebagian dana utang, termasuk utang dari pemerintah," ujarnya, baru-baru ini.

Menyikapi rencana kenaikan harga BBM, Ketua Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid mengatakan akan mengkaji kemungkinan penurunan kredit dan rasio kredit terhadap dana 85% menjadi 70% seiring dengan kenaikan harga BBM.

Hal ini karena usaha kecil dan menengah (UKM) yang pertama kena imbasnya. "Masih kita kaji, kemungkinan penurun penyaluran kredit pasti ada," ujarnya kepada *Bisnis*.

Pada 2007, pinjaman yang disalurkan koperasi ini mencapai Rp910,4 miliar, dengan perincian pinjaman kurang dari Rp150 juta sebanyak 45%, dan pinjaman lebih dari Rp150 juta sebanyak 55%. (endot.brilliantono@bisnis.co.id/fatkul.maskur@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2008

■ DAMPAK HARGA BBM NAIK

Pengusaha Pelayaran Surabaya

Akan Menaikkan Tarif

SURABAYA. Efek domino kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai muncul. Pengusaha pelayaran di Surabaya, Jawa Timur, misalnya, mengaku akan menaikkan tarif pelayaran (*freight*).

Rencana ini muncul setelah pemerintah resmi menyatakan akan menaikkan harga BBM, pada Senin (5/5). Namun, para pengusaha belum memastikan persentase kenaikannya. Asosiasi Pengusaha Kapal Indonesia atau Indonesian Shipowner Association (INSA) Surabaya masih menghitung jumlah kenaikannya.

Kemungkinan, kenaikan ong-

kos pelayaran tak lebih besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 30%. "Naik itu pasti. Tapi, besarnya berapa, kami masih melihat perkembangan," kata Ketua INSA Tanjung Perak Surabaya, Prabowo Budhy Santoso, kemarin (6/5).

Pengusaha pelayaran dari Surabaya perlu menaikkan tarif sebab porsi biaya BBM mencapai 30%. Akibatnya tarif pelayaran mau tidak mau harus naik. "Kenaikan itu akan kami lakukan secara perlahan-lahan. Apalagi, kami juga sudah melakukan kontrak dan harus dilaksanakan," tambah Prabowo.

Saat ini persentase kenaikan

tarif pelayaran masih dihitung menyesuaikan dengan harga minyak dunia. Namun INSA

Tarif pelayaran baru nanti mungkin di bawah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Tanjung Perak berjanji akan menekankan efisiensi biaya sehingga kenaikan tarif tidak terlampau tinggi. "Penghitungan itu termasuk kemungkinan me-

nekan tingkat keuntungan sehingga kenaikan tarif tidak terlalu besar dan ekspor tetap berjalan," katanya.

Kalangan eksportir Jawa Timur memaklumi rencana kenaikan ini, asal naiknya tidak terlalu tinggi. Dengan begitu, eksportir tidak semakin membebani tarif angkutan. "Kalau naik, jangan terlalu tinggi agar ekspor juga tetap bergairah," kata Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim Isdarmawan Asrikan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Surabaya Wastomi Suheri menyatakan, rencana kenaikan harga BBM akan se-

makin memukul usaha angkutan. Alasannya, kenaikan harga BBM pada 2005 lalu masih berdampak pada penurunan jumlah penumpang yang saat itu mencapai 50%.

Dalam kondisi seperti saat ini Organda cukup sulit untuk menaikkan tarif. Jika tarif angkutan naik, jumlah penumpang akan semakin merosot. Namun jika tarif tidak naik, pengusaha angkutan menjadi terpuruk. Pengusaha angkutan di Surabaya masih menimbang tarif baru setelah BBM naik. "Kami hitung dulu," kata Wastomi.

Umar Idris, Antara

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : A.4

TAHUN 2008

Harga BBM Naik Maksimal 30 Persen

Orang miskin akan
mendapat bantuan
tunai plus.

JAKARTA — Pemerintah hanya akan menaikkan harga bahan bakar minyak maksimal 30 persen tiga pekan lagi. Sebagai kompensasinya, pemerintah akan mengguyurkan bantuan langsung tunai bagi kaum miskin Rp 100 ribu per keluarga.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta mengungkapkan ada tiga skenario kenaikan harga BBM, yakni 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. "Kenaikannya maksimal 30 persen, tidak boleh lebih," kata Paskah di Jakarta kemarin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin juga menyatakan harga BBM akan dinaikkan sekitar 30 persen. Ini adalah ketiga kalinya pemerintah Yudhoyono-Kalla menaikkan harga BBM. Kenaikan pertama pada Maret 2005 sebesar 30 persen,

dan kedua pada Oktober 2005 sebesar 126 persen.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, pemerintah belum memutuskan apakah kenaikan kali ini akan dilakukan bertahap atau sekaligus 30 persen. Namun, Ketua Kamar Dagang dan Industri M.S. Hidayat meminta kenaikan harga BBM dilakukan sekaligus 30 persen agar ada kepastian bagi dunia usaha.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin mengaku akhirnya memutuskan kenaikan harga BBM karena khawatir anggaran negara jebol oleh lonjakan subsidi BBM dari semula Rp 126 triliun. Pembengkakan terjadi lantaran harga minyak dunia terus melambung hingga tembus US\$ 120 per barel pada transaksi kemarin.

Kalla mengakui kenaikan harga BBM disambut demon-

strasi menolak keputusan itu. Pada kenaikan pertama, demo berlangsung dua minggu. Sedangkan pada kenaikan kedua, demo cuma seminggu meski BBM naik sangat tinggi. "Itu terjadi karena ada kompensasi bagi kaum miskin. Yang sekarang, kompensasinya jauh lebih besar," kata Kalla.

Presiden Yudhoyono pun menjamin bantuan langsung tunai (BLT) kali ini akan lebih baik dibanding program sejenis sebelumnya. "Ini BLT plus. Plusnya banyak. Nanti akan saya sampaikan," ujarnya.

Menurut Kalla, sebanyak 19,1 juta keluarga miskin akan mendapat bantuan tunai Rp 19 triliun. Adapun target keputusan ini memang orang mampu yang suka membeli BBM subsidi. "Masak, naik Mercedes atau Volvo beli bensin murah. Bayar mahal, dong."

Kompensasi itu akan diambil dari penghematan subsidi Rp 35 triliun akibat kenaikan harga 30 persen. Separuh dari subsidi yang dihemat, kata Kalla, akan digunakan untuk perlindungan kaum miskin. Separuhnya lagi untuk mengurangi defisit anggaran, yang bisa mencapai 2,1 persen dari produk domestik bruto.

Penjelasan berbeda datang dari Paskah. Menurut dia, seluruh penghematan akan disalurkan untuk pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. "Jadi, tidak ada satu sen pun untuk belanja."

Namun, Ketua DPR Agung Laksono tidak yakin kompensasi akan membantu orang miskin. "Sejak awal saya tidak setuju. Sebab, kalau harga dinaikkan, berarti beban beralih ke rakyat."

● AGUS SUPRIYANTO | ANTON APRIANTO | NININ DAMAYANTI | DWI RIYANTO AGUSTIAR | HERI

Berpihak pada Orang Kaya

Ada 1.001 alasan subsidi bahan bakar minyak harus dikurangi atau bahkan dihapus. Salah satunya unsur keadilan. Selama bertahun-tahun pemberian subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang-orang mampu, bahkan kaya, misalnya pemilik mobil, ketimbang rakyat miskin. Dari Rp 126 triliun uang subsidi BBM, masyarakat miskin cuma menikmati secuil. Triliunan duit subsidi itu hanya jadi asap belaka.



KETIDAKADILAN SUBSIDI BBM VERSI BANK DUNIA (2004)

Subsidi yang Dinikmati	(Rp/tahun)
Masyarakat berpenghasilan rendah	72.500
Masyarakat berpenghasilan menengah-tinggi	393.000

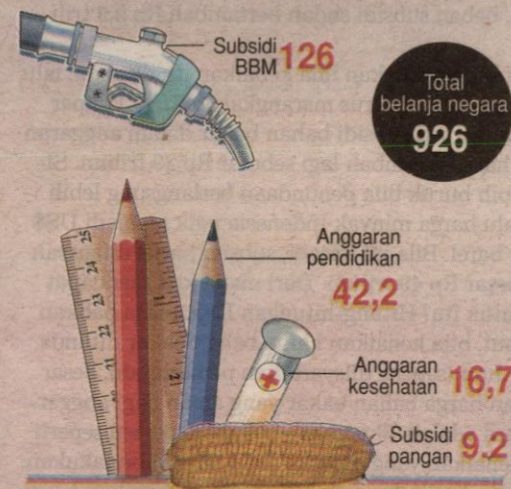
KONSUMSI BBM (%)

Masyarakat berpenghasilan rendah	6
Masyarakat berpenghasilan menengah-tinggi	94

KONSUMSI MINYAK TANAH (%)

Masyarakat berpenghasilan rendah	10
Masyarakat berpenghasilan menengah	35
Masyarakat berpenghasilan tinggi	55

APBN 2008 LEBIH SUKA MENSUBSIDI PEMILIK MOBIL (Rp/triliun)



**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8.5

TAHUN 2008

Kenaikan Harga BBM Sentimen Positif bagi Indeks Saham

Indeks Juni bisa
mencapai
2.700-2.900.

JAKARTA — Kalangan ekonom menilai langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan memberi sentimen positif bagi pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia.

Kepala ekonom dari Institut Riset Danareksa, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kenaikan harga BBM membuat investor di pasar modal, terutama asing, akan lebih yakin terhadap kemampuan

anggaran pemerintah. "Dampaknya, mereka akan mau menanamkan modalnya di sini," katanya kemarin.

Dia mengatakan kenaikan harga BBM secara drastis pada akhir 2005, dengan rata-rata 70 persen, telah memberi sinyal positif sehingga indeks BEI pada 2006 terus naik, meskipun pada saat itu kondisi ekonomi mengalami perlambatan dan tingkat inflasi relatif tinggi.

Purbaya menilai jatuhnya indeks harga saham gabungan (IHSG) beberapa waktu lalu karena investor tak yakin dengan kemampuan anggaran negara menghadapi tingginya harga minyak dunia. Tak hanya saham, pasar obligasi negara pun jatuh.

"Sebelum pengumuman harga BBM akan naik, indeks jatuh karena investor asing yakin APBN akan runtuh. Kenaikan harga BBM justru akan

mengembalikan kepercayaan investor asing. Ini bagus bagi pasar modal Indonesia," katanya. Dampak yang sama akan terlihat di pasar finansial.

Investor asing selama ini masih menjadi motor bagi pasar modal Indonesia. Purbaya mengingatkan, sangat berbahaya bila investor asing lari dari BEI, karena akan membuat IHSG anjlok tajam dan sulit untuk pulih.

Analisis PT Sarijaya Securi-

ties, Zulfiyan Alamsyah, juga menilai pelaku pasar optimis kenaikan harga BBM bisa memicu sentimen positif. "Investor asing jadi memiliki kepastian tentang APBN kita."

Ia menjelaskan kenaikan harga BBM dapat mengurangi defisit anggaran. Selain itu, subsidi BBM bisa dialokasikan untuk kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia. "Dengan begitu, kegiatan ekonomi pun dapat berjalan."

Hal itu akan memacu kinerja perusahaan di Indonesia. Menurut dia, kinerja emiten akan semakin baik, dan sektor pertambangan dan perkebunan akan terus menjadi penopang indeks. "Indeks bisa menyentuh 3.000 hingga akhir tahun," katanya.

Adapun Purbaya mengatakan IHSG pada Maret sudah terkoreksi cukup tajam dan baru mulai *rebound* pada April. ● ARI ASTRI YUNITA | SORTA TOBING

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : R.8

TAHUN 2008

'Antisipasi kenaikan harga BBM'

Oleh NURUDIN ABDULLAH
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kadin Jaya meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memasukkan perhitungannya dalam revisi APBD 2008.

Kadin mendesak agar dalam revisi itu pemprov menambah bobot prioritas pada proyek-proyek infrastruktur, mengoptimalkan subsidi sosial, dan menunda rencana kenaikan tarif baik pajak maupun nonpajak.

"Kalau tidak cepat merevisi anggaran, dengan dampak kenaikan BBM, pembangunan di Jakarta akan mandek akibat kenaikan harga barang yang semakin tinggi," ujar Ketua Umum DPD Kadin DKI Jakarta (Kadin Jaya) A. Sofian Pane di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan skenario, jika kenaikan harga BBM 10%-30% maka harga premium dari harga semula Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter, solar Rp4.300 per liter jadi Rp5.500 per liter dan minyak tanah Rp2.000 per liter jadi Rp2.500 per liter.

Sofian menegaskan apabila pemprov terlambat mengantisipasi kenaikan tersebut, dampak inflatoar yang ditimbulkannya akan menjadi lebih parah. "Perlambatan perekonomian Jakarta akan menyebabkan perlambatan di daerah-daerah lainnya," katanya.

Tunda kenaikan

Momentum revisi APBD ha-

rus diarahkan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga BBM terutama di sektor yang selama ini mendominasi perekonomian Jakarta, yakni sektor perdagangan dan jasa.

"Ini sebabnya, percepatan pembangunan infrastruktur harus digenjot. Ini penting supaya kenaikan harga pokok produksi sampai harga jual produk yang dihasilkan yang akan naik bisa sedikit berkurang," katanya.

Sofian mengatakan selain melakukan revisi anggaran, dia menyarankan agar pemprov menunda semua rencana menaikkan tarif baik retribusi maupun pajak berikut tarif nonpajak dan retribusi yang dapat memberatkan biaya produksi.

Sebab, kenaikan tarif, misalnya tarif air bersih, tarif angkutan umum, tarif parkir dan jenis tarif lain untuk kegiatan usaha, akan berdampak menurunkan daya saing produk dan menekan daya beli warga.

"Sekarang ini situasinya serbasusah, biaya produksi semakin tinggi sementara daya beli masyarakat cenderung terus menurun. Rencana kenaikan harga BBM ini harus diperhatikan, tunda dulu kenaikan tarif-tarif yang lain," katanya.

Sejalan dengan itu, dia menegaskan, pemprov perlu menimbang rencana menaikkan upah minimum regional. Dia menilai ini bukan waktu yang tepat karena situasi itu akan membuat dunia usaha semakin tertekan.

103

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2008

■ PRODUKSI MINYAK TURUN

Indonesia Berniat Keluar dari OPEC

JAKARTA. Pemerintah Indonesia akhirnya menyadari bahwa sesungguhnya kita tak layak lagi menjadi anggota negara-negara pengekspor minyak alias Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Karena sejak tahun 2000 lalu impor minyak mentah Indonesia sudah lebih besar ketimbang ekspor.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, rencana Indonesia mundur dari OPEC ini lantaran saat ini Indonesia sudah murni menjadi negara pengimpor minyak atau istilahnya *nett oil importer*. "Karena itu kami berpikiran untuk sementara mengundurkan diri dari OPEC sambil meningkatkan produksi minyak sehingga pantas menjadi anggota OPEC lagi," kata Presiden saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2008, Selasa (6/5).

Maklum produksi minyak mentah Indonesia terus merosot dalam beberapa tahun terakhir. Kalau sebelumnya bisa melampaui 1 juta barel per hari, kini produksi cuma bisa mencapai

927.000 barel per hari.

Presiden menyatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan produksi dari sumur-sumur minyak tua, sembari mendorong investasi di bidang pertambangan. "Tapi butuh waktu satu hingga tiga tahun ke depan," lanjut SBY.

Jika itu yang diinginkan, Ketua Umum Kadin MS Hidayat menyarankan agar pemerintah memperluas investasi di bidang pertambangan dan memberikan insentif pajak. Dengan begitu, para kontraktor migas terpacu menggenjot produksi.

Menteri ESDM Purnomo Yudiantoro mengakui rencana keluar dari OPEC ini mengemuka dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Senin (5/5). Dalam rapat tersebut pemerintah tidak hanya membahas opsi kenaikan harga BBM tetapi juga rencana untuk keluar dari OPEC. "Tapi tidak tahun ini, karena sudah terlanjur bayar iuran keanggotaan," kata mantan Sekretaris Jenderal OPEC itu.

Yohan Rubyantoro

109

Indonesia Keluar dari OPEC



KONTAN/Muradi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berpidato di depan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta, kemarin (6/5). Dalam sambutannya Presiden mengatakan pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk keluar dari Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau organisasi eksportir minyak. Sebab, secara neto Indonesia sudah lama menjadi negara pengimpor minyak.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2008

Kontrak Bagi Hasil Migas Rugikan Pemerintah

[JAKARTA] Dalam beberapa kontrak bagi hasil minyak dan gas (migas) selama ini, sering kali Pemerintah Indonesia rela kehilangan bagiannya hanya untuk menarik investor. Seperti kasus kontrak bagi hasil dengan Exxon Mobil di Blok Natuna D Alpha dengan pola bagi hasil Indonesia nol persen, Exxon 100 persen.

Kasus lainnya adalah pada Blok A Aceh. Pemerintah telah menyetujui usulan kontraktor untuk perubahan pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor dari 65:35 menjadi 51:49. Padahal, standarisasi pola bagi hasil yang ditetapkan adalah 85:15 untuk minyak dan gas 70:30.

Hal itu dikritik oleh para ekonom, yang menganggap pemerintah melakukan berbagai kesalahan. Akibatnya, kekayaan migas Indonesia terlalu didominasi oleh perusahaan minyak asing.

"Pembagian 65:35 di Blok A Aceh adalah kesalahan besar. Seharusnya, dipatok 85:15 agar Indonesia untung," kata ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance Indonesia (Indef) Imam Sugema kepada SP, Minggu (4/5), di Jakarta.

Hal senada juga dikatakan, ekonom dari Bank Mandiri, Martin Panggabean. Dia menyesalkan kebijakan yang mengurus kekayaan migas Indonesia itu, yang terlalu didominasi oleh perusahaan minyak asing. "Indonesia tidak diuntungkan dengan kontrak bagi hasil masa kepemimpinan

an Orde Baru. Seharusnya, ada renegotiasi kontrak kerja sama dengan perusahaan asing," katanya.

Pemerintah lanjut Martin, harus tegas pada para kontraktor asing dalam kontrak pembagian hasil produksi. "Tidak seharusnya kontraktor mendapat persentase bagi hasil yang besar," kata Martin.

Saat ini, 80 persen produksi minyak nasional berasal dari kontraktor perusahaan asing dan 20 persen dari perusahaan nasional. Indonesia mengandalkan produksi dari 10 dari 55 kontraktor, yaitu Chevron Pasific Indonesia, (CPI), PT Pertamina EP, ConocoPhillips SNSB, Inpex, China Nasional Offshore Oil Corporation (CNOOC), Total Indonesia, Medco EP Rimai, BP, BOB CPP, dan Pertamina Hulu-PPI/JOA-JOB.

Sebelumnya, Kepala BP Migas yang baru, R. Priyono kepada SP se usai pelantikan dirinya, Selasa (29/4) menyatakan, renegotiasi kontrak tidak menjadi agenda kepemimpinannya. "Kami harus menghormati kontrak yang telah ada," ujar Priyono.

Transparan

Sementara itu, Pantoro Kuswardono dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan pengamat perminyakan, Kurtubi mengatakan, perlunya transparansi pada kontrak bagi hasil agar semua pihak dapat mengontrol dan menghindari terjadinya penyelewengan.

Kontrak bagi hasil produk-

si (*contract production sharing*) dianggap sebagai rahasia negara. Ada 150 lebih blok minyak di Indonesia dengan karakteristik kontrak bagi hasil yang bervariasi. "Seharusnya, ada transparansi sehingga kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki dari kontrak tersebut," katanya.

Kurtubi pun mengatakan hal yang sama. Dia menegaskan, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BP Migas), yang bertindak sebagai pengendalian dan pengawasan produksi migas nasional, harus terbuka terkait dengan kontrak kerja sama dengan kontraktor termasuk dalam hasil produksi, kontrak bagi hasil dan biaya-biaya operasional dan investasi (*cost recovery*).

Kurtubi mengkritik kinerja BP Migas yang tidak bagus. Dikatakan, *cost recovery* tidak dikontrol secara efektif oleh BP Migas sehingga membengkak luar biasa, sementara produksi migas anjlok.

Ketidakberesan pengelolaan BP Migas, terbukti dari hasil audit BPK dan BPKP atas laporan keuangan BP Migas pada 2006, yang mengungkapkan adanya kerugian negara sebesar US\$ 2,3 miliar.

"Ada pengeluaran yang bukan biaya operasional dimasukkan ke *cost recovery*, seperti sumbangan untuk tsunami dan sumbangan pembangunan sekolah-sekolah internasional. Seharusnya, sumbangan itu ditanggung oleh perusahaan kontraktor migas tersebut," paparnya. [DLS/N-6]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEL JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

3 Pekan lagi harga BBM dinaikkan

Oleh RUDI ARIFFIANTO & LUTFI ZAENUDIN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam tiga pekan mendatang setelah menuntaskan evaluasi jumlah bantuan langsung tunai (BLT) kepada 19,1 juta rumah tangga miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada tiga pilihan kenaikan harga rata-rata BBM bersubsidi, yaitu 20%, 25%, dan 30%. Namun, angka pasti kenaikan tersebut masih dihitung.

"Opsinya kenaikan harga BBM akan diambil setelah kebutuhan BLT diketahui, yang diperkirakan Rp2 triliun per bulan," tuturnya kepada pers, tadi malam.

Apabila kenaikan harga BBM ditetapkan 30%, menurut Menkeu, laju inflasi bulanan (*month-to-month*) pada bulan pertama sejak keputusan akan mencapai 2,7%, bulan kedua diperkirakan turun 0,4%, dan bulan selanjutnya 0,35%.

Tingkat inflasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga secara umum yang terjadi pada 2005 untuk periode yang sama, masing-masing 1,91%, 0,34%, dan 0,21%.

"Inflasi yang lebih tinggi tersebut disebabkan oleh adanya faktor penekan tambahan, yaitu kenaikan harga komoditas pangan."

Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani menyebutkan asumsi dasar makroekonomi dalam APBN-P 2008 yang disahkan pemerintah dan DPR pada awal April berpotensi diubah lagi. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia.

Tekanan eksternal itu akibat perlambatan pertumbuhan perekonomian global, lonjakan harga minyak mentah dunia, dan kenaikan harga komoditas pangan yang tak kunjung reda.

Kendati meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2008 akan berada di atas 6,3%, Menkeu mengingatkan tingginya harga komoditas pangan di pasar global sangat berpo-

**Perkembangan
asumsi dasar
makro ekonomi
2007 - 2008**

"[Revisi tiga kali] Itu situasi normal hampir di semua negara dan perekonomian Indonesia akan direvisi untuk ketiga kalinya."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati



	Realisasi 2007	APBN 2008	RAPBN-P 2008	APBN-P 2008	Rencana revisi APBN-P 2008
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,3	6,8	6,4	6,4	6
Tingkat inflasi (%)	6,59	6,0	6,5	6,5	8,5-9,5
Rata-rata nilai tukar rupiah (Rp/US\$)	9.140	9.100	9.150	9.100	9.000-9.100
Suku bunga SBI-3 bulan (%)	8,04	7,5	7,5	7,5	8,5-9,5
Harga minyak ICP (US\$/Barel)	72,31	60,0	83,0	95	110
Lifting minyak (Juta Barel/Hari)	0,899	1,034	0,910	0,927	0,975
Defisit	1,3%	1,6%	1,9%	2,1%	1,8%-2,0%

Sumber : Departemen Keuangan, diolah

BISNISDENNY IRAWAN

tensi memukul daya beli masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan pada tiga bulan berikutnya dapat tertekan.

"Kalau itu berlangsung agak lama, karena harga komoditas dan harga minyak tidak akan turun pada tahun ini, proyeksi [pertumbuhan ekonomi] 2008 akan mencapai 6%. Itu kami anggap sebagai proyeksi moderat," katanya di hadapan peserta musyawarah perencanaan pembangu-

nan nasional 2009.

Menkeu memaparkan dampak perlambatan itu akan memengaruhi sejumlah proyeksi asumsi makroekonomi lain. Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat menjadi 6% PDB, inflasi diprediksi melonjak 8,5%-9,5% dan SBI 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran yang sama.

Ajukan ke DPR

Usulan perubahan yang akan dikonsultasikan kepada DPR itu juga meliputi besaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah (*Indonesian crude oil*), *lifting* minyak, dan defisit anggaran. (*Lihat grafis*)

Skenario besaran asumsi dasar itu disampaikan pemerintah kepada DPR secepat mungkin. Ketika menjawab pertanyaan mengenai apakah dilakukan sebelum Juni, Sri Mulyani mengatakan, "Insya Allah."

Chief Economist BNI Tony Prasetyantono menilai proyeksi asumsi dasar makroekonomi itu cukup realistis. "Kali ini saya sependapat dengan angka-angka Depkeu," tuturnya

kepada *Bisnis*.

Namun, ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indonesia Aviliani mempertanyakan besaran inflasi yang diproyeksikan Menkeu. Dengan kondisi saat ini, menurutnya, laju inflasi 2008 akan berada pada level 8%-9% tanpa memerhatikan dampak kenaikan harga BBM.

Meneg PPN/Paskah Suzetta mengakui kenaikan harga BBM akan memperlambat daya beli masyarakat, sehingga instansinya, Depkeu, dan Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat menyusun kebijakan BLT.

Paskah menjamin penyaluran BLT plus akan tepat sasaran dan bersih dari praktik korupsi jika harga BBM dinaikkan. "Ekses penyimpangan BLT hanya 0,001%. Kami sudah antisipasi untuk ini. BLT tidak ada korupsi. *Clear* semua."

Menurut rencana, Kemeneg PPN/Bappenas, Depkeu, dan Depsos akan merumuskan strategi penyaluran BLT dalam dua minggu ke depan.

Paskah menjelaskan tidak tertutup kemungkinan besarnya BLT sama dengan pada 2005, yaitu 25% dari kenaikan BBM atau Rp100.000 per kepala keluarga.

Data penerima BLT masih menggunakan perhitungan BPS sebelumnya, yaitu sebanyak 19,1 juta keluarga miskin. "Data tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, meski perlu sedikit pembaruan." (16/11/RATNA ARIYANTI/ERNA S.U. GIRSANG/AHMAD MUHIBBUDDIN/JOHN ANDHI OKTAVERI) (*rudi.ariffianto@bisnis.co.id/tutfi.zaenudin@bisnis.co.id*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

KRISIS ENERGI

Presiden: Indonesia Pertimbangkan Keluar dari OPEC

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tengah mempertimbangkan apakah Indonesia akan tetap menjadi anggota negara-negara peng ekspor minyak (OPEC) atau akan keluar dari organisasi tersebut.

Alasannya, produksi minyak Indonesia cenderung terus menurun. Presiden Yudhoyono menyampaikan hal itu saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2008 di Jakarta, Selasa (6/5).

Menurut Presiden, rencana itu dibahas dalam rapat terbatas mengenai subsidi bahan bakar minyak sehari sebelumnya.

"Apakah kita akan tetap di situ (OPEC) atau justru tidak, sambil kita tingkatkan produksi dalam

negeri. Hal ini mengingat produksi minyak kita yang sekarang ini kurang dari 1 juta barrel per hari," ujar Presiden.

Indonesia, tambah Presiden, sekarang ini justru juga dikenal sebagai *net importir* atau pengimpor minyak.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, kajian yang dilakukannya termasuk mencari posisi yang lebih pas untuk Indonesia.

Indonesia, ujar Purnomo, mungkin tidak keluar dari OPEC tahun ini karena baru saja membayar iuran keanggotaan untuk tahun ini. "Indonesia memang masih produsen, tetapi kita juga banyak dikenal sebagai negara konsumen. Oleh karena itu, di-

Sejak 2003 sampai sekarang, Indonesia sudah menjadi net oil importir.

lihat apakah masih pas posisi kita di OPEC. Kalau konsumen, kan, ya tempatnya di Badan Energi Internasional (IEA)," ujarnya.

Indonesia mulai bergabung dengan OPEC tahun 1962. Ketika itu, dengan produksi sekitar 1,6

juta barrel per hari, sedangkan konsumsi kurang dari 1 juta barrel, Indonesia termasuk eksportir minyak yang cukup penting.

Uang iuran Rp 28 miliar

Sejak 2003 sampai sekarang Indonesia sudah menjadi *net oil importir*. Berdasarkan catatan Kompas, kajian untuk keluar dari OPEC sudah dilakukan pemerintah pada tahun 2005.

Ketika itu, Departemen Luar Negeri mengusulkan agar Indonesia mengubah status keanggotaannya menjadi peninjau agar tidak perlu membayar iuran keanggotaan sebesar 2 juta euro per tahun atau sekitar Rp 28 miliar.

Saat ini, dari 13 anggota OPEC dengan total produksi minyak 2 juta barrel per hari, Indonesi

menempati posisi ketiga terbawah dengan produksi minyak mentah (tanpa kondensat) sekitar 846.000 barrel per hari.

Di bawah Indonesia ada Qatar dengan produksi minyak hanya 814.000 barrel per hari, dan Ekuador dengan produksi minyak sekitar 511.000 barrel per hari.

Gubernur OPEC untuk Indonesia Maizar Rahman mengatakan, semua negara bergabung dengan OPEC karena memiliki kepentingan untuk mengamalkan ekspor minyak mereka.

"Ketika bergabung dengan OPEC, Indonesia sebagai eksportir minyak. Kita berkepentingan untuk menjadi anggota yang memiliki hak suara untuk bisa menentukan harga," kata Maizar. (DOT/LKT/HAR)

107

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM
 ENERGI ALTERNATIF

JAN FEB MAR APR MEL JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6 Oleh A TONY PRASETIANTONO TAHUN 2008

Teka-teki dan Misteri Harga BBM

Harga minyak kian menjadi teka-teki—bahkan menyerupai misteri—yang sulit dipecahkan. Bahkan, faktor penyebab kenaikan harga yang dominan pun menimbulkan perdebatan. Apakah lebih banyak disebabkan oleh faktor fundamental (tarik-menarik penawaran dan permintaan) atau oleh faktor lain, seperti spekulasi?

Bukti kesulitan ini terlihat dari kerepotan IMF yang harus sering merevisi asumsi. Akhir 2007, IMF memperkirakan harga minyak dunia tahun 2008 "hanya" 80 dollar AS per barrel. Namun, akhir Maret 2008, proyeksi berubah menjadi 100 dollar AS per barrel. Tampaknya, angka ini belum final karena harga minyak pernah menyentuh 120 dollar AS per barrel.

Fundamental, geopolitik, spekulasi

Produksi dan konsumsi minyak dunia kini bertemu pada ekuilibrium 84 juta barrel per hari. Namun, harus diakui, permintaan tumbuh pesat, terutama karena faktor perekonomian China yang melaju. Bahkan, ketika harga minyak sudah di atas 110 dollar AS per barrel seperti sekarang, perekonomian China masih tumbuh 10,5 persen pada triwulan pertama 2008.

Dari sisi penawaran, atmosfer eksplorasi sempat lesu karena harga minyak dunia pernah amat rendah (9 dollar AS per barrel) pada 1986. Akibatnya, kenaikan produksi tidak secepat konsumsi.

Khusus Indonesia, kini produksinya 900.000 barrel per hari, padahal konsumsi kita 1,3 juta barrel per hari. Situasi ini kontras dengan tahun 1980-an, kita pernah memproduksi 1,6 juta barrel/hari, padahal konsumsinya 600.000 barrel per hari.

Analisis bahwa faktor fundamental bisa menjelaskan kenaikan harga minyak, an-

tara lain, dilakukan Leonardo Maugeri (*The Age of Oil: The Mythology, History, and Future of the World's Most Controversial Resource*, The Lyons Press, 2008).

Namun, bagi para produsen minyak, faktor fundamental bukan alasan penjelas yang tepat. Produsen mengklaim bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Faktor geopolitik dan spekulasi dituding sebagai biang keladi. Argumentasi ini pun logis, saat akhir-akhir ini dunia mengalami kelebihan likuiditas (*overliquid*) sehingga sebagian dana itu dialokasikan oleh *hedge fund* (perusahaan investasi yang mengelola dana investor kaya) untuk membeli minyak. Minyak tidak lagi berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi sudah masuk wilayah instrumen investasi sehingga harganya berfluktuasi seperti harga saham.

Jika tesis terakhir ini benar, solusinya bukan terletak pada *supply* dan *demand*, tetapi lebih pada upaya mengurangi ruang gerak spekulasi. *Hedge fund*, berbeda dengan *mutual fund*, selama ini kurang disentuh regulasi. Mungkin sudah waktunya Securities Exchange Commission (SEC, regulator pasar modal Amerika Serikat) untuk lebih menatanya dengan regulasi. Bila perlu, berlakukanlah aneka restriksi agar minyak tidak dimainkan spekulasi. Fungsi minyak dikembalikan sebagai faktor produksi yang esensial. Ide ini mungkin tidak populer bagi *market fundamentalists* dan penganut liberalisme, tetapi segala upaya perlu ditempuh.

Dilema pemerintah

Krisis harga minyak menciptakan dilema bagi Pemerintah Indonesia. Dengan harga minyak dunia rata-rata 110 dollar AS per barrel, subsidi BBM, listrik, dan pangan akan mencapai Rp 250 triliun. Dibandingkan volume belanja APBN 2008 sebesar Rp 978 triliun, angka subsidi itu terlalu besar (25 persen). Karena itu, pilihannya adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Masalahnya, secara politis kenaikan harga BBM tidak menguntungkan, apalagi menjelang Pemilu 2009. Belum lagi faktor inflasi, di mana inflasi *year on year* kini mencapai 8,96 persen.

Dengan plus-minusnya, harga BBM bersubsidi harus dinaikkan, dengan besaran yang dapat diterima. Beban subsidi BBM akan meningkat seiring pergeseran pola konsumsi energi dari BBM nonsubsidi (pertamax) ke BBM bersubsidi. Data Pertamina menunjukkan, pada Maret 2008 volume penjualan pertamax turun 15 persen dan pertamax plus turun 13 persen.

Sebagian konsumen pertamax beralih ke premium bersubsidi, itu terlihat dari meningkatnya volume penjualan dari 1,44 miliar kiloliter (Februari) menjadi 1,58 miliar kiloliter (Maret 2008) atau naik 8,0 persen. Akibatnya, penjualan BBM bersubsidi triwulan I-2008 melampaui kuota 35,5 juta kiloliter. Persisnya, terjadi pelampauan dari yang semestinya 25 persen untuk setiap triwulan menjadi 27 persen.

Kesimpulannya, sulit mengharap masyarakat secara sadar dan sukarela melakukan penghematan. Upaya berhemat harus dilakukan dengan "agak memaksa". Langkah yang efektif adalah melalui kenaikan harga. Dengan harga lebih tinggi akan menyebabkan konsumen—mau tidak mau—segera berhemat. Memang hal ini bukan langkah populer, tetapi pemerintah tidak memiliki banyak alternatif.

Alternatif lain, misalnya, menaikkan anggaran subsidi BBM melalui peningkatan defisit APBN 2008, sekitar 2,0 hingga 2,1 persen. Namun, level ini tergolong riskan. Umum diketahui para ekonom dunia dan dirumuskan dalam Washington Consensus bahwa defisit anggaran negara berkembang maksimal yang ditoleransi adalah 2 persen [John Williamson (ed.), *The Political Economy of Policy Reform*, Institute for International Economics, Washington DC, 1994]. Bila melampaui

2 persen, di kemudian hari bakal rawan terjadi bencana fiskal.

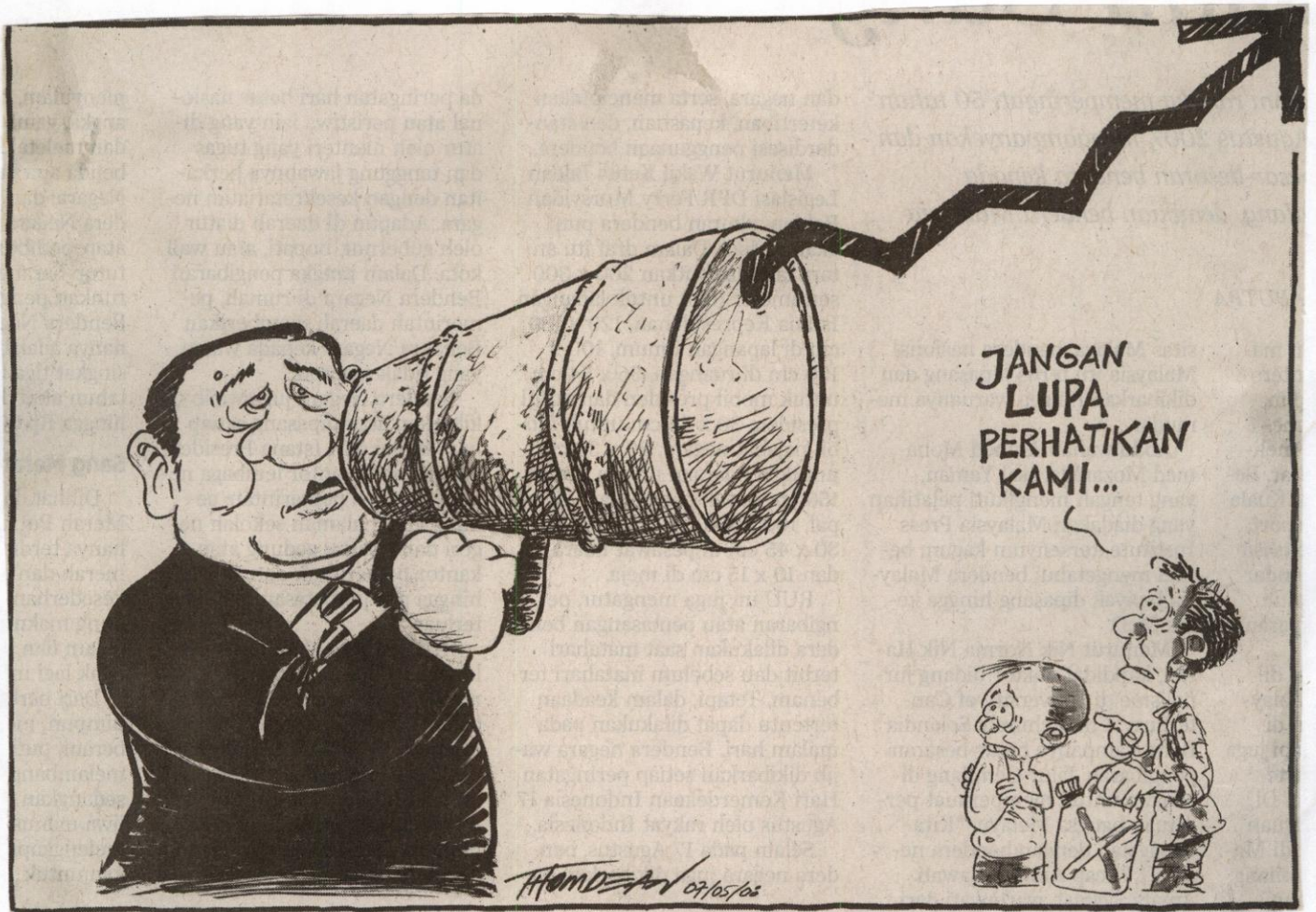
Masalahnya kini, berapa besaran kenaikan harga yang tepat? Departemen Keuangan mengusulkan skema kenaikan rata-rata 28,7 persen sehingga harga premium bersubsidi naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Menurut saya, angka ini perlu "diperhalus". Saya menduga, angka kenaikan Rp 1.000 per liter masih bisa diakomodasi sehingga tidak menimbulkan efek psikologis negatif.

Upaya Presiden Yudhoyono melakukan persuasi melalui pidato televisi pekan lalu sudah benar. Ini merupakan bagian *conditioning* setelah pemerintah berpengalaman pahit menaikkan harga BBM 100 persen pada 1 Oktober 2005, yang menimbulkan kegusaran masyarakat.

Seyogianya, pemerintah membeberkan data harga BBM di berbagai negara di kawasan. Harga BBM di Kamboja, misalnya, ekuivalen Rp 12.000 per liter. Artinya, seluruh dunia kini sedang prihatin menghadapi masalah yang sama, sedangkan risiko inflasi, juga dialami banyak negara. Inflasi *year on year* Singapura, misalnya, negara berkarakteristik *small open economy*, sudah 6,6 persen, China mencapai 8,7 persen, dan puncaknya adalah Vietnam dengan 19 persen!

Efektivitas kampanye penghematan energi amat diragukan bila tidak disertai *enforcement* berupa kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, ini hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan efek psikologis masyarakat. Karena itu, faktor psikologis seyogianya menjadi penentu besaran kenaikan harga BBM bersubsidi. Kenaikan maksimal Rp 1.000 bagi BBM premium merupakan kompromi yang tampaknya bisa mempertautkan kepentingan ekonomi sekaligus psikologis itu.

A TONY PRASETIANTONO
Peneliti Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM; Chief Economist BNI



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

Jelang Kenaikan Harga BBM

TAHUN 2008

Pulihkan Daya Beli Masyarakat

[JAKARTA] Pemerintah diingatkan untuk memulihkan daya beli masyarakat, terutama kaum miskin, yang diperkirakan paling berat menanggung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Untuk itu, pemerintah diminta menyiapkan program subsidi bagi masyarakat miskin. Selain itu, pungutan-pungutan ekstra yang membebankan dunia usaha juga diminta untuk dihapuskan.

Seruan itu dikemukakan kalangan pengusaha, masing-masing Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Sandiaga S Uno, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat, di Jakarta, Selasa (6/5) pagi, menanggapi keputusan pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM. Sebelumnya, pada Senin (5/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah telah berketetapan untuk memilih opsi menaikkan harga BBM.

Sofjan Wanandi mendukung pilihan pemerintah tersebut. Menurutnya, kalangan pengusaha kemungkinan tidak terlalu terbebani dengan dampak kenaikan harga BBM tersebut. "Karena kami (pengusaha) sudah menggunakan harga (BBM) internasional," jelasnya.

Namun, dia mengingatkan, kenaikan harga BBM akan sangat memberatkan masyarakat miskin. Bantuan, kata dia, bisa dalam bentuk

Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar masyarakat tetap memiliki daya beli.

Secara terpisah, Sandiaga Uno juga mengingatkan, selain menyusun program jaring pengaman bagi rakyat miskin, seperti BLT, pemerintah juga perlu memberi insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, MS Hidayat meminta pemerintah menghapus pungutan-pungutan ekstra yang tidak diperlukan. Kenaikan harga BBM, otomatis harga pangan dan kebutuhan lainnya, termasuk transportasi akan naik.

Pendapat yang lain dikemukakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi, Pri Agung Rakhmanto, bahwa keputusan menaikkan harga BBM sebaiknya bukan demi menyelamatkan APBN semata. "Menyelamatkan anggaran tetapi masyarakat justru semakin terpukul, akan menimbulkan persoalan baru. Program kompensasi atas kenaikan harga BBM harus dilaksanakan sungguh-sungguh," katanya.

Siapkan BLT

Pada kesempatan sebelumnya, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas, Syahrial Loetan mengungkapkan, untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan skema BLT bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk pemberian BLT, pemerintah mengacu pada data

lama penduduk miskin, yang dikumpulkan pada akhir 2005 sampai 2006. Menurut data Bappenas, kemiskinan di Indonesia masih sekitar 16-17 persen dari jumlah penduduk, atau sekitar 38 juta jiwa.

Namun, program itu dikritik ekonom Aviliani. Menurutnya, BLT tidak efektif untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin jika harga BBM dinaikkan. Pemberian BLT, tidak bisa menciptakan lapangan kerja.

Secara terpisah, ekonom Hendri Saparini menilai, menaikkan harga BBM dirasa tidak adil dan akan membebani masyarakat. Untuk menopang lonjakan subsidi BBM, pemerintah harus menaikkan *lifting* produksi minyak hingga mencapai level 1 juta barel per hari. Pemerintah juga dapat memangkas anggaran pengeluaran, mengurangi alokasi pembayaran utang, memangkas biaya impor BBM dan pos dana bagi hasil dari *windfall profit* (keuntungan yang diperoleh akibat kenaikan harga minyak).

Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM mulai muncul. Di Surabaya, misalnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya, berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jatim, Surabaya, Senin (5/5). Mereka mengingatkan, saat ini banyak masyarakat miskin tidak mampu membeli sejumlah kebutuhan pokok.

[CNV/DLS/H-13/D-10/M-16/080]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 KORAN KONTAN
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA

SUARA KARYA
 SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Harga Bahan Pokok Berlomba Naik

JAKARTA (MI): Hanya berselang satu hari setelah pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga-harga bahan pokok di sejumlah daerah langsung terkerek, kemarin. Padahal, pemerintah belum menentukan kapan harga BBM dinaikkan dan berapa besar kenaikannya.

Di dua pasar di Jakarta Utara, harga beras langsung naik Rp200 per liter, kemarin, dari Rp4.200 menjadi Rp4.400. "Saya menaikkan harga beras begitu ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa harga BBM naik," kata Edi, pedagang sembako di Pasar Pelita, Kelurahan Papanggo.

"Karena yang lain menaikkan harga, saya juga menaikkan harga," beber Sulaiman, pedagang sembako di Pasar Kompleks Kelurahan Rawabadak Utara.

Kenaikan harga bahan pokok secara mendadak juga terjadi di Pasar Wonokromo Surabaya. Hampir semua kebutuhan pokok di pasar tradisional terbesar di Kota Pahlawan itu naik antara Rp500 dan Rp1.000, kemarin.

Beberapa pedagang mengaku terkejut dengan kenaikan harga barang tersebut, padahal pemerintah belum menaikkan harga BBM. "Padahal sebelumnya harga barang normal," kata Widarti, pedagang Pasar Wonokromo.

Di Bogor, rencana kenaikan harga BBM memicu terjadinya kepanikan. Itu terlihat dari antrean panjang warga berburu premium di SPBU Desa Kotabatu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media cetak dan elektronik, Senin (6/5), Presiden memastikan pemerintah akan menaikkan harga BBM untuk mengurangi beban subsidi yang membengkak akibat melambungnya harga minyak mentah dunia.

"Tahapannya sekarang adalah bukan naik atau tidak. Tetapi kalau naik, berapa dan komoditas apa saja. Apa 20%, 25%, atau 30%," kata Kepala Negara.

Sekjen PKB versi MLB Parung,

Yenni Wahid, mengkritik pernyataan pemerintah soal kepastian menaikkan harga BBM itu. "Ini jelas mendatangkan pukulan yang hebat bagi rakyat. Akan ada tekanan sebanyak dua kali karena harga-harga barang naik, yakni saat pengumuman kepastian dan nanti saat harga BBM benar-benar naik," kata Yenni saat bersama pengurus PKB

bertandang ke Media Group, kemarin.

Pernyataan kepastian kenaikan harga BBM juga memicu terjadinya demonstrasi yang berujung bentrokan di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Bentrokan terjadi saat mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang menolak kenaikan har-

ga BBM menyandera sebuah mobil tangki Pertamina. Polisi lalu menangkap tujuh pengunjuk rasa.

Hemat Rp35 triliun

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan kenaikan harga BBM maksimal 30% akan menghasilkan penurunan subsidi BBM sebesar Rp35 triliun. Dana itu seluruhnya akan dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga miskin.

"Mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai plus sekitar Rp100 ribu setiap bulan ditambah bantuan makanan. Tidak ada satu sen pun dana penurunan subsidi untuk kepentingan belanja," jelas Paskah se usai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Hotel Bumi Karsa, Bidakara, Jakarta, kemarin.

Menurut Paskah, dalam dua minggu ini pemerintah menyiapkan kebijakan bantuan tunai plus sehingga penyaluran bantuan itu bisa berbarengan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan paling lambat awal Juni 2008.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, bantuan langsung tunai plus akan diberikan selama setahun ke depan.

Pemberian tunai, katanya, dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat karena selain kenaikan harga BBM, masyarakat dihadapkan pada tingginya harga pangan.

(Tim/X-11)



M/M IRFAN

►► 'Mereka akan mendapatkan bantuan langsung tunai plus sekitar Rp100 ribu setiap bulan.'

Paskah Suzetta - Kepala Bappenas

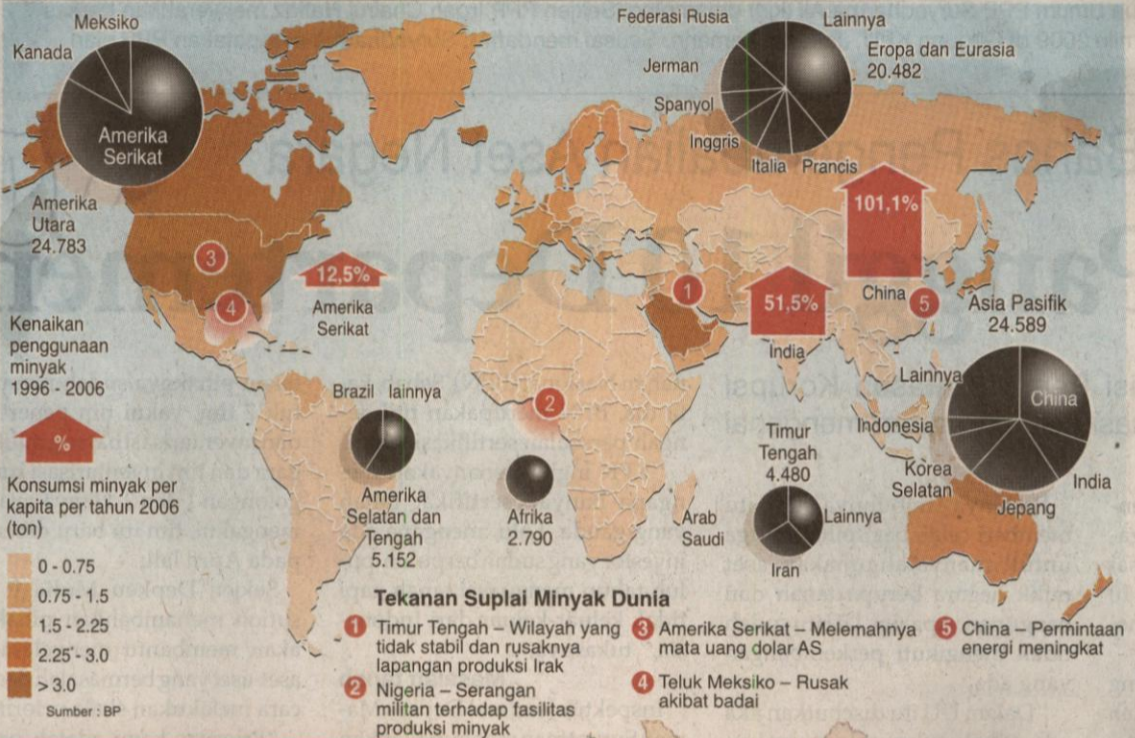
Harga Minyak US\$120 Per Barel



Harga minyak melonjak sebesar US\$4 per barel menjadi US\$120. Kenaikan itu diperkirakan karena melemahnya nilai dolar AS dan kekhawatiran terhadap suplai minyak dari Iran dan Nigeria.



KONSUMSI HARIAN 2006 (dalam ribu barel)



Skenario Kenaikan Harga BBM

BBM	Harga awal	Kenaikan (28,7%)
Premium	Rp4.500	Rp6.000
Solar	Rp4.300	Rp5.500
Minyak tanah	Rp2.000	Rp2.500

Dampak Isu Kenaikan Harga BBM

	Harga			Harga	
	Sebelum	Saat ini		Sebelum	Saat ini
1 Majene, Sulawesi					
Harga cat 1 liter	Rp22 ribu	Rp25 ribu.	3 Makassar	Minyak goreng curah (liter)	Rp11.000 Rp12.000
Besi batangan 10 cm	Rp65 Ribu	Rp75 ribu		Cabe kecil (kg)	Rp10.000 Rp15.000
Paku (kg)	Rp12 Ribu	Rp14 ribu.		Tomat buah dan tomat sayur (kg)	Rp3.500 Rp5.000
2 Surabaya					
Minyak goreng curah (kg)	Rp10.500	Rp11.000	Telur ayam (30 biji)	Rp23.000 Rp26.000	
Gula pasir	Rp5.500	Rp6.000.	Minyak tanah (liter)	Rp3.000 Rp4.000	
Beras IR46	Rp4.800	Rp5.000.	4 Banjarmasin		
Telur ayam (kg)	Rp11.000	Rp12.000	Minyak goreng curah kuning (liter)	Rp9.800	Rp10.000
			Minyak goreng curah putih (liter)	Rp12.250	Rp12.650
			Daging sapi (kg)	Rp58.000	Rp59.000
			Daging ayam (kg)	Rp20.000	Rp23.750
			Cabe rawit (kg)	Rp33.000	Rp37.000
			Bawang merah (kg)	Rp10.000	Rp17.000

Sumber : Reuters/Antara/Im M/Ghp/Olah.Grafis: TIYOK

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : T.6

TAHUN 2008

Eksplorasi

Perusahaan kilang China genjot produksi

SHANGHAI: Perusahaan minyak dan gas China yang bergerak di sektor pengilangan minyak menggenjot tingkat produksinya menyusul naiknya permintaan dari sektor manufaktur terutama sebagai bahan baku untuk produk kimia.

Dua pemain utama kilang minyak China, PetroChina dan Sinopec, telah berencana untuk menggenjot produksi kilangnya. Bahkan, PetroChina menargetkan bisa menguasai hingga 45% pangsa pasar segmen itu pada 2020. Pada 2010, perusahaan kilang terbesar China diharapkan mampu berproduksi 160 juta ton dan 300 juta ton pada 2020.

Begitu juga dengan Sinopec yang merencanakan menaikkan produksinya 15% pada September 2009 sehingga kapasitas produksinya menjadi 23 juta ton dari semula 20 juta ton. "PetroChina dan Sinopec kini

bersaing di pasar domestik untuk terus memperbesar pangsa pasarnya. (Bloomberg/fh)



PetroChina Co	160	Produksi kilang China (dalam juta ton) 2008-2010
CNOOC	60	
Sinopec	23	
Sinochem Corp	12	

Sumber : Bloomberg, diolah BISNIS/NOVIANTO

111

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

Demo BBM Pun Rusuh

Sopir, Nelayan, Pedagang, dan Kontraktor Mulai Mengeluh

MAKASSAR, KOMPAS — Bentrok antara mahasiswa pengunjung rasa dan polisi pecah, Selasa (6/5) siang, ketika 150-an mahasiswa berusaha memblokir arus lalu lintas Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi dilempari batu ketika berusaha membubarkan aksi unjuk rasa menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Sedikitnya dua polisi dan seorang mahasiswa terluka dalam insiden itu. Polisi menangkap sembilan mahasiswa.

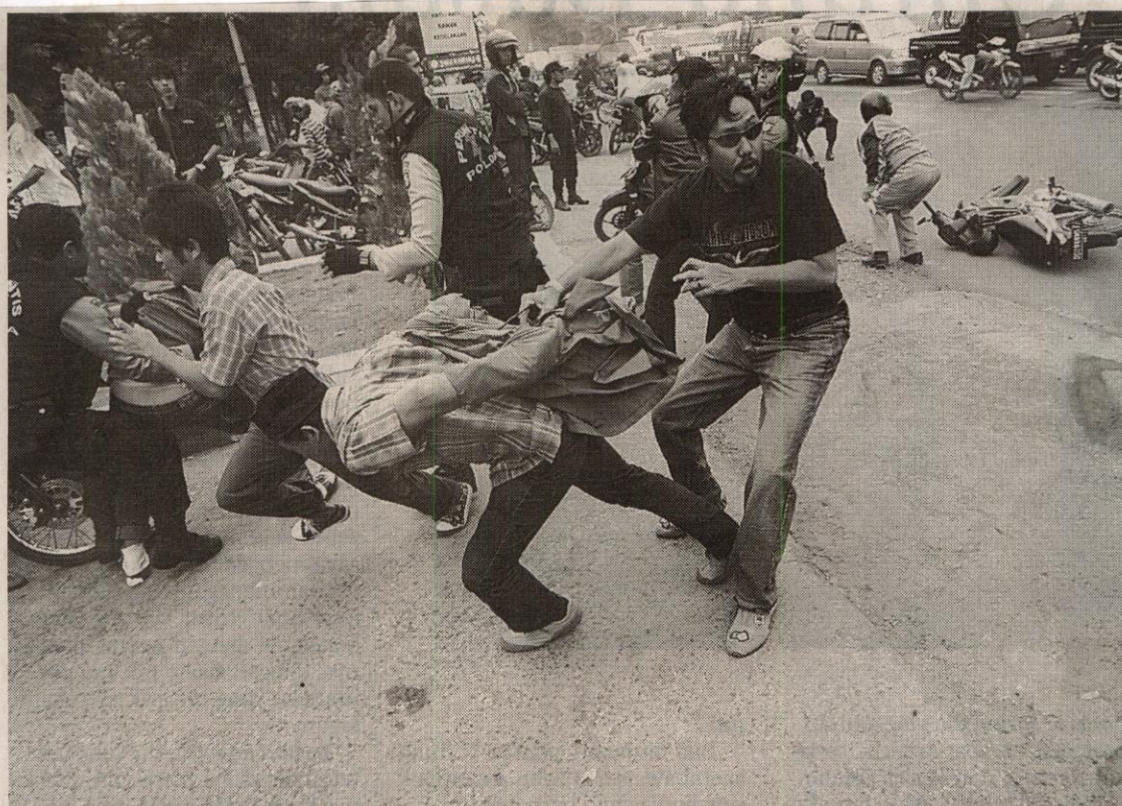
Sejak pukul 10.15, puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin mulai berunjuk rasa di badan Jalan Sultan Alauddin. Mereka memprotes rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan berorasi dan membakar ban sambil duduk di tengah jalan sehingga menghalangi arus lalu lintas.

Puluhan mahasiswa kemudian mencoba menyandera sebuah truk tangki BBM Pertamina yang melintasi Jalan Sultan Alauddin. Polisi mencoba mencegah mahasiswa menguasai truk tangki tersebut. Polisi selanjutnya menangkap lima mahasiswa.

Para mahasiswa melempari polisi dengan batu dan berteriak meminta rekan mereka dibebaskan. Mahasiswa kembali berorasi di tengah badan jalan dan melarang setiap kendaraan melintasi jalan di depan pintu gerbang utama Kampus UIN Alauddin.

Aksi pelemparan batu kembali terulang sesaat setelah Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar Timur Ajun Komisaris Besar Kamaruddin mencoba berdialog de-

112



TRIBUN TIMUR/ABBAS SANDJI

Sejumlah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, diamankan aparat kepolisian saat berdemo tolak kenaikan harga BBM di depan Kampus UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (6/5). Seorang petugas kepolisian berpakaian preman terkena lemparan batu saat terjadi demo dan satu mahasiswi pingsan terinjak saat demo dibubarkan petugas.

ngan mahasiswa yang menutup Jalan Alauddin. Polisi mengancam akan membubarkan secara paksa para mahasiswa sehingga para mahasiswa berlarian memasuki kampus mereka.

Suasana kembali ricuh karena dari dalam kampus mahasiswa melempari polisi yang berada di Jalan Alauddin dengan batu. Dua polisi yang mencoba memasuki kampus terkena lemparan batu dan terluka. Setelah 15 menit, pelemparan batu mereda.

Keluhan masyarakat

Sejumlah sopir bus kota di Yogyakarta, pengusaha otobis Cirebon, nelayan Cilacap, para pedagang di Magelang, serta kontraktor di Yogyakarta dan Ban-

dung mengungkapkan kekhawatiran mereka jika harga BBM naik. Bayangan kerugian besar dan macetnya usaha mereka akan terjadi di tengah naiknya harga barang kebutuhan lain mengikuti naiknya harga BBM.

"Pemerintah *ngawur*. *Mbok*, ya, tahu kondisi orang-orang seperti saya. Dengan solar Rp 4.500 per liter dan tarif Rp 2.000, penumpang sudah sepi karena memilih naik motor," keluh Dian (33), sopir bus Puskopkar di Yogyakarta Jalur 15.

Sekretaris Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) Cirebon Didik Z Hans mengatakan, pengusaha tidak bisa serta-merta menaikkan tarif karena penumpang

akan mengeluh dan memilih moda transportasi lain.

Kenaikan harga BBM, menurut Sukanto, Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) DIY, yang juga Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) DIY, akan memukul sektor usaha di DIY dan melumpuhkan daya beli masyarakat kecil.

Menurut Maryadi (38), nelayan Desa Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, jika harga BBM naik lagi, sama saja akan membunuh nelayan. "Kami sudah tercekik dengan harga BBM yang mahal. Apalagi kalau harga BBM naik lagi, akan jadi apa," ujarnya.

(RWN/PRA/A02/THT/CAS/MDN/ROW/BAY/EGD)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Harga BBM Berpacu Dengan Harga Barang

Ketidakjelasan jadwal kenaikan BBM mulai memicu berbagai spekulasi

**Yohan Rubiyantoro,
Hans Henricus Benedictus**

JAKARTA. Pemerintah sudah pasti akan menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maksimal 30%. Kenaikan kali ini mencontoh kenaikan BBM pada Maret 2005. Pertanyaannya, kapan harga akan naik? Inilah yang belum terjawab.

Jadwal yang belum pasti itu membuat suasana di pasar menjadi penuh spekulasi. Ekspektasi inflasi pun meningkat. Itu sebabnya Ketua Umum Kadin MS Hidayat meminta pemerintah segera mengumumkan kenaikan BBM. Pengumuman yang cepat bisa mencegah spekulasi dan

mengurangi ulah perimbun BBM. Langkah ini juga menghindari lonjakan harga barang-barang lain, yang cenderung sudah melesat lebih dulu. "Makin cepat makin baik," tegas Hidayat.

Gelagat itu memang sudah tampak. Di banyak daerah, pedagang langsung menaikkan harga barang begitu tahu pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Bahkan di Kalimantan Selatan, stok BBM di pompa bensin habis karena aksi para penimbun.

Sejauh ini, sinyal yang sudah tegas baru soal besarnya kenaikan yang tak lebih dari 30% itu. Alasannya, pemerintah tak ingin kenaikan terlalu berdampak ke-

pada masyarakat. "Pemerintahan SBY-JK sudah dua kali menaikkan BBM. Kenaikan sekarang hampir sama dengan yang pertama pada Maret 2005 atau maksimal 30%," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (6/5).

Sebelumnya, dalam skenario Departemen Keuangan per 26 April 2008, pemerintah akan menaikkan harga BBM secara rata-rata sebesar 28,7%. Premium atau bensin akan naik sebesar 33%, dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Harga solar naik 27,9%, dari Rp 4.300 per liter menjadi Rp 5.500 per liter. Minyak tanah naik 25%, dari Rp 2.000 per liter menjadi Rp 2.500 per liter. Kenaikan ini

berlaku untuk semua jenis kendaraan, termasuk angkutan umum.

Dengan kenaikan yang tak lebih dari 30%, pemerintah yakin dampaknya tidak akan membebarkan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki program pengobat rasa pahit masyarakat akibat kenaikan ini dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus dan Program Padat Karya. "Hari itu naik, hari itu juga kami salurkan," janji Kalla. Kepala Bappenas Paskah Suzetta menjelaskan, dalam dua pekan ini, pemerintah sudah selesai menyiapkan BLT Plus.

Sejumlah nelayan menghabiskan waktunya di salah satu emper rumah seorang nelayan bernama Mulyadi (30). Ayah satu anak ini sudah 15 hari tidak melaut.

Sejak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dua tahun silam, para nelayan beralih bahan bakar ke minyak tanah, dari seharusnya solar. Solar bahan bakar mesin diesel perahu mereka harganya tak terjangkau.

Saat ini, harga solar di tingkat nelayan Rp 4.300-Rp 4.500 per liter. Sementara harga minyak tanah di tingkat nelayan sekitar Rp 3.000 per liter.

Toh, meski sudah beralih ke bahan bakar minyak tanah yang lebih murah dibandingkan dengan solar, nelayan tetap tak terbantu. Harga minyak tanah terlalu tinggi.

Untuk sekali melaut, nelayan tradisional rata-rata membutuhkan 10 liter minyak tanah. De-

ngan demikian, nelayan harus mengeluarkan ongkos Rp 35.000 sekali melaut.

Sementara hasil tangkapan pada hari-hari ini rata-rata tak lebih dari 10 kilogram. Katakanlah nelayan mendapat 10 kilogram ikan lemuru. Jika harga lemuru Rp 1.000 per kilogram, nelayan hanya akan mengantongi pendapatan Rp 10.000. Artinya, nelayan tekor 25.000. Lemuru adalah jenis ikan yang paling banyak tertangkap jaring di

Probolinggo dan Pasuruan.

Inilah kondisi nelayan Pasuruan dan Probolinggo. Mereka harus berpikir dua kali sebelum melaut karena tekor melulu.

Pemandangan nelayan berkumpul di balai bambu atau emper rumah nelayan adalah lazim.

Setelah kenaikan harga BBM dua tahun silam, harga minyak tanah, barang substitusi solar, tak terjangkau nelayan tradisional. Ini menyebabkan mereka *ngebon* atau utang. Saat kema-

rau yang biasanya sepi ikan, nelayan umumnya tekor karena hasil tangkapan tak sebanding dengan biaya melaut. Apalagi harga ikan acap kali sangat rendah di tingkat nelayan. Utang pun menumpuk.

Meski demikian, nelayan tak bisa hanya terus duduk-duduk di pantai. Situasi ini akhirnya menyebabkan hidup keluarga nelayan tradisional bergantung pada utang. Selain untuk minyak tanah, nelayan juga mengutang

untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sedikit pula untuk biaya pendidikan anak-anak mereka. Baru pada musim panen ikan, para nelayan melunasi utang mereka. Demikian terus siklus utang-bayar ini berlaku di masyarakat nelayan.

"Kalau ada utang, kerja. Kalau tak ada utang, ya tidak bisa bekerja," kata Maililah (31), nelayan Desa Tamansari, Kecamatan Dringu, Probolinggo. Hal serupa dialami Maki yang utangnya

menumpuk Rp 220.000 di pengecer minyak tanah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jatim 2008, jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Pasuruan 14.382 keluarga. Nelayan Probolinggo berjumlah 13.545 keluarga. Sebagian besar nelayan tradisional.

Namun, apa yang bisa dilakukan kaum nelayan sekarang? Tidak ada lain kecuali menunggu mata badai lewat menyapu mereka....

rumah tangga miskin, yakni berupa bantuan dana tunai dan pangan. Paskah mengatakan, target jumlah keluarga miskin yang mendapat dana kompensasi bantuan akibat kenaikan harga BBM masih mengacu pada angka kepala keluarga (KK) miskin tahun 2005. "Targetnya masih sama, yaitu 19,1 juta KK," kata Paskah.

Dalam program yang disusun Bappenas, penyaluran BLT plus akan dilakukan seiring dengan BLT bersyarat. Bedanya, BLT bersyarat ditujukan bagi keluarga miskin dan hampir miskin, sedangkan BLT plus khusus bagi keluarga sangat miskin.

Bantuan pangan, di antaranya terdiri atas minyak goreng dan gula, rencananya disalurkan melalui RT/RW, sedangkan bantuan dana tunai disalurkan melalui kantor pos.

Alokasi subsidi BBM

Menneg PPN juga memastikan bahwa rata-rata kenaikan harga BBM subsidi yang akan diputuskan pemerintah maksimal sebesar 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM rata-rata 30 persen, pemerintah dapat mengurangi tekanan beban subsidi sampai sebesar Rp 35 triliun.

"Hasil dari kenaikan harga BBM itu semuanya untuk kompensasi rakyat kecil. Jadi, tidak ada satu sen pun yang diambil untuk biaya rutin maupun biaya pembangunan," ujar Paskah.

Direktur Eksekutif Centre for Agricultural Policy Studies HS Dillon mengemukakan, pembe-

rian BLT plus hanya berlangsung satu tahun, sedangkan dampak kenaikan harga BBM akan panjang. Karena itu, BLT plus tidak cukup. "Yang terpenting, pemerintah harus mengupayakan agar kenaikan harga bisa disesuaikan oleh masyarakat," katanya.

Waktu kenaikan

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar mengatakan, pemerintah sudah mengajukan rencana kenaikan harga BBM secara informal kepada pimpinan Panitia Anggaran dan pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Skenario kenaikan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan di Hotel Grand Hyatt, Rabu pekan lalu. "Saya kira pemerintah tidak perlu menyampaikan lagi ke DPR," ujarnya.

Ketua Komisi Bidang Energi DPR Airlangga Hartarto menilai, pemerintah tetap perlu menyampaikan secara formal kepada DPR. "Kebijakan kenaikan harga harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau menunggu 2-3 minggu, keburu terjadi aksi spekulasi yang menimbulan BBM," katanya.

Terkait waktu kenaikan harga BBM, Sri Mulyani mengakui, pemerintah memang sangat berhati-hati, terutama mengantisipasi segala eksekusi yang mungkin timbul. Namun, menurut Menkeu, kenaikan harga BBM bersamaan dengan kesiapan BLT. "BLT siap dalam tiga minggu," ujarnya.

Mengacu pada penjelasan Menkeu, pemerintah kemungkinan besar akan menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 Juni 2008.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR mengingatkan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada menurunnya daya beli rakyat serta inflasi. "Maka, F-PPP minta agar sebagian besar perolehan dari kenaikan harga itu dikembalikan ke rakyat," ujar Sekretaris F-PPP DPR Suharso Monoarfa.

Suharso juga mengingatkan agar pemerintah tidak berlarut-larut mengambil keputusan soal BBM subsidi ini. "Semakin cepat diambil keputusan, semakin baik. Jika berlarut-larut, kredibilitas APBN akan terganggu. Kalau itu terjadi, kenaikan harga BBM tidak akan efektif lagi sebab akan semakin terlihat bahwa pemerintah ragu," tuturnya.

Ketua Komite Tetap Moneter dan Fiskal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo menilai, dua hari berturut-turut dunia usaha menerima dua pukulan telak.

Pertama, pemerintah membuat kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, sikap mengambang dalam menentukan besaran dan waktu pemberlakuan kenaikan harga BBM menyebabkan spekulasi mulai bermain sehingga merugikan dunia usaha.

Pukulan kedua berasal dari otoritas moneter berupa keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan (BI rate) dari 8 persen menjadi 8,25 persen. Ini merupakan tambahan beban pada biaya produksi atau modal kerja.

(LKT/HAR/JOY/MAM/
RYO/ELY/OSA/DOT)



115

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MEI** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2008

Minyak Tanah Mulai Langka

Polda Jabar Berhasil Gagalkan Penyelundupan BBM

SUBANG (SINDO) – Stok bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah di beberapa daerah semakin menipis. Warga harus antre untuk mendapat jatah minyak tanah.

Kelangkaan BBM juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Tampak antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang kehabisan stok premium. Menurut Diana, 35, pemilik pangkalan minyak bernomor NIAP 31.1.186, kondisi ini terjadi sejak akhir April. Kelangkaan minyak tanah itu sendiri disebabkan, adanya pengurangan jatah minyak tanah dari Pertamina. "Biasanya satu bulan saya mendapat jatah empat tangki, tapi sekarang hanya tiga kali, itu pun sering terlambat," ujar Diana kepada SINDO kemarin.

Untuk premium, beberapa SPBU mengalami kekurangan pasokan. Di SPBU 344.1.207 Sukemelang, Subang misalnya, memilih tutup

lebih awal karena persediaan premium habis. Kelangkaan premium di wilayah Subang diyakini karena lambatnya distribusi BBM ke wilayah tersebut. Sedangkan di Bojonegoro, Jawa Timur, beberapa SPBU kehabisan stok premium. SPBU-SPBU tersebut tersebar di Kecamatan Balen, Sumberrejo, Kapas, dan Kota Bojonegoro. Di SPBU-SPBU tersebut terpampang pengumuman "Premium Habis".

Sementara itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM disikapi beragam. DPRD Kabupaten Bandung misalnya, mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga. Anggota Komisi B DPR Kabupaten Bandung Tb Raditya menyatakan kenaikan BBM menimbulkan

biaya politik dan sosial yang lebih besar.

Namun, Sekjen Komite Indonesia untuk Penghematan dan Pengawasan Energi Sofyano Zakaria menilai putusan pemerintah untuk menaikkan harga jual BBM di dalam negeri dapat dipahami sepanjang putusan tersebut dapat memperbaiki kondisi perekonomian dan pembangunan nasional, bukan semata-mata untuk mengurangi beban anggaran atas subsidi BBM. "Persentase kenaikan harga BBM bersubsidi harus terukur dengan kemampuan daya beli masyarakat lemah," tegasnya.

Dia memaparkan, pemerintah harus mengeluarkan peraturan tentang peruntukan dan pengguna BBM bersubsidi yang mempertegas secara jelas bahwa BBM bersubsidi digunakan hanya untuk kepentingan alat transportasi darat nonindustri dan pengunannya adalah untuk golongan

an masyarakat tidak mampu. "Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah harus segera memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada rakyat miskin dengan memberikan kartu jaminan sosial kepada mereka yang benar-benar berhak," sebutnya.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) di beberapa daerah menegaskan akan menaikkan tarif angkutan umum apabila pemerintah menaikkan harga BBM. "Saat ini peraturan batas tarif atas sebesar Rp130 per km dari tiap penumpang, dan batas bawah Rp80 per km tiap penumpang untuk kelas ekonomi. Jadi, kami harapkan ada peningkatan tarif batas atas sebesar 20%," ujar Ketua DPD Organda Daerah Istimewa Yogyakarta Joni Parmantya.

Sementara itu, Polda Jawa Barat memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM untuk menekan penye-

lundupan. Kapolda Jabar Iren Pol Sisno Duaji menegaskan, hingga saat ini pihak Polda Jabar sudah menggagalkan penyeludupan BBM sebanyak 417 ton di semua wilayah Jawa Barat. Dia "Sejauh ini kita berhasil menggagalkan penyeludupan BBM dan kita tindak tegas para pelakunya siapa pun itu," tegasnya.

Kapolres Karawang AKBP Bambang Kristiyono mengatakan, pihaknya berhasil menggagalkan penyeludupan minyak tanah di sekitar wilayah Desa Sungai Buntu. Pihak kepolisian berhasil mengamankan dua tersangka, sedangkan Polres Purwakarta berhasil membongkar penimbun dan penyeludup minyak tanah di Kelurahan Cisureuh, Purwakarta.

(raka zaipul/
asep supiandi/
nanang fahrudin/
annas nashrullah/
iwa ahmad sugriwa/
evi panjaitan)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR **MET** JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

Menyelamatkan Anggaran vs Menyelamatkan Rakyat

Agus Suman PhD

Dosen Ilmu Ekonomi Unibraw
Alumni Universite Pierre
Mendes Prancis



Mengambil keputusan dalam suasana kritis seperti sekarang sangat tidak enak dan penuh risiko. Tapi dalam situasi seperti inilah kualitas kepemimpinan seorang presiden diuji. Ketika kepentingan rakyat sangat beragam, tugas seorang pemimpin adalah melahirkan jalan tengah dari sebuah dilema.

Dalam konteks bahan bakar minyak (BBM), terdapat dua kepentingan yang bertentangan, yakni kepentingan pemerintah, untuk menaikkan harga BBM demi meringankan beban keuangan negara; dan kepentingan publik, terutama kalangan yang berpenghasilan rendah, yang menghendaki tidak ada kenaikan harga BBM agar kehidupan mereka tidak semakin terpuruk.

Pengalaman Getir

Bila melihat kepungan persoalan yang membentang, rakyat memang harus menyadari bahwa kenaikan harga BBM adalah sebuah pilihan pahit yang harus diterima. Akan tetapi, bila melihat jejak ke belakang, dampak kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005 masih sangat jelas terbayang, betapa saat itu daya beli dan belanja masyarakat melemah, investasi dalam negeri begitu merosot, dan

pengangguran begitu melejit.

Ternyata, berbagai kebijakan yang dikumandangkan sebagai bantalan dari dampak kenaikan harga BBM hanya indah di atas kertas.

Dengan menaikkan harga BBM sebesar 126% pada Oktober 2005 pemerintah mengurangi subsidi BBM dan menghemat antara Rp50 sampai Rp80 triliun.

Rencananya, penghematan tersebut bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Secara teori, kenaikan harga BBM hanya mengubah penggunaan dana pemerintah dari subsidi BBM yang tidak efisien karena kebanyakan dinikmati kalangan menengah atas dan memicu penyelundupan BBM ke luar negeri, ke pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial yang lebih efisien karena mempercepat pembangunan serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ternyata, kalkulasi di atas kertas jauh dari kenyataan. Pada paruh pertama 2006, kurang dari 23% anggaran pembangunan pemerintah tercairkan. Akibatnya, pemerintah memiliki dana lebih dari Rp50 triliun di Bank Indonesia (BI), sementara bank pembangunan daerah, pengelola dana pemerintah daerah, menyimpan lebih dari Rp40 triliun dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.

Dana "menganggur" inilah yang

semestinya digunakan untuk pembangunan dan mengurangi dampak ekonomi negatif akibat kenaikan harga BBM. Jadi tampak bahwa kebijakan menaikkan harga BBM tidak diparelnkan dengan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat banyak. Di sini terlihat pemerintah masih kedodoran mengelola dana belanja tersebut.

Ketatnya pengawasan membuat banyak pejabat pemerintah yang enggan menjadi pelaksana proyek. Hal itu pun berimbas pada pelemahan pertumbuhan ekonomi saat itu, sehingga mengalami penurunan dari 6,3% pada triwulan I/2005 ke 4,6% pada triwulan I/2006.

Menaikkan atau Tidak

Keduanya bisa benar, tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi sumber "bencana" dari segi sosial maupun politik. Semua bergantung pada seberapa jauh kita konsisten pada pilihan dan pelaksanaan program alternatif untuk menekan dampaknya.

Jika menaikkan harga BBM yang jadi pilihan, *blueprint* yang matang harus disiapkan, agar pengalaman pahit kenaikan BBM yang terdahulu tidak terulang dan momen sekarang ini bisa dilakukan sebagai bentuk pembelajaran publik. Rakyat harus disadarkan bahwa negeri yang kita diami ini bukan lagi negeri yang kaya raya dan berlimpah hasil minyak, karenanya tidak ada pilihan lain kecuali harus berhemat.

Jika pemerintah tidak menaikkan harga minyak, tentu harus ada alternatif untuk menekan defisit anggaran kita yang tergerus oleh subsidi minyak untuk rakyat. Tentu saja anggaran akan ludes oleh subsidi energi, dan akibatnya dana pembangunan yang tersisa cukup berat untuk mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Yang pasti "roh" kebijakan yang diambil harus didesain untuk menyelamatkan persoalan rakyat. Meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun adalah upaya memberikeleluasaan anggaran agar lebih bermanfaat untuk rakyat karena problem kronis yang menempel pada anggaran negara selama ini adalah struktur pengeluaran APBN yang lebih banyak untuk keperluan-keperluan rutin pemerintah, kemudian proporsi pengeluaran pembangunan sendiri tidak mencerminkan skala prioritas persoalan di masyarakat, selain pengeluaran pemerintah selama puluhan tahun selalu dipenuhi dengan angka-angka pembayaran utang luar negeri.

Jika warna anggaran negara masih tersaput corak seperti ini, maka mengurangi subsidi BBM adalah upaya yang hanya menyelamatkan APBN, tetapi jauh dari tindakan menyelamatkan persoalan rakyat. Maka, kenaikan BBM akan semakin menjadi beban bagi rakyat. Semoga pemerintah mampu melewati ujian ini, tentu saja dengan predikat *summa cum laude* dari rakyat. (*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2008

Kompensasi BBM Disiapkan

JAKARTA (SINDO) – Setelah memastikan kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan program kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT).

Program BLT diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat miskin pascakenaikan harga BBM.

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta mengatakan, dana program BLT berasal dari penghematan anggaran subsidi BBM yang diperkirakan mencapai Rp35 triliun apabila harga BBM dinaikkan 30%. "Ini sedang dikaji dan dananya untuk BLT plus. Ditransfer semua untuk kepentingan itu dan tidak ada satu pun untuk kepentingan belanja," ujarnya di Jakarta kemarin.

Dia menjelaskan, seiring naiknya harga BBM bersubsidi, pemerintah berencana memberikan BLT kepada 19,1 juta rumah tangga miskin. Setiap rumah tangga akan memperoleh BLT sekitar Rp100.000 per bulan ditambah bantuan makanan. "Kebijakan kita siapkan dalam dua pekan lagi, berbarengan dengan kenaikan BBM yang diharapkan Juni nanti," kata Paskah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, program BLT akan dilakukan selama setahun. Kebijakan itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. "Program BLT sedang disiapkan Menteri Sosial, Bappenas, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Pola distribusinya sama dengan BLT tahun 2005 lalu," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM tahun ini lebih besar dibanding kenaikan Maret 2005 lalu. Berdasarkan kalkulasinya, apabila harga BBM dinaikkan 30%, inflasi bulanan pada Juni 2008 akan mencapai 2,7%.

Pada Maret 2005, saat harga BBM dinaikkan 29%, inflasinya mencapai 1,91%.

"Inflasi tahun ini kemungkinan lebih tinggi karena ada juga tekanan dari harga pangan," katanya.

Menteri Koordinator Perencanaan Boediono menambahkan, bantuan bahan makanan kepada masyarakat selama ini telah diberikan dalam program beras untuk warga miskin (raskin). Pada tahun ini, jumlah raskin ditambah dari 10 kg menjadi 15 kg tiap rumah tangga miskin. "Kita juga akan adakan penjualan beras murah di kantong masyarakat miskin," katanya.

Ekonom Indef Aviliani menyarankan pemerintah tidak mengulang penerapan skenario BLT. Selain tidak mendorong perbaikan kondisi penerima bantuan, BLT juga terbukti tidak mampu mengurangi kemiskinan secara mendasar. "BLT tidak pas, pemerintah perlu memikirkan skenario agar tercipta lapangan ker-

ja yang bisa memperkuat sisi daya beli mereka," ujar dia.

Menurut Aviliani, salah satu instrumen penciptaan lapangan kerja yang cukup tepat direalisasikan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Hanya, program ini harus diarahkan pada sektor pertanian, sektor yang paling banyak menyerap angkatan kerja nasional. "Bila itu dikembangkan, selain masyarakat kita dapat kerja, kebutuhan pangan kita juga bisa terpenuhi," kata dia.

Dorongan Inflasi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia MSHidayat mengatakan, ketidakjelasan besaran dan waktu penerapan kenaikan harga BBM dipastikan mendorong laju inflasi. "Itu pasti (mendorong laju inflasi). Karena itu, saya minta Sri Mulyani (Menteri Keuangan) segera naikkan (harga BBM). Makin cepat, makin baik,"

ujar dia.

Menurut dia, kepastian waktu penetapan dan besaran kenaikan juga akan menghapuskan spekulasi kalangan pengusaha. Dengan begitu, dunia usaha juga bakal mempersiapkan penyesuaian diri.

"Paling tidak akhir bulan ini sudah dipastikan. Itu permintaan kami. Apalagi yang ditunggu pemerintah saat ini *kan* menyiapkan dana BLT," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengatakan, kemungkinan ekspektasi inflasi akibat ketidakjelasan kebijakan itu bersumber dari keragu-raguan pemerintah dalam menentukan besaran dan waktu kenaikan BBM. "Sekarang kebijakan apa pun silakan diambil pemerintah, asalkan cepat," katanya.

Penghematan Total

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menyerukan kepada para gu-

bernur, bupati, dan wali kota untuk memimpin gerakan penghematan total pada energi, listrik, dan BBM. Presiden menegaskan, solusi yang ditempuh pemerintah ini dapat menyelesaikan masalah tingginya harga minyak global yang berimbas di dalam negeri.

"Untuk mengatasi tingginya harga minyak, kita ingin kebijakan yang kita tempuh adalah meningkatkan produksi minyak dan gas kita ke depan. Tentu tetap mempertahankan kesinambungan untuk generasi yang akan datang," ujar Presiden SBY di Jakarta kemarin.

Presiden kembali menjelaskan tiga pilar dari kebijakan pemerintah menyangkut penyelamatan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Ketiga pilar tersebut penghematan menyeluruh dan mengurangi subsidi untuk menghindari jebolnya APBN. Pilar ketiga, bila saatnya harga BBM dinaikkan, pemerintah membantu kalangan lemah, mengeluarkan BLT.

"Pengurangan subsidi ini termasuk kemungkinan menaikkan harga BBM pada persentase tertentu. Meskipun itu kita pilih, kaum lemah akan kita berikan perlindungan," jelasnya.

Presiden berpendapat, terhadap tingginya harga minyak dan pangan, harus ada intervensi masyarakat dunia bagaimana mencegah penderitaan yang luas di dunia ini. Resesi atau pelambatan ekonomi di AS juga akan terus berpengaruh secara luas dan akan dirasakan pula negara-negara di seluruh dunia.

Menurut Presiden, pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada energi fosil. "Kita punya yang lain, gas, batu bara, minyak bumi dan sumber-sumber lain yang terbarukan. Harga tambang ini mestinya anugerah bagi kita karena kita kaya akan sumber daya mineral yang juga sangat tinggi harganya," tambahnya.

(rarasati syarief/
zaenal muttaqin/
muhammad ma'ruf)